

KOMPETISI ARSITEKTUR KONEKTIVITAS GLOBAL

Posisi dan Opsi bagi Indonesia



KOMPETISI ARSITEKTUR KONEKTIVITAS GLOBAL

Posisi dan Opsi bagi Indonesia

Penulis

Indah Lestari, Muhammad Habib Abiyan Dzakwan,
Dandy Rafitrandi dan Agus Catur Aryanto Putro

Asisten Penulis

Rionanda Dhamma Putra, Jessica Arreta dan
Bimo Pragilaksono

LABORATORIUM INDONESIA 2045

2023

Kompetisi Arsitektur Konektivitas Global: Posisi dan Opsi bagi Indonesia

©Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45)

Cetakan Pertama, Juli 2023

E-ISBN: 978-623-88526-5-9

Tim Penulis

Indah Lestari

Muhammad Habib Abiyan Dzakwan

Dandy Rafitrandi

Agus Catur Aryanto Putro

Asisten Penulis

Rionanda Dhamma Putra

Jessica Arreta

Bimo Pragilaksono

Penyelaras Akhir

Rinaldy

Desain Sampul dan Tata Letak

Rinaldy

Rudi Yusuf

Untuk mengutip:

Lestari, Indah et. al. 2023. "Kompetisi Arsitektur Konektivitas Global: Posisi dan Opsi bagi Indonesia". LAB 45 Monograf. Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045.

LAB 45 adalah pemegang tunggal hak cipta atas monograf ini. Seluruh isi dokumen ini adalah tanggung jawab LAB 45. Silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi kajian akademik ini untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan.

Laboratorium Indonesia 2045

Jalan Mabas Hankam No. T65

Bambu Apus, Cilangkap

Jakarta Timur

+62811452045

lab45@lab45.id

Kata Pengantar

Konektivitas adalah pembuluh darah bagi perekonomian global. Melalui rantai nilai global, negara-negara mengikatkan diri dalam sebuah hubungan kesalingtergantungan dengan tingkat integrasi yang tinggi. Proses ini memberikan harapan bagi tercapainya stabilitas dan perdamaian dunia. Akan tetapi, dinamika geopolitik kekinian justru mengindikasikan tren sebaliknya. Negara-negara adidaya memprakarsai beragam kerangka kerja konektivitas untuk mempertahankan dan memperkuat posisi mereka dalam percaturan politik internasional. Alhasil, konektivitas menjadi instrumen kompetisi geopolitik dewasa ini.

Berkaca dari perkembangan global kekinian, Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) menerbitkan monograf ini untuk mengulas lima inisiatif konektivitas yang diinisiasi oleh Amerika Serikat, Jepang, Korea, Tiongkok, dan Uni Eropa. Tim penulis menemukan bahwa prakarsa-prakarsa global tersebut menghadirkan peluang dan tantangan yang beragam dengan kecenderungan moderat terhadap Indonesia. Publikasi ini pun mengidentifikasi beragam modalitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk menghadapi risiko-risiko geoekonomi ke depan.

Kami berharap monograf ini dapat memberikan landasan bagi pemerintah Indonesia dalam menyusun kebijakan-kebijakan strategis untuk menghadapi persaingan ekonomi global ke depan. Hanya dengan semangat kolaborasi, akademisi dan praktisi dapat mewujudkan Indonesia menjadi negara berdaulat, maju dan berkelanjutan pada tahun 2045.

Jakarta, 10 Juli 2023

Iis Ginarsah

Kepala LAB 45

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Singkatan dan Akronim	iii
Daftar Bagan	vii
Daftar Tabel	x
Ringkasan Eksekutif	1
Pendahuluan	3
Arsitektur Konektivitas dan Rantai Nilai Global	5
Faktor Eksternal dalam GVC	6
Faktor Internal dalam GVC	10
Posisi Indonesia dalam GVC dan Inisiatif Konektivitas Global	13
Partisipasi Indonesia dalam Global Value Chain	13
Tinjauan Resiliensi Ekspor dan Impor Indonesia: Pendekatan Produk	17
Peranan Indonesia dalam Inisiatif-Inisiatif Konektivitas Global	24
Prakarsa Konektivitas ASEAN dan Negara-Negara Ekstraregional	27
Inisiatif Konektivitas ASEAN	27
ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dan Respons Negara Mitra	29
Inisiatif Konektivitas Mitra Eksternal	31
Identifikasi Peluang dari Berbagai Inisiatif Eksternal	33
Identifikasi Risiko dari Berbagai Inisiatif Eksternal	39
Modal Indonesia dalam Menghadapi Kompetisi Global	52
Faktor Pengungkit	52
Faktor Penghambat	62
Refleksi	72
Rekomendasi Kebijakan	75
Modal Manusia	75
Kualitas Institusional	76
Kebijakan Perdagangan dan Investasi	78
Infrastruktur	79
Penutup	82

Daftar Singkatan dan Akronim

3P	<i>People, Prosperity, and Peace</i>
ADB	Asian Development Bank
ACCC	ASEAN Connectivity Coordinating Committee
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
AOIP	ASEAN Outlook on the Indo-Pacific
APIP	Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
APS	Angka Partisipasi Sekolah
AS	Amerika Serikat
ASN	Aparatur Sipil Negara
ASEAN	Association of Southeast Asia Nations
B2G	<i>Business to Government</i>
BLK	Balai Latihan Kerja
BP	<i>Backward Participation</i>
BPS	Badan Pusat Statistik
BRI	Belt and Road Initiative
BTS	<i>Base Transceiver Station</i>
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CEPA	<i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>
CIDCA	China International Development Cooperation Agency
COVID-19	<i>Corona Virus Disease 2019</i>
CPTPP	Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership
EFSD+	European Fund for Sustainable Development Plus
EU	European Union / Uni Eropa
FDI	<i>Foreign Direct Investment</i>
FP	<i>Forward Participation</i>
FPIIP	Free, Peaceful, and Prosperous Indo-Pacific
FTA	<i>Free Trade Area</i>

G7	Group of Seven
G20	Group of Twenty
G2G	<i>Government to Government</i>
GDI	Global Development Initiative
GDSSCF	<i>Global Development and South-South Cooperation Fund</i>
GRK	Gas Rumah Kaca
GVC	<i>Global Value Chain</i>
HAKI	Hak atas Kekayaan Intelektual
HAM	Hak Asasi Manusia
HHI	<i>Herfindahl-Hirschman Index</i>
HS	<i>Harmonized System</i>
IMF	International Monetary Fund
IMM	Indeks Modal Manusia
IoT	<i>Internet of Things</i>
IPEF	Indo-Pacific Economic Framework
JBIC	Japan Bank for International Cooperation
JETP	Just Energy Transition Partnership
JICA	Japan International Cooperation Agency
KASI	Korea-ASEAN Solidarity Initiative
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
LDKPI	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional
Litbang	Penelitian dan Pembangunan
MPAC	Master Plan of ASEAN Connectivity
MRT	Mode Raya Terpadu
MSP	Minerals Security Partnership
N/A	<i>Not Available</i>
NPFOIP	New Plan for a Free and Open Indo-Pacific
NTB	Nilai Tambah Bruto
NU	Nahdlatul Ulama

ODA	<i>Official Development Assistance</i>
OECD	Organization for Economic Co-Operation and Development
OSS	<i>Online Single Submission</i>
PDB	Produk Domestik Bruto
PGII	Partnership for Global Infrastructure and Investment
PM	Perdana Menteri
PMA	Penanaman Modal Asing
PNS	Pegawai Negeri Sipil
Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia
Polugri	Politik Luar Negeri
PPPK	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PTAs	<i>Preferential Trade Agreements</i>
RCEP	Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement
ROK	Republic of Korea
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RRT	Republik Rakyat Tiongkok
SDA	Sumber Daya Alam
SDGs	Sustainable Development Goals
SDM	Sumber Daya Manusia
SPPT-TI	Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi
STEM	<i>Science, Technology, Engineering and Mathematics</i>
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TKDN	Tingkat Komponen Dalam Negeri
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TPP	Trans-Pacific Partnership
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UN Charter	United Nations Charter

UNIDO	United Nations Industrial Development Organization
UU	Undang-Undang
WTO	World Trade Organization

Daftar Bagan

Bagan 1. Geopolitik I - V	3
Bagan 2. Indeks Tekanan Rantai Pasok Global	7
Bagan 3. Rerata Penundaan dan Penurunan Reliabilitas Pelayaran Global	8
Bagan 4. Forward Participation (kiri) dan Backward Participation (kanan) ASEAN	13
Bagan 5. Partisipasi GVC ASEAN (kiri) dan Tiongkok (kanan)	14
Bagan 6. Partisipasi GVC Uni Eropa (kiri) dan Amerika Serikat (kanan)	15
Bagan 7. Partisipasi GVC Jepang (kiri) dan Korea Selatan (kanan)	16
Bagan 8. Ekspor 20 Komoditas Utama Indonesia	17
Bagan 9. Nilai Ekspor 20 Komoditas Utama Indonesia Berdasarkan Kategori Barang Tahun 2021	18
Bagan 10. Persentase Ekspor Indonesia terhadap Ekspor Dunia	18
Bagan 11. Konsentrasi Negara Tujuan Ekspor	19
Bagan 12. Proporsi Negara Tujuan Ekspor Utama Indonesia	20
Bagan 13. Impor 20 Komoditas Utama Indonesia	21
Bagan 14. Nilai Impor 20 Komoditas Utama Indonesia Berdasarkan Jenis Barang Tahun 2021	21

Bagan 15. Persentase Impor Indonesia terhadap Impor Dunia	22
Bagan 16. Konsentrasi Negara Asal Impor	23
Bagan 17. Proporsi Negara Asal Impor Utama Indonesia	23
Bagan 18. Inisiatif Konektivitas Mitra Eksternal	32
Bagan 19. Faktor Pengungkit	52
Bagan 20. Jumlah Populasi 2015 dan 2020 (kiri) dan Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2050 (kanan)	53
Bagan 21. Estimasi Stabilitas Politik dan Ketiadaan Kekerasan/Terrorisme di Sejumlah Negara ASEAN 2021	55
Bagan 22. Perbaikan Kontribusi Nilai Tambah Bruto Sektor SDA dan Non-SDA Indonesia	56
Bagan 23. Hubungan antara Jarak terhadap Hub dan Nilai Perdagangan Indonesia	57
Bagan 24. Perbandingan Rente SDA Negara Asia Tenggara	58
Bagan 25. Perbandingan Jarak antara Hub dengan Nilai Absolut Perdagangan	58
Bagan 26. Indeks Diplomasi Global	61
Bagan 27. Faktor Penghambat	62
Bagan 28. Indeks Modal Manusia di Indonesia 2015-2021	62

Bagan 29. Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia 2015-2021	63
Bagan 30. Keterampilan TIK di Indonesia	63
Bagan 31. Indeks Modal Manusia 5 Negara Asia Tenggara	64
Bagan 32. Perbandingan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Negara ASEAN Terpilih	66
Bagan 33. Perbandingan Skor Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual	66
Bagan 34. Perbandingan Indeks Persepsi Korupsi 2022	67
Bagan 35. Indeks Keterbukaan Perdagangan/GDP (kiri); Aliran Masuk FDI Negara ASEAN Terpilih/GDP (kanan)	68
Bagan 36. Perbandingan Nilai Infrastruktur (kiri) dan Pelayaran Internasional Indonesia (kanan)	71

Daftar Tabel

Tabel 1. Inisiatif 5 Negara Mitra dan ASEAN untuk Konektivitas di Indo-Pasifik	24
Tabel 2. Cakupan MPAC 2025 dari Dimensi Konektivitas dan Masyarakat ASEAN	28
Tabel 3. Identifikasi Peluang dari Berbagai Inisiatif Eksternal	33
Tabel 4. Risiko Geopolitik dari Berbagai Inisiatif Eksternal	42
Tabel 5. Risiko Ekonomi dari Berbagai Inisiatif Eksternal	46
Tabel 6. Risiko Sosial dan Lingkungan dari Berbagai Inisiatif Eksternal	48
Tabel 7. Risiko Keseluruhan dari Berbagai Inisiatif Eksternal	51
Tabel 8. Ikhtisar Rekomendasi Kebijakan	80

Ringkasan Eksekutif

Dinamika global saat ini diwarnai oleh ketidakpastian akibat persaingan geopolitik. Dewasa ini, negara-negara adidaya saling bersaing menawarkan kerangka kerja konektivitas dengan membangun suatu jaringan rantai nilai untuk kepentingan geopolitik mereka. Meskipun isu ini strategis, perkembangan diskusi dan literatur masih cenderung berporos pada perspektif negara-negara penggagas inisiatif global. Oleh sebab itu, monograf ini berupaya untuk menawarkan cara pandang baru dari negara non-penggagas dalam menghadapi beragam prakarsa konektivitas.

Tim penulis terlebih dahulu mengulas perkembangan diskursus seputar konektivitas global dengan secara khusus menggunakan pendekatan rantai nilai global (*Global Value Chain, GVC*). Berdasarkan tinjauan terhadap faktor-faktor eksternal dan internal, monograf ini mengidentifikasi Indonesia cenderung berada di sisi hulu dengan tingkat *forward participation* (FP) yang tinggi. Ketidakseimbangan dalam postur ekonomi dan perdagangan berpotensi mengancam ketahanan Indonesia ke depannya. Di antara 20 komoditas ekspor utama dan 20 komoditas impor utama, tim penulis menemukan bahwa mitra dagang Indonesia masih cenderung cukup terkonsentrasi, yaitu pada Tiongkok. Dengan mempertimbangkan potensi ancaman terhadap ketahanan dan stabilitas Indonesia, Indonesia berkepentingan untuk menutup kekurangannya di sektor hilir dengan meningkatkan *backward participation* (BP) dan melakukan diversifikasi mitra.

Dalam konteks itu, kerangka kerja konektivitas global yang digagas oleh Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, menghadirkan kesempatan yang dapat dimanfaatkan Indonesia. Tim penulis memilih enam prakarsa konektivitas yang dianggap berpengaruh secara signifikan terhadap Indonesia, yaitu (i) ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP); (ii) A New Plan for Free and Open Indo-Pacific (NPFOP); (iii) Free, Peaceful, and Prosperous Indo-Pacific (FPPIP); (iv) Global Development Initiative (GDI); (v) Global Gateway; dan (vi) Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Monograf ini mengidentifikasi berbagai peluang dan tantangan yang ditawarkan oleh masing-masing inisiatif global tersebut.

Tim penulis tidak bermaksud merekomendasikan agar Indonesia memilih salah satu kerangka kerja konektivitas. Kelima inisiatif global tersebut menghadirkan risiko yang beragam dengan kecenderungan moderat. Sebagai catatan, hanya NPFOP Jepang yang menawarkan peluang maksimal sementara inisiatif konektivitas global lainnya memiliki kekurangan dalam dua atau tiga aspek. Monograf ini pun menemukan bahwa inisiatif konektivitas global itu sendiri bukan sesuatu yang statis, melainkan bergerak dan mengalami perubahan sesuai perkembangan dan dinamika politik global. Sehingga, tidak menutup kemungkinan risiko yang dihadirkan akan semakin meningkat atau menurun seiring dengan interaksi antarnegara adidaya. Di sisi lain, tidak menutup kemungkinan inisiatif-inisiatif konektivitas global selain NPFOP turut menghadirkan peluang-peluang yang maksimal.

Dalam menghadapi peluang dan risiko masing-masing prakarsa konektivitas global, Indonesia perlu melihat faktor-faktor internal sebagai modalitas membentuk strategi yang sesuai. Monograf ini membaginya ke dalam faktor penguangkit dan faktor penghambat. Terdapat empat poin utama yang perlu diperhatikan, yaitu 1) faktor internal untuk meningkatkan partisipasi GVC tidak selalu mendukung pemanfaatan inisiatif konektivitas global; 2) status faktor sebagai penguangkit/penghambat dapat berganti satu sama lain; 3) faktor penguangkit tidak bersifat absolut; dan 4) faktor-faktor lain di luar cakupan monograf ini.

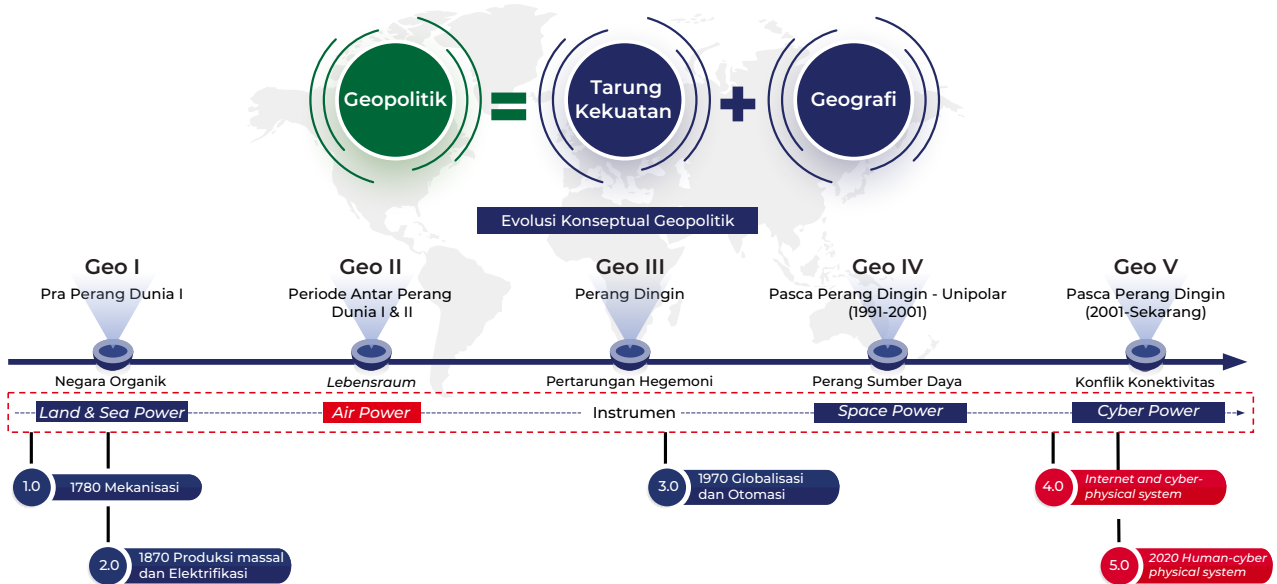
Tim penulis mencatat sepuluh temuan utama. **Pertama**, transfer teknologi merupakan penentu konfigurasi GVC. **Kedua**, inisiatif konektivitas global merupakan konsep yang bergerak dan bisa mengalami perubahan. **Ketiga**, faktor pengungkit dan penghambat merupakan elemen tidak absolut. **Keempat**, faktor pengungkit dapat dibedakan berdasarkan pemanfaatannya untuk meningkatkan partisipasi GVC dan/atau memanfaatkan inisiatif konektivitas. **Kelima**, terdapat elemen relativitas dalam faktor pengungkit, yakni relatif kesamaan antarnegara dan relativitas waktu. **Keenam**, peningkatan GVC dalam jangka panjang harus meningkatkan ketahanan strategis suatu negara. **Ketujuh**, monograf ini hanya menghadirkan titik awal diskusi dan sebagai bahan pertimbangan kebijakan Indonesia terkait inisiatif konektivitas global. **Kedelapan**, Indonesia perlu memanfaatkan posisinya di ASEAN. **Kesembilan**, terdapat tren pelepasan (*decoupling*) sebagai tantangan dalam GVC dan geopolitik. **Kesepuluh**, posisi Indonesia dalam GVC masih lemah dan belum berhasil menjadi *hub* atau *spoke* dalam GVC.

Monograf ini memuat sejumlah saran kebijakan dengan mengambil skenario terburuk yang bertumpu pada empat faktor penghambat bagi Indonesia, yaitu terkait modal sumber daya manusia; kualitas institusional; kebijakan perdagangan dan investasi; serta pembangunan infrastruktur. Tim penulis menyajikan rekomendasi-rekomendasi tersebut untuk dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Pendahuluan

Dunia saat ini diwarnai oleh ketidakpastian akibat persaingan geopolitik seperti konflik Rusia-Ukraina, perang dagang Amerika Serikat (AS)-Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan kontestasi antarnegara kuat lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, persaingan yang berkembang antarnegara kuat berbentuk inisiatif konektivitas global. Persaingan inisiatif konektivitas global ini dimaksudkan untuk membangun suatu jaringan rantai nilai demi mempertahankan dan memperkuat posisi negara kuat di tingkat global. Meminjam terminologi yang dicetuskan oleh Widjajanto, kondisi persaingan sebagaimana di atas menunjukkan karakteristik khas dari Era Geo V. Era ini berbeda dengan pola persaingan sebelumnya yang cenderung diwarnai oleh konflik wilayah, ideologi, akses sumber daya alam. Pada Era Geo V didominasi oleh kompetisi berbasis konektivitas untuk meningkatkan ketahanan konstelasi rantai pasok global, pasar energi, serta pergerakan arus modal.¹

Bagan 1. Geopolitik I - V²



Monograf berpandangan bahwa isu konektivitas sangat strategis dan penting untuk dipahami oleh semua negara karena akan memengaruhi permainan geopolitik di masa depan. Namun demikian, monograf menemukan bahwa badan literatur yang tersedia saat ini masih memiliki celah karena kecenderungan berporos pada perspektif negara penggagas konektivitas. Sementara itu, perspektif negara non-penggagas belum diulas secara signifikan walaupun akan menghadapi medan Geo V yang sama. Monograf ini dimaksudkan untuk berupaya menutup sebagian celah literatur dengan menghadirkan kerangka analisis dan penyusunan strategi bagi negara non-penggagas dalam menghadapi inisiatif konektivitas global.

Dalam menyusun kerangka dimaksud, monograf meminjam perspektif Indonesia sebagai salah satu negara non-penggagas. Untuk menghadirkan perspektif Indonesia dimaksud, monograf mbingkainya dengan pertanyaan pemandu **“Bagaimana Indonesia dapat menanggapi inisiatif konektivitas global?”**

¹ Andi Widjajanto et al., *Indonesia X Geo V* (Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2023), 13.

² *Ibid.*, 1.

Dalam proses menjawab pertanyaan di atas, monograf akan dibagi menjadi beberapa bagian tahapan. Pertama, monograf mengeksplorasi perkembangan diskusi konektivitas dengan penekanan pada rantai nilai global (*Global Value Chain / GVC*) untuk menghadirkan kerangka konsep-konsep dasar yang akan digunakan dalam pembahasan selanjutnya. Kedua, monograf mengidentifikasi posisi Indonesia dalam konteks GVC untuk menghadirkan titik awal dalam formulasi strategi. Ketiga, monograf mengulas perkembangan inisiatif konektivitas dan melakukan identifikasi peluang dan risiko yang ditawarkan dari masing-masing inisiatif konektivitas global. Keempat, monograf menilai faktor-faktor penguangkit dan penghambat dari modalitas yang dimiliki Indonesia. Kelima, monograf akan menarik butir-butir refleksi berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya. Keenam, monograf mengusulkan rekomendasi kebijakan jangka pendek, menengah dan panjang untuk memitigasi faktor penghambat sebagai skenario terburuk Indonesia.

Arsitektur Konektivitas dan Rantai Nilai Global

Bagian ini akan mengulas perkembangan literatur terkait konektivitas yang selanjutnya akan menjadi rujukan dalam pembahasan bagian selanjutnya. Konsep konektivitas yang akan diusung dalam monograf ini secara spesifik menggunakan konteks ilmu hubungan internasional. Monograf meminjam definisi konektivitas yang dikeluarkan oleh berbagai Organisasi Internasional seperti Bank Dunia (*World Bank*), Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*, WTO) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ketiga Organisasi Internasional di atas menggambarkan keterkaitan erat konsep konektivitas dengan aktivitas ekonomi dan perdagangan antarnegara. Meskipun demikian, faktor-faktor pendukung lainnya seperti keterhubungan transportasi manusia³ dan logistik barang⁴ juga sering dikaitkan dengan konektivitas. Keterhubungan ini tidak terbatas di ruang fisik tetapi juga dalam ruang siber atau digital.⁵ Oleh karena itu faktor infrastruktur keras maupun lunak juga sering dikaitkan dengan konsep konektivitas.⁶

Menyadari bahwa konsep konektivitas memiliki pemaknaan yang luas, maka monograf mengusung definisi konektivitas yang cenderung inklusif yakni segala sesuatu terkait hubungan dan perdagangan antarnegara. Pemilihan ini semakin diperkuat dengan keterbatasan ketersediaan data di mana tidak semua negara membahas isu konektivitas secara eksplisit pada dokumen resmi mereka. Oleh sebab itu, monograf berpendapat dengan konsep konektivitas yang inklusif dapat memberikan fleksibilitas dalam menyarikan unsur konektivitas yang terkandung secara implisit dalam dokumen kebijakan suatu negara.

Mengacu kembali pada penjelasan karakteristik khas Era Geo V, kompetisi inisiatif konektivitas dapat dilihat bertumpu pada pengaturan konstelasi rantai pasok global, pasar energi, serta pergerakan arus modal. Dalam ilmu ekonomi, khususnya perdagangan internasional, ketiga aspek tersebut terkandung dalam konsep GVC. Oleh karena itu, untuk memahami lebih dalam tentang jaringan negara yang berusaha dibangun dalam inisiatif konektivitas, monograf ini akan menggunakan konsep GVC.

Dalam konteks GVC, suatu rantai produksi barang dari barang mentah hingga konsumen ditunjukkan secara lebih detail berdasarkan tahapan pada rangkaian aktivitas penambahan nilai produk tersebut. Aktivitas ini termasuk aktivitas pendukung pra-produksi seperti penelitian dan pengembangan (Litbang) dan pasca-produksi seperti penjualan dan pemasaran.⁷ Melalui perincian tahapan tersebut, GVC dapat menunjukkan nilai tambah yang dikontribusikan setiap aktivitas terhadap perekonomian suatu negara dengan lebih baik. Tujuannya adalah membantu mengukur daya saing suatu negara dalam pasar global.

³ Jean-Francois Arvis dan Ben Shepherd, *The Air Connectivity Index: Measuring Integration in the Global Air Transport Network* (Washington D.C.: World Bank, 2011), 3.

⁴ "WTO Trade Connectivity Heatmap," WTO, diakses pada 10 Maret, 2023, https://stats.wto.org/dashboard/tradeconnectivity_en.html.

⁵ Michael Mingos, *Connectivity in Least Developed Countries: Status Report in 2021* (Geneva: ITU Publications, 2021), 17.

⁶ K. Creutz, "Multilateral Development Banks as Agents of Connectivity: the Asian Development Bank (ADB) and the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)," *East Asia*, (2023): 11.

⁷ Armando Rungi dan Davide Del Prete, "The Smile Curve at the Firm Level: Where Value is Added Along Supply Chains," *Economics Letters* 164, (2018): 39.

Meskipun demikian, aktivitas penambahan nilai di atas tidak merata. Terdapat aktivitas tertentu yang menambahkan nilai lebih besar dibandingkan aktivitas lainnya. Untuk itu, dalam pendekatan GVC penting untuk melihat posisi suatu negara dalam GVC melalui kecenderungannya berada di sisi hulu atau hilir. Dalam menentukan posisi ini, pendekatan GVC menawarkan dua indikator, yaitu *backward participation* (BP) dan *forward participation* (FP). BP merupakan persentase penambahan nilai oleh negara asing dalam ekspor suatu negara, sementara FP merupakan persentase penambahan nilai domestik yang terkandung dari ekspor barang setengah jadi atau mentah yang kemudian akan diekspor kembali oleh negara ketiga terhadap ekspor bruto.⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu negara cenderung berada di sisi hulu ketika BP kecil dan FP besar dan cenderung berada di sisi hilir ketika BP besar dan FP kecil.

Pendekatan GVC kemudian menawarkan faktor-faktor yang memengaruhi posisi dan daya saing negara dalam GVC antara lain terdiri dari kedekatan geografis, perbatasan bersama, kesamaan bahasa, hubungan kolonial, kebijakan *preferential trade agreements* (PTAs), kestabilan nilai tukar, kesamaan mata uang, penegakkan hukum, kemudahan berusaha, kualitas infrastruktur, dan upah tenaga kerja.⁹ Meskipun demikian, faktor-faktor tersebut tidak dengan sendirinya menentukan posisi suatu negara dalam GVC secara absolut. Negara dapat secara dinamis meningkatkan daya saing dan posisinya dalam GVC dengan mengungkit faktor-faktor dimaksud. Pembahasan diskusi atas faktor-faktor di atas, dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor Eksternal dalam GVC

Faktor eksternal dalam monograf ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu faktor geopolitik, faktor ekonomi dan faktor lingkungan hidup dan sosial.

Diskusi mengenai kompetisi inisiatif konektivitas global umumnya diwarnai oleh **faktor geopolitik**. Tren GVC terkini menunjukkan adanya kecenderungan pengaturan kembali struktur GVC yang ada di dunia menjadi *multi-local value chain* demi memperkuat ketahanan GVC. Konsep *multi-local value chain* dapat dijelaskan secara sederhana sebagai fragmentasi dari satu GVC tunggal menjadi beberapa GVC ganda yang terpisah secara kawasan. Tujuannya adalah agar GVC di masing-masing kawasan dapat berfokus pada pemenuhan permintaan dalam kawasannya secara efisien dan menghadirkan kapasitas pemenuhan permintaan cadangan bagi kawasan lain ketika terjadi disrupsi. Melalui pola tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketahanan keseluruhan GVC di dunia.¹⁰ Upaya fragmentasi dan pengaturan kembali ini terkandung dalam dua kata kunci yang berkembang saat ini, yaitu pelepasan (*decoupling*) dan *reshoring*.

Kebijakan pelepasan adalah kebijakan melepaskan ketergantungan berlebih antara satu negara dengan negara lainnya. Kebijakan ini secara signifikan dapat dilihat mewarnai interaksi antara dua kekuatan ekonomi dunia saat ini, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok. Kebijakan pelepasan Tiongkok terlihat secara jelas dalam strategi *Made in China 2025* yang bertujuan mewujudkan swasembada teknologi Tiongkok.¹¹

⁸ Anna Ignatenko et al., *Global Value Chains: What are the Benefits and Why do Countries Participate?* (Washington D.C.: IMF, 2019), 10.

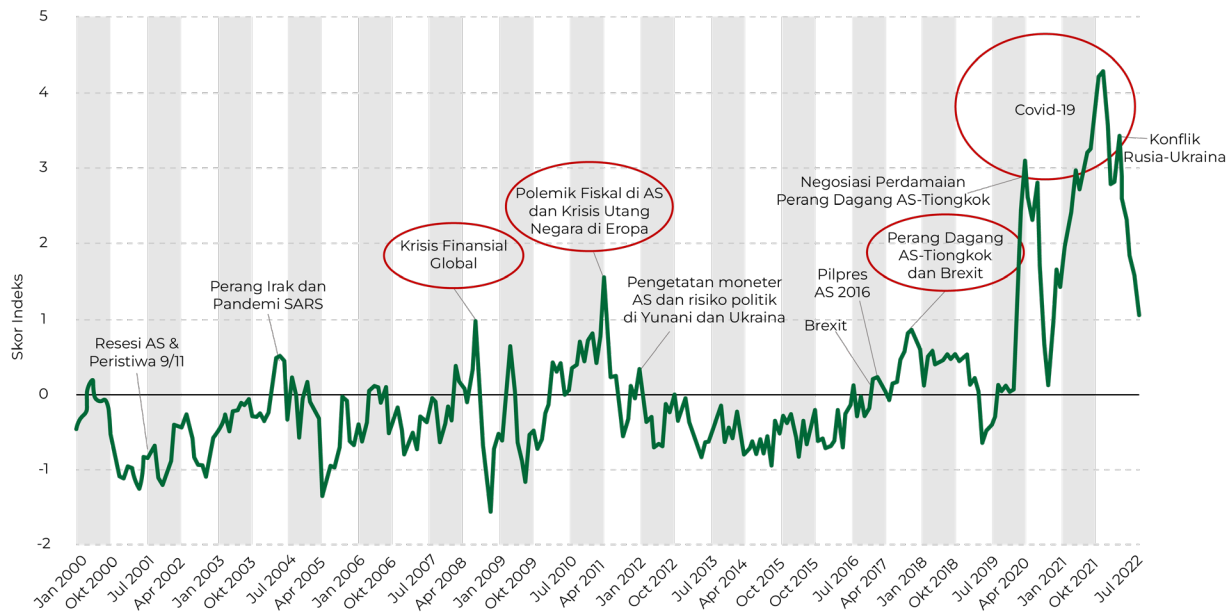
⁹ *Ibid.*, 15–20.

¹⁰ Francisco Betti et al., *A Global Rewiring: Redefining Global Value Chains for the Future*, (Geneva: World Economic Forum, 2023), 10.

¹¹ *Ibid.*

Sebagai pendamping, kebijakan pelepasan ini diiringi oleh kebijakan relokasi industri bagian-bagian GVC tertentu ke negara mitra lainnya. Secara umum kebijakan relokasi industri dapat dibagi menjadi tiga tipe, yaitu mengembalikan industri dari negara mitra ke domestik (*reshoring*); relokasi industri ke negara mitra tetangga (*nearshoring*); dan relokasi industri ke negara mitra yang bersahabat (*friendshoring*).¹²

Bagan 2. Indeks Tekanan Rantai Pasok Global¹³



Dalam implementasi kebijakan geopolitik pelepasan dan *reshoring* diperlihatkan kemampuan negara untuk memaksa perusahaan yang terlibat dalam GVC mempertimbangkan kembali jaringan sumber pasokan bahan baku, lokasi pabrik, dan markas operasinya.¹⁴ Di sisi lain, terdapat pandangan berbeda bahwa kekuatan pasar secara independen dapat memengaruhi pengambilan keputusan geopolitik sebagaimana di atas.¹⁵ Dengan demikian monograf mencatat adanya hubungan erat dan timbal balik antara faktor geopolitik dan ekonomi. Hubungan erat tersebut dicerminkan dalam penilaian Indeks Tekanan Rantai Pasok Global pada Bagan 2. Dapat dilihat bahwa indeks mengalami peningkatan seiring dengan gejolak yang berlangsung pada tataran global, mulai dari kejadian krisis finansial global 2008-2009, kejadian luar biasa Covid-19 tahun 2020, hingga konflik Rusia-Ukraina pada tahun 2022.

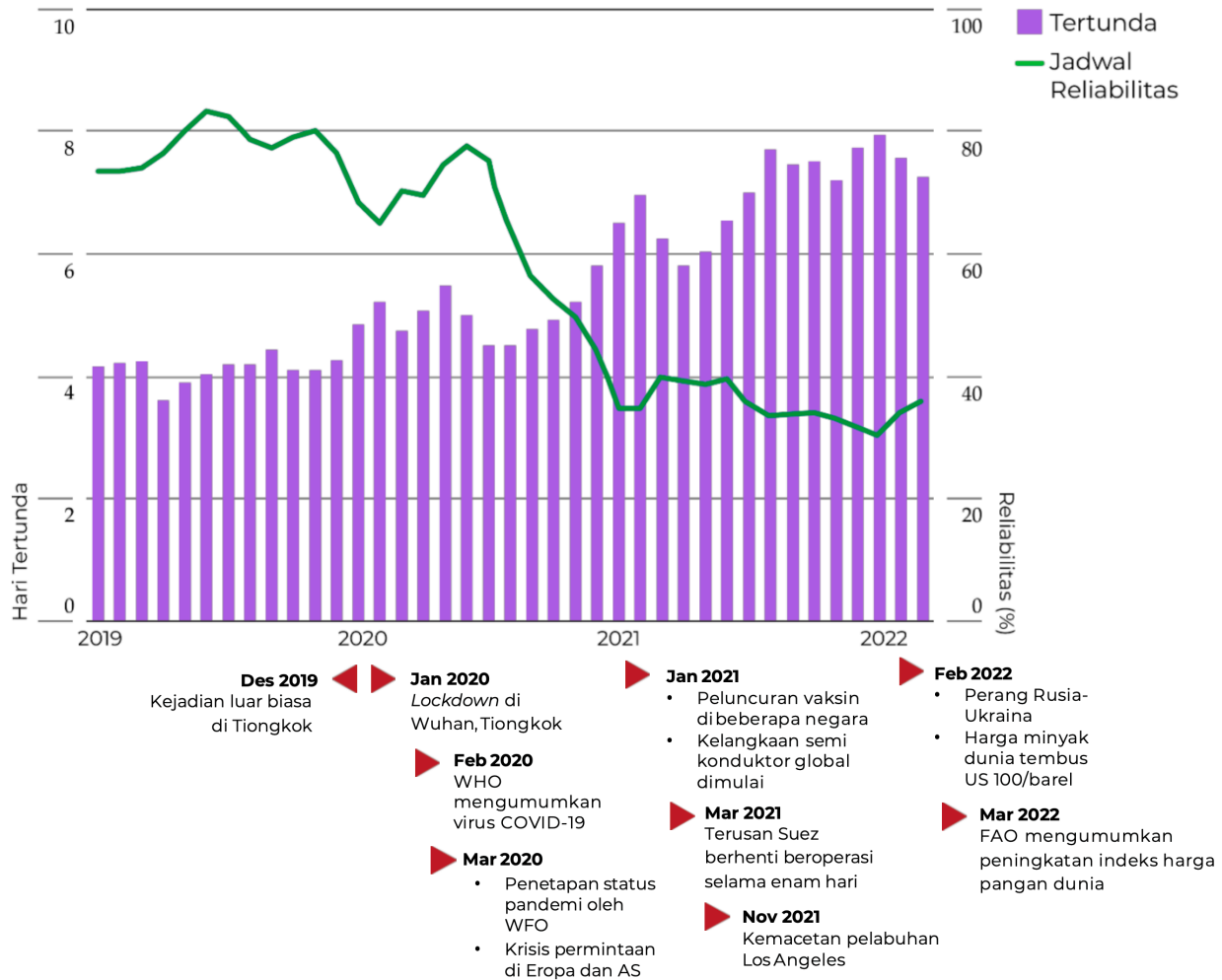
¹² *Ibid.*

¹³ Diolah dari Statista Research Department, "Global Supply Chain Pressure Index from January 2000 to September 2022," *Statista*, diakses pada 10 April, 2023, <https://www.statista.com/statistics/1315308/global-supply-chain-pressure-index/>.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Colin Flint dan Cuiping Zhu, "The Geopolitics of Connectivity, Cooperation, and Hegemonic Competition: The Belt and Road Initiative," *Geoforum* 99, no.1 (2019): 3-6.

Bagan 3. Rerata Penundaan dan Penurunan Reliabilitas Pelayaran Global¹⁶



Untuk membahas **faktor ekonomi** dalam GVC, monograf lebih menekankan pada aspek ketahanan operasional perdagangan GVC dan pergerakan arus modal. Dalam melihat arus permodalan, badan literatur telah menghadirkan beberapa studi mengenai dampak *Official Development Assistance* (ODA) dan *Foreign Direct Investment* (FDI) kepada negara penerima modal. Di satu sisi, terdapat argumen bahwa pendanaan luar negeri tersebut memberikan dampak positif dalam meningkatkan produktivitas investasi swasta dengan membiayai faktor-faktor produksi yang saling melengkapi, seperti infrastruktur dan modal manusia.¹⁷ Di sisi lain, bantuan dapat memiliki dampak negatif mendorong upaya *rent-seeking*.¹⁸ Dunning¹⁹ menyoroti interaksi antara faktor kepemilikan, lokasi, dan internalisasi dalam mendorong keputusan dalam melakukan FDI. Sebagai catatan, negara berkembang seperti Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap investasi dan pendanaan luar negeri baik yang bersifat hibah hingga utang luar negeri.

¹⁶ Widjanto et al., *Geo V*, 22.

¹⁷ Selaya Pablo dan Eva Rytter Sunesen, "Does Foreigns Aid Increase Foreign Direct Investment?," *World Development* 40, (2012): 2166.

¹⁸ George Economides, Sarantis Kalyvitis dan Apostolis Philippopoulos, "Do Foreign Aid Transfers Distort Incentives and Hurt Growth? Theory and Evidence from 75 Aid-Recipient Countries" *Public Choice* 134, (2008): 469.

¹⁹ John Dunning, dan Sarianna M. Lundan, *Multinational Enterprises and The Global Economy*, 2nd ed. (Cheltenham: Edward Elgar, 2008), 17.

Selanjutnya faktor ekonomi yang perlu diperhatikan adalah kegiatan operasional perdagangan itu sendiri. Perhatian terhadap operasi perdagangan dalam GVC semakin meningkat terutama pada beberapa tahun terakhir dengan adanya kejadian-kejadian disrupsi perdagangan. Kejadian-kejadian tersebut mengingatkan kembali kerentanan yang dimiliki GVC saat ini sebagaimana ditunjukkan dengan peningkatan penundaan dan penurunan reliabilitas jadwal pelayaran pada Bagan 3. Sebagai langkah mitigasi terhadap disrupsi perdagangan, maka dibutuhkan mekanisme rute atau pengaturan GVC alternatif. Di saat bersamaan, upaya untuk menjaga dan meningkatkan kapasitas dan kualitas operasi perdagangan dalam kondisi normal juga menjadi penting demi meningkatkan reliabilitas transportasi logistik GVC.

Faktor terakhir, yakni **faktor lingkungan**, juga tidak kalah pentingnya dalam menghadirkan situasi yang kondusif bagi terjadinya faktor geopolitik dan faktor ekonomi di atas. Monograf ini membagi faktor lingkungan menjadi 2 macam yakni lingkungan sosial dan lingkungan alam.

Mengambil pelajaran dari diskursus bantuan luar negeri, monograf ini melihat bahwa dukungan masyarakat baik dari negara pemberi bantuan (donor) dan penerima bantuan (resipien) penting untuk dipertimbangkan dalam melihat keberlanjutan dari suatu kebijakan pendanaan luar negeri. Kebijakan inisiatif konektivitas yang berkembang saat ini umumnya mencakup komponen pendanaan luar negeri sehingga menghadapi pengaruh lingkungan sosial yang sama.

Dari sisi negara donor, ditemukan bahwa kebijakan pendanaan luar negeri dipengaruhi oleh sentimen masyarakatnya, terutama bagi negara donor yang demokratis.²⁰ Pada kasus inisiatif konektivitas, telah terdapat contoh dalam satu dekade terakhir dengan keluarnya AS dari Trans Pacific Partnership (TPP). Perubahan haluan kebijakan inisiatif konektivitas ini menunjukkan pengaruh dari dukungan masyarakat di negara donor maupun calon negara donor. Kondisi di atas turut menggambarkan adanya keterkaitan antara faktor sosial politik domestik dari negara penggagas terhadap pengambilan kebijakan geopolitik.

Di sisi lain, sentimen masyarakat negara resipien dan pengaruhnya terhadap pemerintah negara resipien juga perlu dipertimbangkan. Perkembangan diskusi akademik telah membahas kejadian-kejadian di mana suatu negara berkembang menolak bantuan yang diberikan oleh negara donor dengan berbagai alasan antara lain 1) menjaga persepsi bahwa negara tetap stabil dan tidak membutuhkan bantuan²¹; 2) potensi memengaruhi relasi negara resipien dengan negara lainnya²²; dan, 3) bantuan dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan negara resipien.²³

Dalam konteks inisiatif konektivitas, contoh kasus yang sering dibahas adalah Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok. Penolakan, terutama di tingkat akar rumput, berawal dari kehadiran tenaga kerja Tiongkok berketerampilan rendah yang dianggap

²⁰ Pamela Paxton dan Stephen Knack, *Individual and Country-Level Factors Affecting Support for Foreign Aid* (Washington DC: The World Bank, 2008), 187.

²¹ Allison Carnegie dan Lindsay R. Dolan, "The Effects of Rejecting Aid on Recipients' Reputations: Evidence from Natural Disaster Responses," *The Review of International Organizations* 16, (2021): 515.

²² Jennifer Clapp, "The Political Economy of Food Aid in an Era of Agricultural Biotechnology," *The Global Governance* 11, no.4 (2005): 481.

²³ Braj Kumar Nehru, "Foreign Aid from the Viewpoint of the Recipient Countries," *Proceeding of the Academy of Political Science* 27, no.2 (Januari 1962): 56-59.

mengambil lapangan kerja potensial bagi tenaga kerja negara resipien. Oleh sebab itu, aspek lingkungan sosial sebagaimana di atas perlu menjadi salah satu bahasan khusus dalam memperhitungkan strategi negara non-penggagas dalam melibatkan diri pada inisiatif konektivitas.

Untuk lingkungan alam, monograf ini meminjam kelompok bencana alam dalam literatur antara lain geofisis (contohnya gempa bumi dan letusan gunung berapi), meteorologis (contohnya suhu ekstrem dan badai), hidrologis (contohnya banjir dan longsor), dan klimatologis (contohnya bencana kekeringan dan kebakaran hutan). Bencana alam ini dapat memengaruhi faktor ekonomi global seperti disrupsi terhadap aktivitas perdagangan; menimbulkan korban jiwa, kerugian materiel, dan sebagainya; serta meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa yang merupakan kebutuhan dasar/primer dan menurunkan permintaan terhadap barang dan jasa lainnya.²⁴

Dari bencana-bencana yang disebutkan di atas, beberapa bencana seperti meteorologis, hidrologis dan klimatologis dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan dan perekonomian manusia yang menyebabkan perubahan iklim. Untuk itu, literatur menunjukkan adanya tren perubahan GVC menuju produksi lebih berkelanjutan melalui inovasi. Perubahan tersebut disebabkan oleh kesadaran bersama oleh pemerintah, investor, dan konsumen akhir semakin mendorong regulasi yang kuat untuk dekarbonisasi GVC dalam rangka mengurangi frekuensi kejadian cuaca ekstrem yang semakin meningkat akibat perubahan iklim. Menghadapi tren ini, perusahaan-perusahaan juga berinisiatif tidak hanya patuh terhadap persyaratan regulasi tetapi juga berinovasi dalam konteks keberlanjutan GVC dari hulu hingga hilir.²⁵

Faktor-faktor eksternal sebagaimana di atas menghadirkan kesempatan dan tantangan/risiko yang dihadirkan melalui inisiatif konektivitas. Meskipun demikian, kesempatan dan risiko tersebut tidak berdampak secara seragam bagi negara-negara non-penggagas melainkan bervariasi secara dependen pada modalitas yang dimiliki negara non-penggagas.

Faktor Internal dalam GVC

Modalitas yang dimiliki negara non-penggagas dapat dilihat dalam delapan faktor internal, yaitu 1) sumber daya alam dan geografi; 2) sumber daya manusia dan diaspora; 3) besaran pasar (*market size*) dan kapasitas industri domestik; 4) kebijakan perdagangan dan FDI; 5) kualitas institusional; 6) Infrastruktur; 7) stabilitas politik domestik; dan 8) modal diplomasi.

Faktor internal pertama, **sumber daya alam (SDA) dan geografi** ditentukan secara alamiah sejak suatu negara diakui kedaulatannya atas wilayah geografis tertentu. Oleh karenanya, kedua faktor menjadi relatif sulit untuk diubah tanpa melalui konflik teritorial. Dalam GVC sendiri, SDA dan geografi dapat menentukan kecenderungan posisi suatu negara. Negara cenderung berada di sisi hulu dengan FP besar jika memiliki SDA melimpah²⁶ atau jika berlokasi geografis relatif jauh dari sentra manufaktur di

²⁴ Etel Solingen et al., "On COVID-19, Global Supply Chains, and Geopolitics" dalam *Geopolitics, Supply Chains, and International Relations in East Asia*, ed. Etel Solingen (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 143-148.

²⁵ Betti et al., *A Global Rewiring*, 13.

²⁶ Nuno Fernandes et al., *Economic Effects of Coronavirus Outbreak (COVID-19) on the World Economy* (Spain: IESE Business School, 2020), 6.

Eropa, Amerika Utara dan Asia.²⁷ Untuk menjadi sentra manufaktur baru, maka negara perlu mempertimbangkan jarak dan biaya perdagangan. Negara yang memiliki lokasi geografis relatif pusat dapat mengambil keuntungan dari GVC dengan model laba-laba sebagai sentra manufaktur dan berfokus pada industri hilir.

Faktor internal kedua, **sumber daya manusia (SDM)** dan diaspora bersifat lebih fleksibel dibandingkan SDA. Senada dengan faktor internal pertama, kecenderungan posisi relatif suatu negara dalam GVC dapat dilihat melalui beberapa indikator SDM. Negara cenderung berada di sisi hilir jika memiliki SDM berketerampilan rendah dan memiliki pendapatan per kapita rendah. Pendekatan GVC juga menjelaskan posisi suatu negara dapat meningkat ke sisi hilir untuk produksi barang perantara seiring dengan peningkatan keterampilan SDM³¹ dan peningkatan pendapatan per kapita³².

Faktor ketiga, **pasar domestik dan kapasitas industri** dapat menjadi indikator posisi relatif suatu negara dalam GVC. Negara cenderung berada di sisi hilir jika memiliki ukuran pasar domestik yang besar karena kebutuhan barang baku perantara yang dibutuhkan industri relatif dapat dipenuhi secara mandiri. Struktur industri manufaktur terhadap ekonomi nasional juga berpengaruh di mana PDB tinggi cenderung mengindikasikan negara berada di sisi hilir.³³ Meskipun demikian, kecenderungan ini bukan suatu yang mutlak karena kapasitas industri domestik yang besar memperbolehkan suatu negara untuk menyerap sebagian GVC dalam rantai domestik sehingga negara tersebut memiliki industri yang kuat di kedua sisi hulu dan hilir.³⁴

Faktor internal berikutnya, yaitu **kebijakan perdagangan dan Foreign Direct Investment (FDI)** menjadi penting untuk mengungkit ketiga faktor sebelumnya. Kebijakan perdagangan yang menghambat kelancaran perdagangan ekspor dan impor seperti tarif atau kuota dapat mengurangi partisipasi suatu negara dalam GVC secara keseluruhan. Oleh karena itu, penurunan hambatan berpotensi meningkatkan partisipasi negara dalam GVC. Sementara itu, FDI juga dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas modal, teknologi, dan pendidikan yang memfasilitasi integrasi suatu negara dalam GVC.³⁵

Sehubungan dengan kebijakan dan peraturan, faktor kelima yaitu kualitas institusi perlu diperhatikan. **Kualitas institusi** dibutuhkan untuk memberikan **kepastian hukum** terhadap kontrak antar perusahaan dalam GVC. Hal ini berpengaruh lebih signifikan pada perdagangan GVC dibandingkan perdagangan tradisional karena mekanisme GVC membutuhkan interaksi antar perusahaan lintas batas negara. Interaksi tersebut

²⁷ P. Kowalski et. al., *International Trade, and Investment by State Enterprises* (Paris: OECD Trade and Policy Papers, 2015), 82.

²⁸ Ignatenko et al., *What are the Benefits*, 20.

²⁹ Fernandes et al., *Economic Effects*, 6–7.

³⁰ Model Ular dan Laba-Laba mengacu kepada Richard Baldwin dan Anthony Venables, *Spiders and Snakes: Offshoring and Agglomeration in the Global Economy* (Cambridge: NBER Working Paper, 2010), 2-3.

³¹ Fernandes et al., *Economic Effects*., 6.

³² Kowalski et. al., *International Trade, and Investment*, 82.

³³ *Ibid.*

³⁴ Fernandes et al., *Economic Effects*., 7.

³⁵ *Ibid.*, 8.

mencakup transfer barang, aliran investasi, maupun transfer non-fisik seperti teknologi, hak kekayaan intelektual, dan kredit. Berdasarkan bukti terkini dalam literatur dinyatakan korelasi positif antara penegakkan hukum dengan integrasi suatu negara pada GVC.³⁶

Faktor keenam adalah infrastruktur yang terdiri atas transportasi dan komunikasi. GVC masih dipengaruhi oleh biaya transportasi. Sentralitas geografi yang dibahas sebelumnya tidak dapat dimanfaatkan maksimal jika negara tidak terikat dengan pusat jaringan transportasi. Dengan demikian, infrastruktur logistik dan komunikasi; efisiensi pelabuhan dan bea cukai; dan jaringan teknologi informasi menjadi penting bagi perdagangan terutama dalam konteks GVC. Untuk memfasilitasi akses terhadap jaringan ini, maka dibutuhkan penggunaan internet dan keseragaman penggunaan bahasa.³⁷

Stabilitas politik menjadi faktor penentu lainnya dari posisi sebuah negara dalam GVC. Negara yang memiliki permasalahan instabilitas politik akan menghadapi tantangan dalam menarik investasi dan membangun hubungan rantai pasok. Sebaliknya, negara dengan kondisi politik yang stabil akan menjadi lokasi/tujuan yang lebih menarik bagi para investor untuk menjalankan kegiatan bisnis.³⁸

Faktor internal terakhir adalah **modal diplomatik** yang memengaruhi persepsi negara lain tentang reliabilitas dan kepercayaan terhadap suatu negara. Negara dengan modal diplomatik yang tinggi akan menjadi mitra yang diperhitungkan dalam kerja sama atau hubungan rantai pasok. Secara lebih jauh, modal diplomatik dapat dimanfaatkan oleh sebuah negara untuk mempromosikan keikutsertaannya dalam GVC melalui proses negosiasi terkait kesepakatan perdagangan ataupun mempromosikan daya saingnya di forum internasional.³⁹

³⁶ *Ibid.*, 9

³⁷ *Ibid.*, 9-10.

³⁸ Richard Baldwin, *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization* (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2016), 149.

³⁹ Paul Dalziel et al., *Wellbeing Economics: The Capability Approach to Prosperity* (Switzerland: Palgrave Macmillan, 2018), 162.

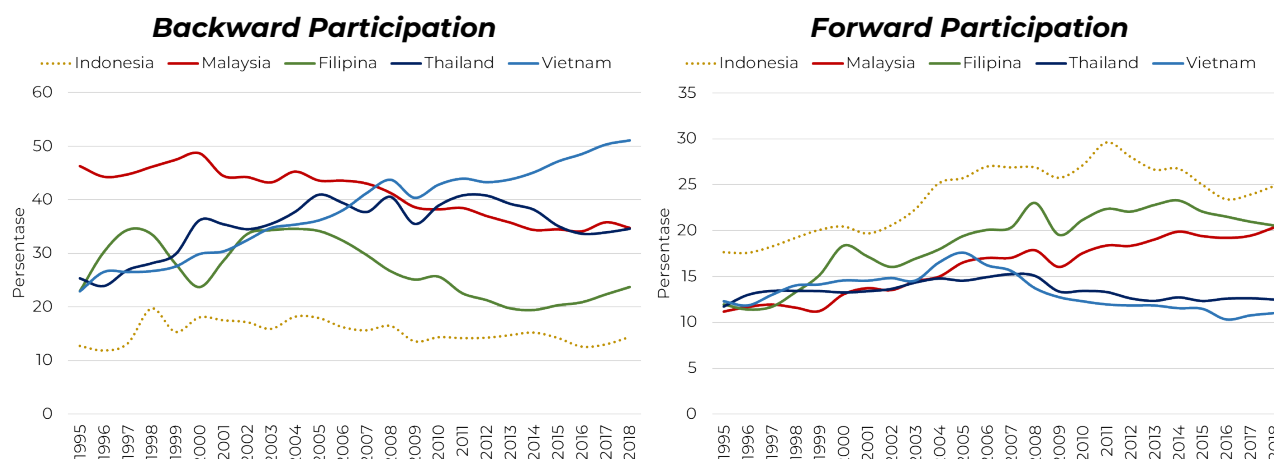
Posisi Indonesia dalam GVC dan Inisiatif Konektivitas Global

Sebagai titik awal posisi Indonesia, maka monograf melakukan asesmen potret kondisi Indonesia dalam GVC dan perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir. Diskusi mencakup penjelasan tingkat partisipasi Indonesia dengan melihat indikator-indikator yang relevan baik dari sisi perbandingan dengan negara-negara di kawasan maupun tingkatan produk di Indonesia. Selain itu, bagian ini juga melihat posisi dan peranan Indonesia dalam inisiatif konektivitas global dan regional yang digagas oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok dan lainnya sebagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi tingkat partisipasi Indonesia dalam GVC.

Partisipasi Indonesia dalam *Global Value Chain*

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, tingkat partisipasi suatu negara dalam GVC dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya adalah *GVC linkage* yang terdiri dari *Forward GVC Participation* dan *Backward GVC Participation*. Menurut Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), *Forward Participation* (FP) merupakan rasio nilai tambah domestik yang dikirim ke perekonomian ketiga terhadap total ekspor bruto perekonomian. Ini mencakup nilai tambah domestik yang terkandung dalam bahan baku yang dikirim ke perekonomian ketiga untuk pengolahan lebih lanjut dan ekspor melalui rantai pasokan. Ini adalah perspektif "Penjual" atau sisi penyediaan dalam partisipasi GVC. Sedangkan, *Backward Participation* (BP) mengacu pada rasio "Kandungan nilai tambah asing dari ekspor" terhadap total ekspor bruto perekonomian. Ini adalah perspektif "Pembeli" atau sisi perolehan dalam GVC, di mana suatu perekonomian mengimpor produk antara untuk menghasilkan eksportnya.

Bagan 4. *Forward Participation* (kiri) dan *Backward Participation* (kanan) ASEAN⁴⁰



Bagan 4 memperlihatkan tren partisipasi GVC Indonesia dari tahun 1995 hingga 2018. Dari sisi FP, Indonesia memiliki tingkat partisipasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Kondisi di atas sehubungan dengan keunggulan komparatif Indonesia dalam produk-produk hasil ekstraksi sumber daya alam membuat banyak negara-negara mengimpor barang mentah dari Indonesia untuk produksi. Sebaliknya, Indonesia cukup tertinggal dari sisi BP dan cenderung stagnan dalam beberapa dekade terakhir. Bagan 4 turut mengindikasikan bahwa Indonesia masih cenderung sedikit mengimpor barang-barang dari negara-negara mitra dagang untuk

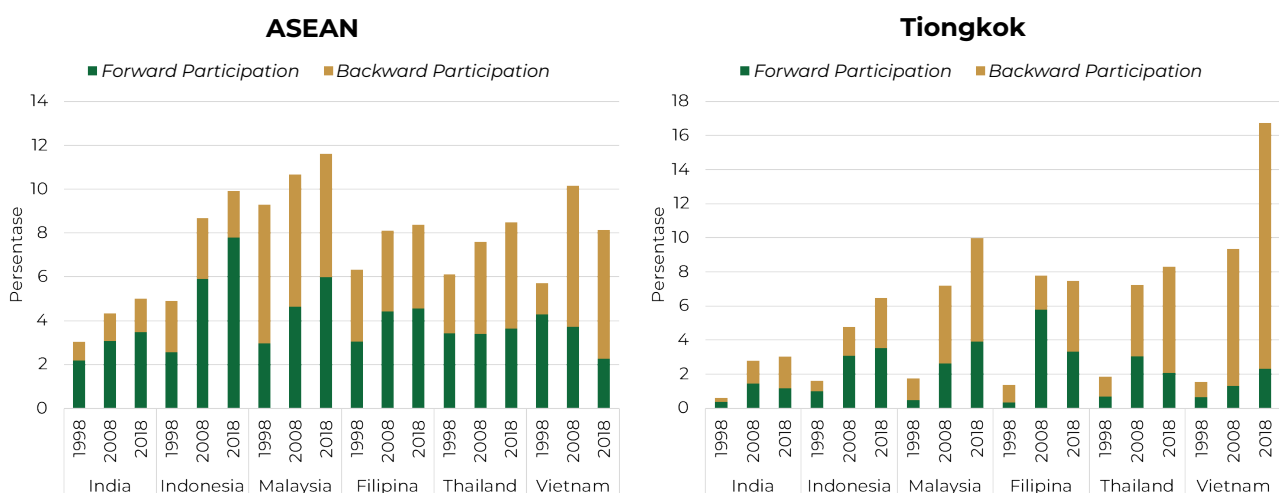
⁴⁰ "Trade in Value Added (TiVA) database", OECD, dirilis pada 2021, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_2021_C1.

kemudian diekspor kembali. Adapun kemudahan impor menjadi aspek penting dalam peningkatan partisipasi Indonesia dalam GVC.

Selanjutnya, partisipasi Indonesia dalam GVC juga dapat dibandingkan berdasarkan negara-negara mitra utama seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan termasuk ASEAN sebagai kawasan ekonomi. Sebagai pembanding, monograf akan memilih lima negara pembanding yang terdiri dari empat negara ASEAN, yaitu Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam, serta satu negara non-ASEAN dan non-penggagas, yaitu India.

Bagan 5 memperlihatkan partisipasi GVC dengan ASEAN sebagai kawasan mitra. Indonesia memiliki FP tertinggi dengan ASEAN dibandingkan lima negara lainnya sebesar 7,8%. Angka ini juga mengalami tren peningkatan dari tahun 1998 hingga tahun 2018. Di sisi lain, Vietnam memiliki BP tertinggi dengan ASEAN tetapi FP Vietnam relatif rendah dengan tren menurun pada kurun waktu yang sama. Ketidakseimbangan FP dan BP ini mengindikasikan Indonesia cenderung berada di sisi hulu untuk GVC dengan ASEAN dan Vietnam berada di sisi hilir.

Bagan 5. Partisipasi GVC ASEAN (kiri) dan Tiongkok (kanan)⁴¹



Keseimbangan FP dan BP yang baik justru diperlihatkan oleh Malaysia yang di saat bersamaan mencapai total partisipasi GVC tertinggi di tahun 2018 dibandingkan lima negara lainnya. Melihat tren pada Bagan 5, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 1998 hingga 2018, partisipasi GVC Indonesia dan lima negara lainnya dengan ASEAN mengalami peningkatan. Berkaca pada kesuksesan Malaysia dan tren yang masih cenderung positif, monograf menyimpulkan dari Bagan 5 bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dapat memperdalam partisipasi GVC di ASEAN.

Hubungan GVC Indonesia dan lima negara pembanding dengan Tiongkok dapat dilihat pada sisi kanan Bagan 5. Sebagai negara mitra utama Indonesia, dapat dilihat bahwa Indonesia bukan menjadi kasus unik di ASEAN. Negara-negara ASEAN lainnya juga mengalami tren peningkatan partisipasi GVC dengan Tiongkok secara signifikan antara tahun 1998 dan 2018. Kondisi di atas menggambarkan semakin pesatnya hubungan dagang antara negara-negara ASEAN dengan Tiongkok yang salah satunya mungkin disebabkan oleh peningkatan *industrial linkage* melalui implementasi ASEAN-China FTA.⁴²

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Yu Sheng, Hsiao Chink Tang dan Xinpeng Xu, "The Impact of the ACFTA on ASEAN-PRC Trade: Estimates Based on an Extended Gravity Model for Component Trade." *Applied Economics* 46, no. 19 (2014): 2251-2263.

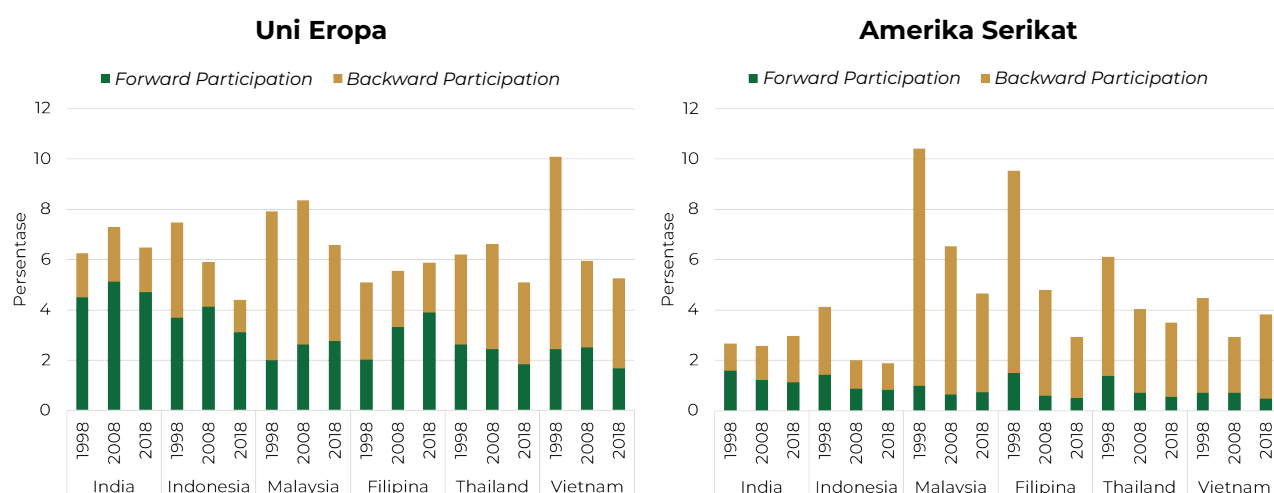
Secara umum, Indonesia mengalami perbaikan yang cukup signifikan baik dalam BP maupun FP terhadap Tiongkok. Meskipun demikian, peningkatan tersebut relatif kecil dibandingkan dengan peningkatan partisipasi GVC antara Vietnam dan Tiongkok. BP Vietnam-Tiongkok di tahun 2018 mencapai 14,4% atau dengan kata lain produk-produk Tiongkok memiliki kontribusi sekitar sepertujuh dari total ekspor bruto Vietnam. Hal ini terlihat dari barang-barang *parts and components* seperti *integrated circuits*, telepon dan baterai yang nilainya hampir mencapai setengah dari total impor Vietnam dari Tiongkok.

Bagan 6 menjelaskan hubungan GVC antara Indonesia dan negara-negara pembandingan dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Tren penurunan terlihat dalam konteks hubungan GVC Indonesia dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat baik dari sisi FP ataupun BP. Tidak adanya perjanjian perdagangan dengan kedua negara mitra ini kemungkinan menjadi penyebab rendahnya hubungan GVC tersebut. Walaupun demikian, secara umum hubungan GVC Indonesia dengan Uni Eropa relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika Serikat.

Sementara itu, Filipina menjadi satu-satunya negara yang mengalami peningkatan FP dengan Uni Eropa. Hal ini mengisyaratkan peningkatan penggunaan produk Filipina oleh negara-negara di Uni Eropa. Sebagai contohnya pada proporsi kelompok barang *parts and components* Filipina khususnya *electrical machinery and electronics* dan *machinery, mechanical appliances, and parts* yang diekspor ke Jerman dan Belanda mencapai 60-70% total nilai ekspor Filipina.

Tidak jauh berbeda dengan Uni Eropa, hubungan GVC antara keenam negara dengan Amerika Serikat mengalami tren penurunan dengan nilai yang jauh lebih besar khususnya Malaysia, Filipina dan Thailand. Indonesia mengalami penurunan signifikan dari tahun 1998 ke 2008 dan berlanjut hingga 2018 walaupun tidak terlalu signifikan. Peningkatan khususnya dari sisi BP dari tahun 2008 ke 2018 dialami oleh India dan Vietnam. Untuk kasus Vietnam, beberapa studi menggarisbawahi dampak positif perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap kinerja perdagangan Vietnam. Perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat mengalihkan pasokan ke Vietnam karena tarif impor barang-barang Tiongkok yang meningkat. Ditambah lagi, Vietnam merupakan salah satu dari sedikit negara yang memiliki perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat di kawasan ASEAN.

Bagan 6. Partisipasi GVC Uni Eropa (kiri) dan Amerika Serikat (kanan)⁴³



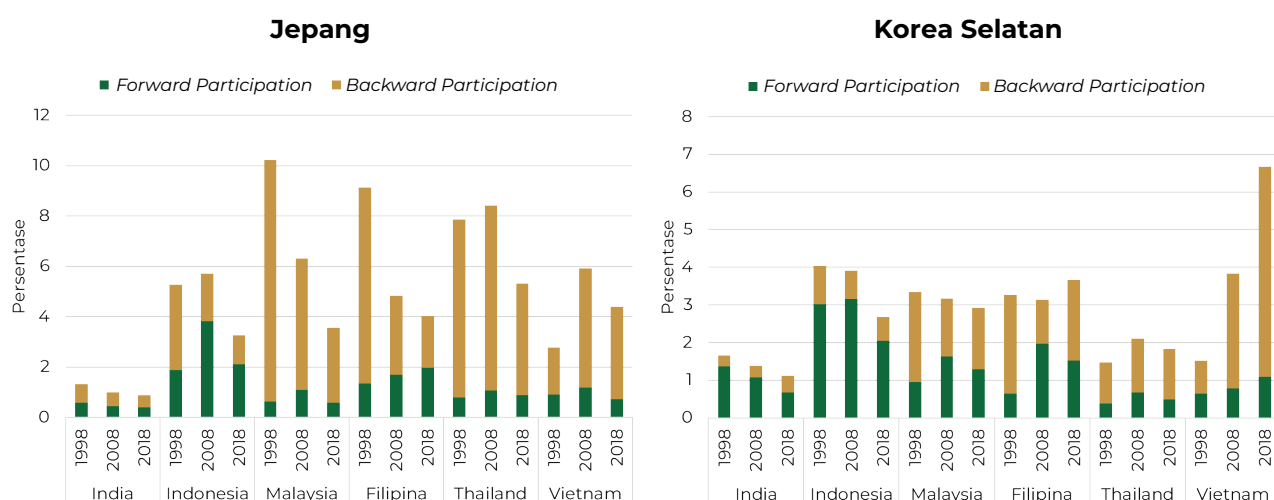
⁴³ "Trade in Value Added (TiVA) database", OECD, dirilis pada 2021, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_2021_C1. (OECD, TiVA Database)

Kelompok negara mitra terakhir adalah Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara memiliki perbedaan historis dalam konteks hubungan perdagangan dan investasi dengan negara-negara pembanding dan Indonesia. Jepang merupakan negara investor pertama dan utama khususnya di Asia dan Asia Tenggara sedangkan Korea Selatan dapat dibilang sebagai investor yang relatif baru. Namun demikian, baik perdagangan maupun investasi Korea Selatan dapat dikatakan cukup dinamis.

Pada tahun 1998, Malaysia menjadi negara dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi dengan Jepang dengan persentase 10% dari total ekspor. Akan tetapi, pasca 1998 tren penurunan hubungan GVC dengan Jepang terlihat pada semua negara. Di tengah kondisi tersebut, Thailand menjadi negara dengan hubungan paling erat dengan Jepang, khususnya pada tahun 2018. Kondisi tersebut sejalan dengan meningkatnya perdagangan dan investasi Jepang di Thailand khususnya di bidang otomotif. Catatan lainnya yang dijumpai yakni, Filipina mengalami peningkatan FP dalam dua puluh tahun terakhir. Terakhir, partisipasi Indonesia dalam GVC dengan Jepang terlihat cukup signifikan pada FP dibandingkan dengan negara-negara lain.

Berbeda dengan Jepang, Vietnam dan Filipina mengalami peningkatan partisipasi GVC dengan Korea Selatan. Dapat dilihat bahwa peningkatan partisipasi yang dialami oleh Vietnam sangat signifikan atau meningkat sekitar tiga kali lipat dari tahun 1998 hingga 2018. Hal ini diakibatkan oleh meningkatnya perdagangan dan investasi dari Korea Selatan di Vietnam khususnya di sektor barang elektronik dan telepon genggam. Sebut saja Samsung yang telah menjadikan Vietnam sebagai *production hub* dalam produk *smartphones* dan sejenisnya. Sejalan dengan meningkatnya ekspor *smartphones* terbukti menempatkan Vietnam menjadi eksportir *smartphones* terbesar kedua setelah Tiongkok. Samsung melakukan investasi besar pertama di Vietnam pada tahun 2008 s.d. 2018 sehingga menjadi perusahaan terbesar di Vietnam dalam segi pendapatan dengan total pekerja sekitar 160.000 orang.⁴⁴ Hampir serupa dengan konteks partisipasi GVC Jepang, Indonesia menjadi negara dengan tingkat partisipasi yang cukup signifikan dibandingkan dengan negara-negara lainnya dalam konteks Korea Selatan.

Bagan 7. Partisipasi GVC Jepang (kiri) dan Korea Selatan (kanan)⁴⁵



⁴⁴ "FDI in Vietnam according to pundits," *Vietnamnet Global*, dirilis pada Oktober 2018, <https://vietnamnet.vn/en/fdi-in-vietnam-according-to-pundits-E210159.html>.

⁴⁵ "Trade in Value Added (TiVA) database", *OECD*, dirilis pada 2021, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_2021_C1. (OECD, TiVA Database)

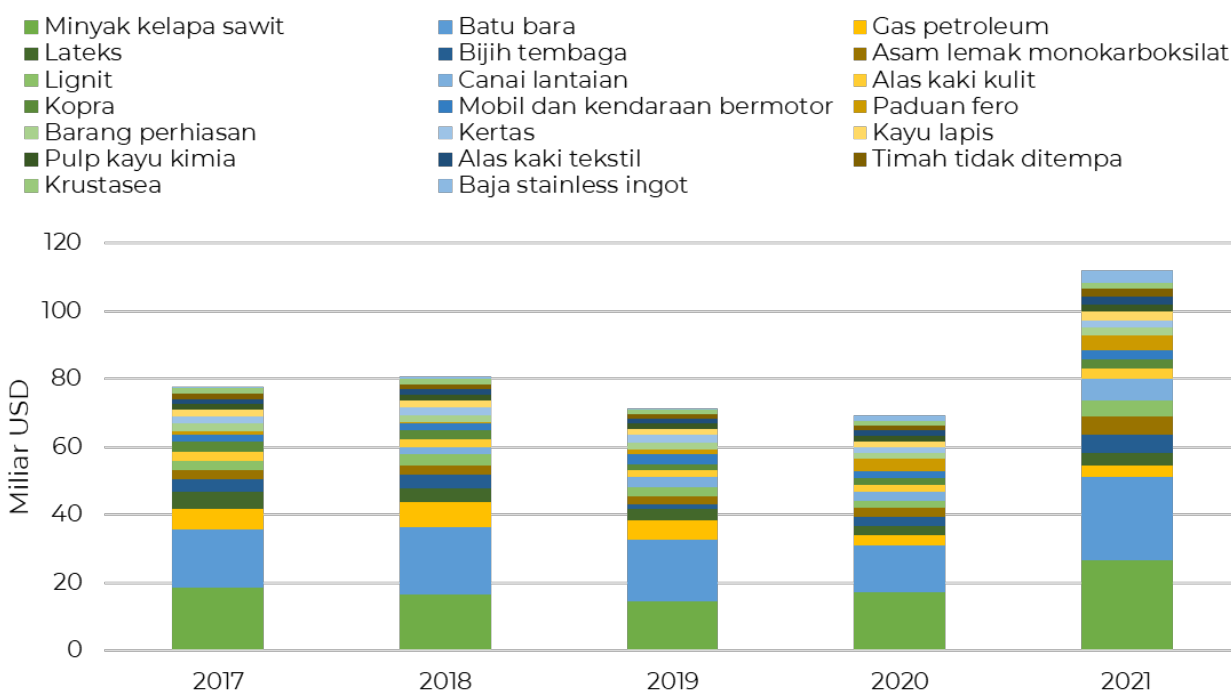
Tinjauan Resiliensi Ekspor dan Impor Indonesia: Pendekatan Produk

Bagian ini akan membahas tentang resiliensi Indonesia dalam GVC dengan mengidentifikasi risiko eksternal yang ditimbulkan oleh kegiatan ekspor dan impor Indonesia terhadap negara asing sebagai bagian dari GVC. Mempertimbangkan kondisi perekonomian yang tidak menentu pasca pandemi COVID-19 dan adanya tensi geopolitik antara negara-negara besar, maka dikhawatirkan akan mengungkit risiko eksternal yang bersifat laten menjadi ancaman nyata. Untuk mengidentifikasi risiko eksternal dimaksud, monograf menggunakan 20 komoditas ekspor dan impor utama Indonesia dalam periode 2017-2021. Pencacahan komoditas ini berdasarkan 4 digit kode HS (*Harmonized System*).

Pada sisi ekspor, Bagan 8 memperlihatkan bahwa minyak kelapa sawit dan batu bara memiliki nilai ekspor yang tinggi dan terlampaui jauh di atas komoditas ekspor lainnya. Kedua komoditas tersebut mendorong kelompok Barang Mentah mencakup 67,43% dari total nilai ekspor 20 komoditas utama Indonesia meskipun hanya terdiri dari 9 komoditas saja. Sementara itu, Barang Setengah Jadi dengan 5 komoditas hanya mencapai 19,33% dan Barang Jadi yang terdiri dari 6 komoditas hanya berhasil menyumbang 13,25%. Kondisi ini menggambarkan posisi Indonesia dalam GVC yang cenderung mengambil peran di sektor hulu.

Karakteristik berikutnya yang perlu diperhatikan adalah dominasi pasar impor global oleh 20 komoditas ekspor Indonesia ini. Pada Bagan 10 dapat dilihat Indonesia memiliki tiga komoditas yang mendominasi dengan posisi melebihi 50% ekspor dunia yakni lignit, baja *stainless ingot*, dan minyak kelapa sawit. Diikuti oleh kopra, asam lemak monokarboksilat, dan timah tidak ditempa yang mencakup lebih dari 25% ekspor dunia. Berdasarkan data, sekali lagi dapat dilihat adanya kecenderungan kekuatan ekspor Indonesia pada komoditas Barang Mentah. Meskipun demikian perlu dicatat bahwa terdapat dua komoditas Barang Setengah Jadi yang cukup didominasi oleh Indonesia yakni baja *stainless ingot* dan asam lemak monokarboksilat.

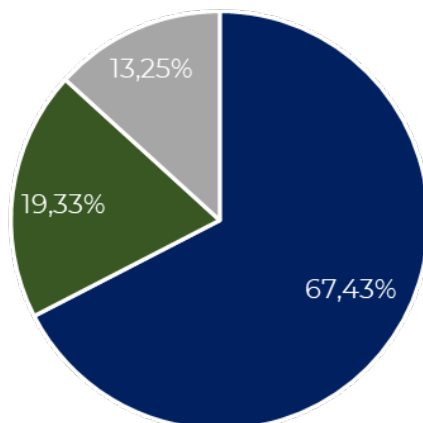
Bagan 8. Ekspor 20 Komoditas Utama Indonesia⁴⁶



⁴⁶ Diolah dari "Trade Map," *International Trade Centre (ITC)*, diakses pada 11 April 2023, www.trademap.org.

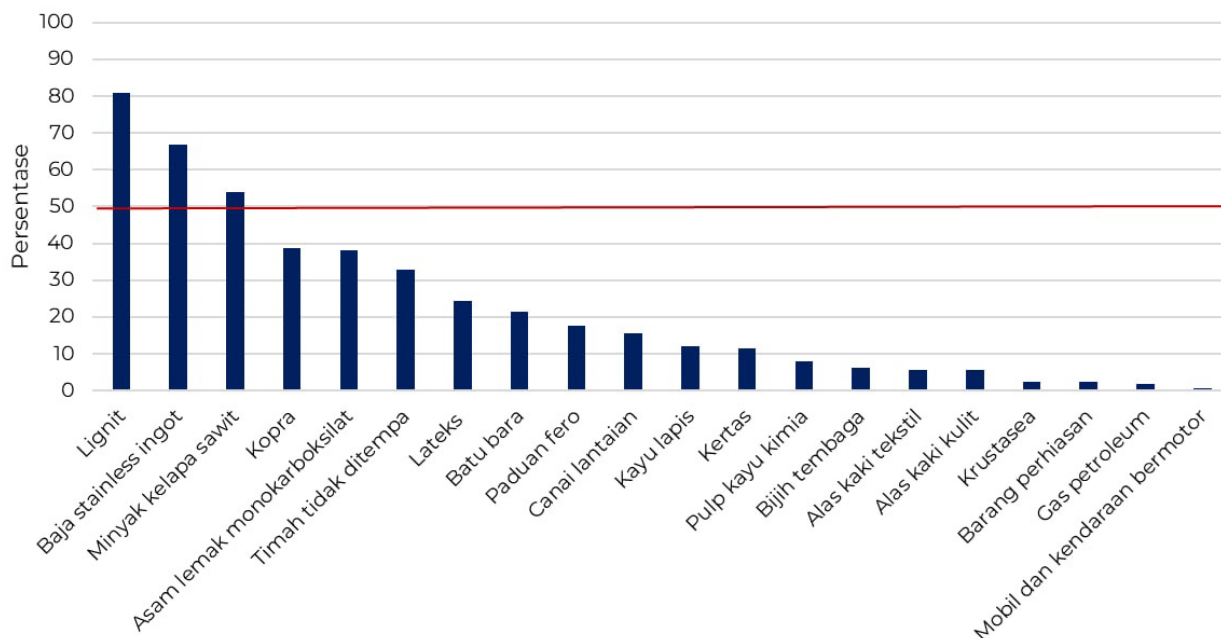
Bagan 9. Nilai Ekspor 20 Komoditas Utama Indonesia Berdasarkan Kategori Barang Tahun 2021⁴⁷

■ Barang Mentah ■ Barang Setengah Jadi ■ Barang Jadi



Komoditas lainnya sekilas tidak terlihat mendominasi pasar, akan tetapi dengan menelusuri peringkat ekspor terbesar dunia ditemukan bahwa 12 dari 20 ekspor utama Indonesia menempati peringkat pertama dan kedua, diikuti oleh empat komoditas yang masih menempatkan Indonesia pada peringkat 10 besar eksportir dunia. Pada 16 komoditas tersebut, mayoritas merupakan barang mentah dan setengah jadi, sehingga kembali menempatkan kecenderungan Indonesia berada pada sisi hulu dalam GVC.

Bagan 10. Persentase Ekspor Indonesia terhadap Ekspor Dunia⁴⁸

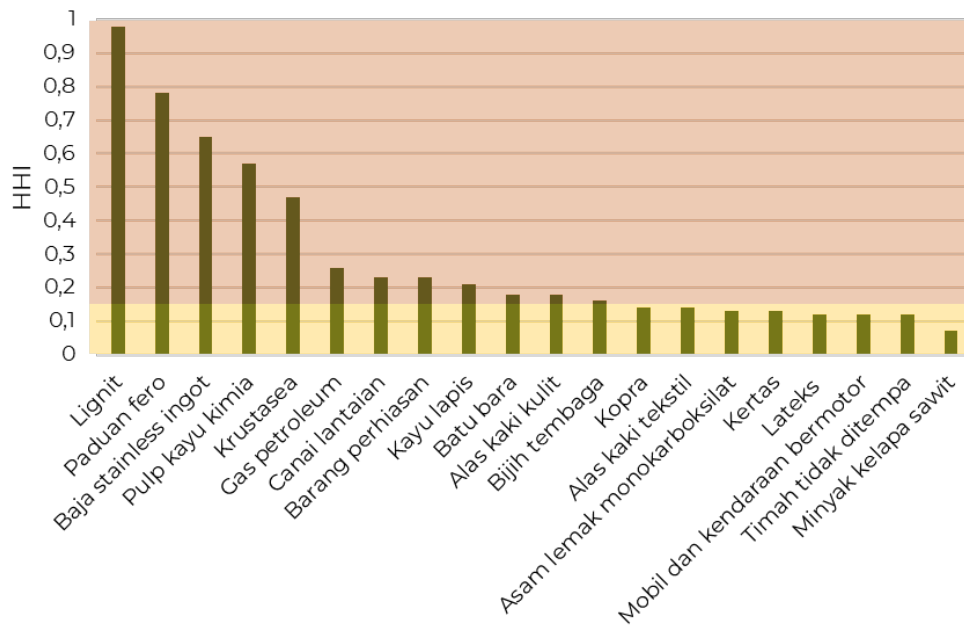


⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Diolah dari ITC, "Trade Map".

Selanjutnya, penilaian asesmen menggunakan *Herfindahl-Hirschman Index* (HHI)⁴⁹ menunjukkan bahwa hampir seluruh komoditas ekspor Indonesia memiliki negara tujuan ekspor yang terkonsentrasi, kecuali minyak kelapa sawit. Ekspor yang terkonsentrasi tersebut menempatkan Indonesia pada posisi rentan terhadap disrupsi perdagangan.

Bagan 11. Konsentrasi Negara Tujuan Ekspor⁵⁰



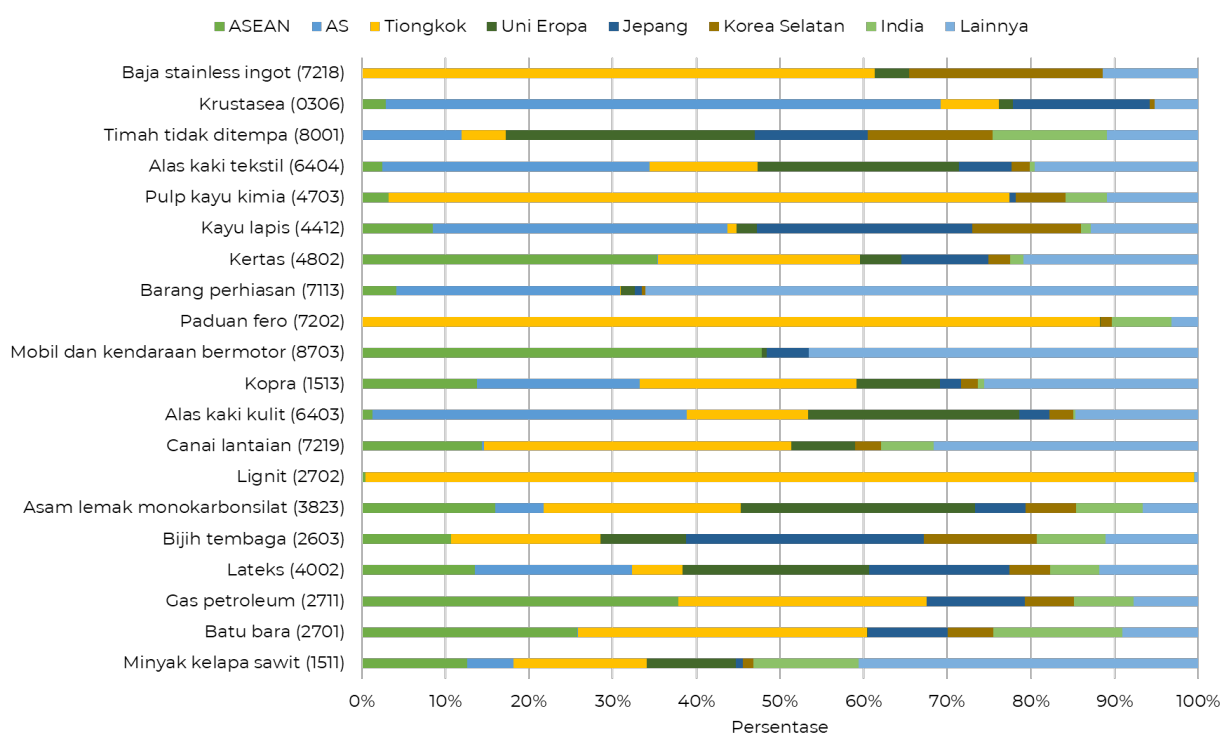
Minyak kelapa sawit menjadi satu-satunya komoditas yang memiliki tujuan ekspor yang beragam, dengan skor HHI sebesar 0,07 pada tahun 2021. Negara yang menjadi destinasi utama ekspor minyak kelapa sawit Indonesia, terdiri dari Tiongkok (15,9%), ASEAN (12,6%), India (12,5%), Uni Eropa (10,6%) dan AS (5,5%). Sementara itu, skor HHI untuk komoditas batu bara berada diambang batas menuju konsentrasi tinggi negara tujuan ekspor, dengan destinasi utama, terdiri dari Tiongkok (34,5%), ASEAN (25,8%), India (15,4%), dan Jepang (9,6%).

Secara lebih jauh, hasil tinjauan terhadap 20 komoditas ekspor utama Indonesia menemukan adanya kecenderungan ekspor menuju lima negara, terdiri dari AS, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India serta dua kawasan, terdiri dari ASEAN dan Uni Eropa. Berdasarkan Bagan 12, dapat dilihat bahwa komposisi negara tujuan ekspor Indonesia menunjukkan bahwa Tiongkok hadir secara signifikan dalam hampir semua komoditas kecuali mobil dan kendaraan bermotor, dan barang perhiasan. Sementara itu kehadiran AS cenderung rendah pada hampir semua komoditas kecuali alas kaki kulit, kopra, barang perhiasan, kayu lapis, alas kaki tekstil, dan krustasea. Meskipun demikian mitra terdekat AS seperti Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan dapat mengimbangi proporsi Tiongkok pada beberapa komoditas.

⁴⁹ HHI diperoleh melalui perhitungan besaran proporsi pangsa pasar dalam suatu industri sebagai salah satu parameter daya saing pasar. Indeks HHI berkisar dari nol hingga satu. Semakin tinggi indeks menunjukkan konsentrasi pasar yang tinggi, sementara indeks yang lebih kecil menunjukkan konsentrasi pasar yang rendah. Konsentrasi pasar berkorelasi dengan tingkat persaingan pasar dalam menggambarkan apakah pasar terkonsentrasi sempurna (monopoli). Shepherd, W. G., *The Economics of Industrial Organization*, 3rd ed. (New Jersey: Prentice Hall, 1990): 65-67.

⁵⁰ *Ibid.*

Bagan 12. Proporsi Negara Tujuan Ekspor Utama Indonesia⁵¹



Berdasarkan data-data sebagaimana di atas, studi ini menemukan kecenderungan ekspor utama Indonesia masih berada pada sektor hulu. Adapun kehadiran barang setengah jadi / perantara yang diekspor Indonesia seperti asam lemak monokarboksilat, canai lantain, paduan fero, pulp kayu kimia dan baja *stainless ingot* juga cenderung berada di sisi hulu dari sebuah rantai produksi.

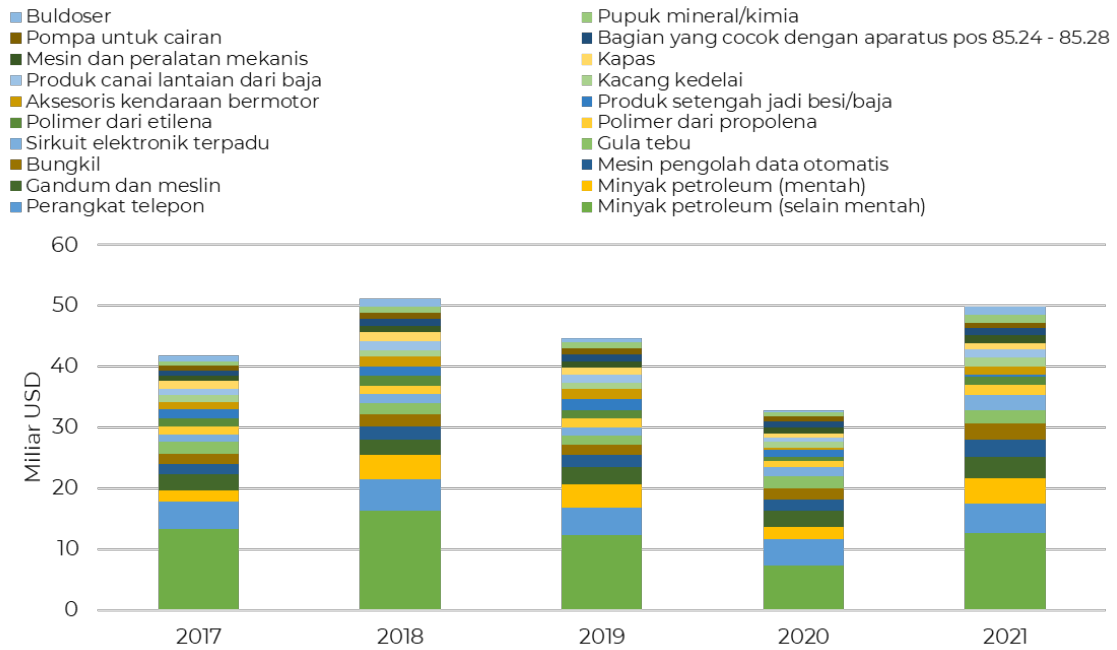
Sementara itu, secara umum diketahui bahwa penambahan nilai pada komoditas yang berada di sisi hulu cenderung rendah. Hal ini dapat dilihat sebagai merugikan Indonesia karena Indonesia tidak dapat memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya dari komoditas yang diekspor sebagai bagian dari GVC. Oleh karena itu, perlu peningkatan nilai tambah dan daya saing Indonesia melalui hilirisasi (peningkatan *downstreamness*).

Indikasi hilirisasi ini dapat dilihat dalam dua komoditas ekspor yang dipantau yakni minyak kelapa sawit dan asam lemak monokarboksilat. Meskipun studi ini belum berhasil menemukan hubungan langsung antara dua komoditas tersebut dalam konteks industri Indonesia, secara kimiawi diketahui bahwa minyak kelapa sawit dapat diproses untuk menghasilkan asam lemak monokarboksilat. Langkah ini dapat dilihat sebagai bentuk diversifikasi vertikal Indonesia.

Di sisi lain, diversifikasi juga dibutuhkan pada negara tujuan ekspor Indonesia. HHI yang tinggi dengan persentase yang tidak seimbang antarnegara tujuan ekspor menimbulkan tantangan tersendiri bagi Indonesia. Sebagai contoh, Tiongkok sebagai negara tujuan ekspor mendominasi pada empat komoditas yakni lignit, paduan fero, pulp kayu kimia, dan baja *stainless ingot*. Situasi ini memiliki implikasi bahwa Indonesia rentan terhadap disrupsi perdagangan dengan Tiongkok karena dapat secara signifikan melukai komoditas-komoditas yang bernilai ekspor tinggi.

⁵¹ Diolah dari ITC, Trade Map.

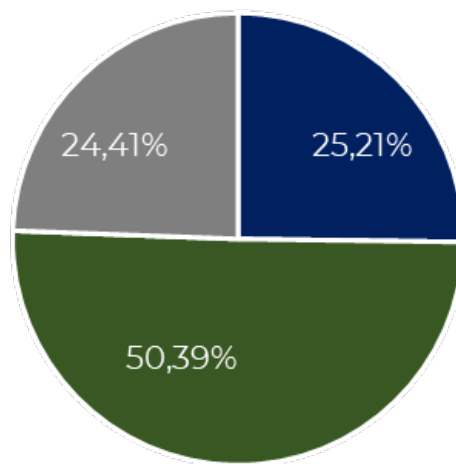
Bagan 13. Impor 20 Komoditas Utama Indonesia⁵²



Selanjutnya, tinjauan terhadap data 20 komoditas impor utama Indonesia menunjukkan bahwa minyak petroleum (selain mentah) secara konsisten menduduki peringkat pertama sebagai komoditas dengan nilai impor tertinggi dalam periode 2017 – 2021. Terlepas dari faktor harga komoditas energi yang senantiasa berfluktuasi utamanya di tengah konfigurasi geopolitik yang kian tidak menentu, minyak petroleum menjadi representasi ketergantungan Indonesia terhadap pasar global dalam memenuhi kebutuhan esensial berupa energi.

Bagan 14. Nilai Impor 20 Komoditas Utama Indonesia Berdasarkan Jenis Barang Tahun 2021⁵³

■ Barang Mentah ■ Barang Setengah Jadi ■ Barang Jadi

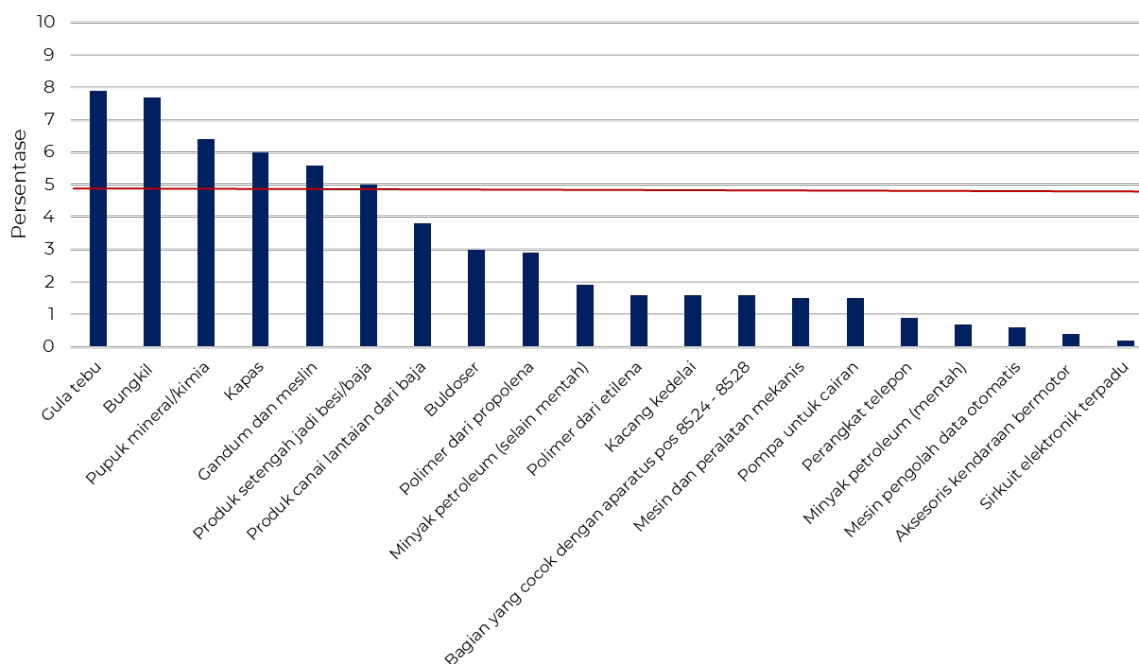


⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

Apabila komoditas ekspor utama Indonesia didominasi oleh sektor hulu, secara berkebalikan ilustrasi komoditas impor utama Indonesia justru mengindikasikan kecenderungan impor Indonesia berada pada sektor hilir. Kelompok Barang Setengah Jadi mendominasi dengan nilai impor 50,39% dari 20 komoditas impor utama Indonesia. Selanjutnya, Barang Mentah mengambil porsi 25,21% dan Barang Jadi tidak jauh di belakangnya dengan porsi 24,41%. Pada dasarnya, kondisi di atas menggambarkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pasar tetapi juga melakukan pengolahan lebih lanjut. Perlu dicatat bahwa impor barang setengah jadi Indonesia memiliki kecenderungan pada sisi hilir seperti sirkuit elektronik terpadu, polimer dari propolena dan etilena, serta aksesoris kendaraan bermotor.

Bagan 15. Persentase Impor Indonesia terhadap Impor Dunia⁵⁴



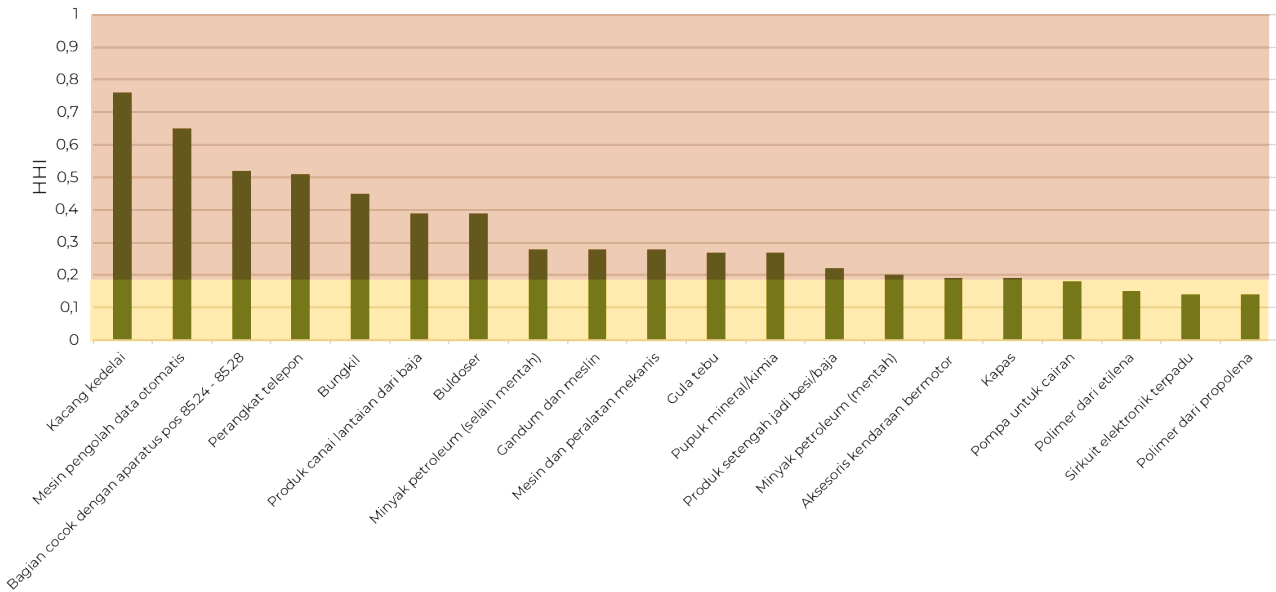
Berdasarkan identifikasi terhadap 20 Komoditas impor utama, Indonesia masuk dalam peringkat 10 besar pengimpor dunia untuk komoditas gandum dan meslin, bungkil, gula tebu, produk setengah jadi besi/baja, kapas, dan pupuk mineral/kimia. Meskipun demikian, persentase impor Indonesia terhadap impor dunia dapat terbilang cukup kecil dengan persentase tertinggi ditempati gula tebu pada 7,9% sebagaimana Bagan 15 di atas. Sebagai tambahan, data turut menggambarkan bahwa 20 komoditas tersebut memiliki keterkaitan rendah dengan komoditas ekspor Indonesia.

Sementara Indonesia berhasil memegang lebih dari 50% dari keseluruhan pasokan ekspor pasar global untuk tiga komoditas (lignit, baja *stainless ingot*, dan minyak kelapa sawit), persentase impor 20 komoditas utama Indonesia mayoritas berada di bawah 5% apabila diproyeksikan terhadap keseluruhan ekspor dunia. Hanya lima komoditas yang menembus level dari 5%, terdiri dari gula tebu, bungkil, pupuk mineral/kimia, kapas, serta gandum dan meslin.

Secara lebih lanjut, data menunjukkan bahwa 20 komoditas impor utama memiliki tingkat konsentrasi negara asal yang tinggi, termasuk minyak petroleum. Tiga negara utama yang menjadi asal impor minyak petroleum (selain mentah) Indonesia, yakni Singapura (45,8%), Malaysia (24,5%), dan India (6,3%). Pantauan menunjukkan hanya tiga komoditas saja yang tercatat memiliki tingkat konsentrasi negara asal impor yang moderat, yakni polimer dari etilena, sirkuit elektronik terpadu, dan polimer dari propilena.

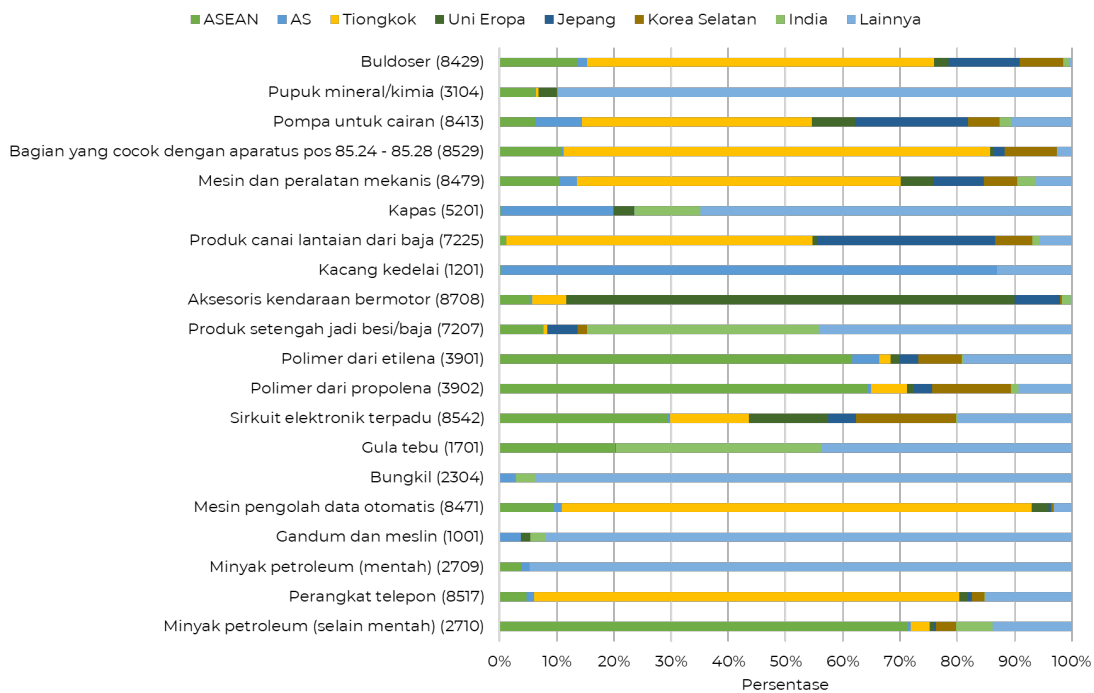
⁵⁴ *Ibid.*

Bagan 16. Konsentrasi Negara Asal Impor⁵⁵



Konsentrasi ini tercermin secara lebih jelas pada Bagan 17 yang menunjukkan dominasi negara atau kelompok negara tertentu dalam impor komoditas Indonesia. Sebagai gambaran, impor minyak petroleum (selain mentah) didominasi oleh ASEAN, begitu pula untuk polimer dari propilena dan etilena. Sementara itu, Tiongkok mendominasi impor barang jadi seperti perangkat telepon, mesin dan peralatan mekanis, buldoser dan bagian yang cocok dengan aparatus pos 85.24 – 85.28. Di sisi lain, Amerika Serikat hanya mendominasi pada impor kacang kedelai. Terakhir, negara lainnya juga terlibat untuk mendominasi beberapa komoditas seperti minyak petroleum (mentah), gandum dan meslin, bungkil serta pupuk mineral/kimia potasium.

Bagan 17. Proporsi Negara Asal Impor Utama Indonesia⁵⁶



⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

Peranan Indonesia dalam Inisiatif-Inisiatif Konektivitas Global

Sub-bagian ini akan membahas mengenai posisi Indonesia dalam berbagai inisiatif konektivitas terbaru yang digagas oleh lima negara mitra: Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Beberapa inisiatif ini dicetuskan setelah ASEAN mempublikasikan dokumen ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) pada tahun 2019. Pemilihan negara mitra yang dibahas dalam sub-bagian ini diambil berdasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, negara-negara tersebut masuk ke dalam peringkat 10 besar mitra dagang Indonesia. Kedua, negara-negara ini telah mempublikasikan dokumen kebijakan resmi yang dapat menjadi rujukan analisis.

Tabel 1. Inisiatif 5 Negara Mitra dan ASEAN untuk Konektivitas di Indo-Pasifik

	Jepang	Tiongkok	Korea Selatan	Amerika Serikat	Uni Eropa	ASEAN
Nama Inisiatif	New Plan for Free and Open Indo-Pacific	Global Development Initiative	Free, Peaceful and Prosperous Indo-Pacific	Indo-Pacific Economic Framework	Global Gateway	Outlook on the Indo-Pacific
Tahun Digagas	2023	2021	2022	2022	2021	2019
Status Indonesia	Penerima Manfaat	N/A	N/A	Anggota	Penerima Manfaat	Pencetus

Sebagai Inisiator

Dalam konteks ASEAN, Indonesia memiliki peran penting dalam lahirnya AOIP tahun 2018⁵⁷ dan diresmikan sebagai inisiatif kawasan pada pertemuan puncak ASEAN ke-34 di Thailand tahun 2019.⁵⁸ AOIP bukanlah inisiatif khusus mengenai konektivitas, tetapi menjadikan konektivitas sebagai salah satu dari empat area kerja sama yang dibayangkan di kawasan Indo-Pasifik. Kerja sama konektivitas yang dimaksud berhubungan dengan konektivitas infrastruktur baik itu yang bersifat fisik, institusional, ataupun hubungan antara masyarakat dengan masyarakat lainnya.⁵⁹

Sebagai Anggota

Berbeda dengan inisiatif lain, Indonesia merupakan anggota dari Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Dalam konteks anggota, Indonesia berkesempatan ikut serta merundingkan prinsip yang diberlakukan IPEF terlepas dari seberapa berartinya kesempatan tersebut dan seberapa jauh sudah dimanfaatkan. Keanggotaan tersebut ditandai dengan adanya penugasan khusus oleh Presiden kepada Menteri Koordinator

⁵⁷ Jansen Tham, "What's in Indonesia's Indo-Pacific Cooperation Concept? The articulation of ASEAN's own Indo-Pacific concept may pre-empt competitive narratives from Washington or Beijing," *The Diplomat*, 16 Mei, 2018, <https://thediplomat.com/2018/05/whats-in-indonesias-indo-pacific-cooperation-concept/>.

⁵⁸ "ASEAN Summit Adopts ASEAN Outlook on Indo-Pacific," Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Juni, 2019, <https://kemlu.go.id/portal/en/read/388/berita/asean-summit-adopts-asean-outlook-on-indo-pacific>.

⁵⁹ ASEAN, *ASEAN Outlook on Indo-Pacific*, https://asean.org/asean2020/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf.

Bidang Perekonomian untuk menindaklanjuti IPEF⁶⁰ dan posisi Indonesia sebagai tuan rumah negosiasi putaran kedua IPEF.⁶¹ Indonesia memiliki ruang untuk berkontribusi lebih terhadap inisiatif IPEF dalam kapasitasnya sebagai anggota.

Sebagai Penerima Manfaat

Indonesia berstatus sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*) dari inisiatif *Global Gateway* Uni Eropa, *Free, Peaceful and Prosperous Indo-Pacific* (FPPIP) Korea Selatan dan *New Plan for Free and Open Indo-Pacific* (NPFPIP) Jepang. Sedangkan Indonesia belum mengambil sikap dalam *Global Development Initiative* (GDI) Tiongkok. Layaknya inisiatif yang sifatnya unilateral dari negara mitra, Indonesia tidak begitu memiliki ruang untuk membentuk prinsip ataupun praktik daripada inisiatif-inisiatif ini.

Inisiatif *Global Gateway* Uni Eropa diperkenalkan pada tahun 2021 oleh Komisi Eropa dan Perwakilan Tinggi untuk Kebijakan Keamanan dan Luar Negeri Eropa.⁶² Pendanaan *Global Gateway* sendiri akan dialokasikan dari *European Fund for Sustainable Development Plus* (EFSD+) yang akan bekerja sama dengan Bank Investasi Eropa dan Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan.⁶³

Terkait dengan GDI Tiongkok, Presiden Joko Widodo sudah berpartisipasi dalam Dialog Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Global yang diselenggarakan secara virtual oleh Tiongkok pada Juni 2022.⁶⁴ Dialog ini merupakan rangkaian inisiatif GDI yang diperkenalkan Presiden Xi Jinping pada Sesi ke-76 Sidang Majelis Umum PBB tahun 2021.⁶⁵

Dalam konteks FPPIP Korea Selatan, pendanaan FPPIP khusus untuk wilayah ASEAN akan disalurkan Korea Selatan melalui dana Kerja sama ASEAN-Korea, Mekong-Korea, dan dana abadi kerja sama lainnya.⁶⁶ Terakhir, Indonesia direncanakan dapat mengambil manfaat dari pembangunan infrastruktur Moda Raya Terpadu (MRT) rute Utara-Selatan dan Timur-Barat, pengembangan pasar dan pelabuhan ikan di pulau terluar, penguatan kapasitas operasional Pelabuhan Patimban, kapasitas manajemen pengembangan jalan tol, modernisasi industri perkapalan, jalan raya, tata kelola jalan

⁶⁰ Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation, "President Jokowi Holds a Bilateral Meeting with President Joe Biden," *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 14 November, 2022, <https://setkab.go.id/en/president-jokowi-holds-a-bilateral-meeting-with-president-joe-biden/>.

⁶¹ "Joint USTR and U.S. Department of Commerce Readout from the Second Indo-Pacific Economic Framework Negotiating Round," Office of the United States Trade Representative, 19 Maret, 2023, <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2023/march/joint-ustr-and-us-department-commerce-readout-second-indo-pacific-economic-framework-negotiating>.

⁶² "Global Gateway: up to €300 billion for the European Union's strategy to boost sustainable links around the world," European Commission, 1 Desember, 2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6433.

⁶³ "EU-Asia and the Pacific flagship projects for 2023," European Commission, April, 2023, <https://international-partnerships.ec.europa.eu/system/files/2023-04/Asia-Pac-flagship-projects-for-2023-V06.pdf>

⁶⁴ China Daily, "Chair's Statement of the High-level Dialogue," *China Daily*, 25 Juni, 2022, <http://www.chinadaily.com.cn/a/202206/25/WS62b65831a310fd2b29e68816.html>.

⁶⁵ "Bolstering Confidence and Jointly Overcoming Difficulties to Build a Better World," Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 22 September, 2021, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/202109/t20210922_9580293.html.

⁶⁶ Choe Wongi, "The ROK's Indo-Pacific Strategy under President Yoon: Key Elements and Strategic Implications." *Institute of Foreign Affairs and National Strategy FOCUS*, 14 November, 2022, 3.

daerah, integrasi kebijakan transportasi urban, dan dialog kebijakan tentang standar layanan rantai dingin.⁶⁷

Melalui pembahasan posisi Indonesia dalam konteks GVC, monograf ini menarik dua butir kesimpulan. Pertama, Indonesia memiliki kecenderungan berada di sisi hulu. Kecenderungan tersebut menimbulkan ketidakseimbangan postur ekonomi dan produksi yang berpotensi mengancam ketahanan ekonomi nasional di masa yang akan datang. Dengan demikian, Indonesia berkepentingan untuk menutup kekurangannya di sektor hilir dengan meningkatkan *backward participation*.

Kedua, mitra dagang Indonesia cenderung terkonsentrasi pada negara dan kelompok negara tertentu, yaitu Tiongkok, AS, Jepang, Korea, Uni Eropa dan ASEAN. Konsentrasi ini secara jelas diekspresikan dalam 20 komoditas impor dan 20 komoditas ekspor yang telah dibahas. Dengan demikian, Indonesia juga berkepentingan untuk melakukan diversifikasi mitra dagang.

Monograf ini memandang secara umum meningkatkan partisipasi Indonesia dalam GVC sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Pasalnya, partisipasi lebih tinggi dalam GVC dapat meningkatkan hilirisasi dan juga menghadirkan mitra-mitra dagang baru. Dalam mencapai kepentingan nasional tersebut, Indonesia berpotensi menerima banyak kesempatan sebagai negara anggota dan penerima manfaat dari berbagai inisiatif konektivitas. Kesempatan-kesempatan ini akan dibahas secara lebih mendalam pada bagian berikutnya.

⁶⁷ *New Plan for a "Free and Open Indo-Pacific (FOIP)"*, Ministry of Foreign Affairs of Japan, 6 Juni, 2023, https://www.mofa.go.jp/fp/pc/page3e_001336.html.

Prakarsa Konektivitas ASEAN dan Negara-Negara Ekstraregional

Konektivitas merupakan elemen penting untuk meningkatkan partisipasi Indonesia dalam GVC. Idealnya, konektivitas tersebut relatif mudah dibangun di tingkat kawasan terutama dengan mempertimbangkan kedekatan jarak geografisnya. Meskipun demikian, sebagaimana akan dijelaskan pada bagian ini, inisiatif konektivitas di lingkup ASEAN saja sudah memiliki tantangannya tersendiri sebelum tahapan implementasinya. Oleh karena itu, Indonesia perlu perspektif strategis secara mandiri dan tidak hanya bergantung pada ASEAN. Urgensi ini utamanya dengan menyadari kemungkinan adanya peningkatan tensi geopolitik dalam beberapa waktu ke depan.

Indonesia perlu mempersiapkan diri menghadapi negara-negara mitra yang mulai menawarkan inisiatif konektivitasnya masing-masing di antaranya adalah Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok dan Uni Eropa. Tawaran tersebut berpotensi untuk mengisi kekurangan dari upaya konektivitas ASEAN dalam GVC intra-kawasan maupun antar-kawasan. Meskipun demikian, tawaran tersebut tentunya membutuhkan pertimbangan strategis, sehingga terdapat pertanyaan untuk dijawab yakni “Sejauh mana inisiatif konektivitas tersebut menghadirkan peluang dan risiko bagi Indonesia?”

Bagian ini akan menjawab pertanyaan tersebut dalam empat sub-bagian. Pertama, permasalahan inisiatif konektivitas ASEAN. Kedua, kemunculan inisiatif konektivitas dari negara-negara mitra. Ketiga, identifikasi peluang dari setiap inisiatif konektivitas bagi Indonesia. Keempat, identifikasi ragam risiko dari setiap inisiatif konektivitas tersebut.

Inisiatif Konektivitas ASEAN

Konektivitas bukan merupakan isu baru bagi ASEAN. Inisiatif konektivitas di ASEAN dimulai pada tahun 2010 dengan disepakatinya Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2010 sebagai upaya untuk meningkatkan integrasi ASEAN yang diharapkan pada tahun 2015. MPAC 2010 mencantumkan proyek-proyek prioritas yang mendukung keterikatan negara-negara di ASEAN di tiga pilar Komunitas ASEAN, khususnya di 19 area prioritas yang diterjemahkan ke dalam 84 proyek aksi pilihan dari tiga aspek: konektivitas fisik (transportasi, teknologi, informasi, energi), konektivitas institusional (perdagangan, investasi, liberalisasi jasa), dan konektivitas antar masyarakat (pendidikan, budaya, dan pariwisata) sesuai dengan ketiga pilar Komunitas ASEAN.⁶⁸ Visi dari MPAC 2010 adalah untuk “mewujudkan suatu Komunitas ASEAN yang dinamis dan terintegrasi di kawasan Asia Tenggara yang damai dan makmur sekaligus menempatkan ASEAN sebagai pemain kunci di tingkat kawasan dan tingkat dunia”. MPAC 2010, di antaranya, berfokus pada pengembangan mega proyek infrastruktur seperti pembangunan jaringan tol ASEAN, pembangunan rel Singapura-Kunming, dan proyek-proyek yang berkaitan dengan energi.

⁶⁸ “ASEAN Connectivity,” Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, diakses pada April 2023, https://kemlu.go.id/ptri-asean/id/pages/asean_connectivity/982/etc-menu.

Tabel 2. Cakupan MPAC 2025 dari Dimensi Konektivitas dan Masyarakat ASEAN⁶⁹

Fokus utama
 Fokus sekunder
 Fokus terbatas

Strategi MPAC 2025	Dimensi Konektivitas			Dimensi Masyarakat		
	Fisik	Institusional	Antar masyarakat	Politik dan Keamanan	Ekonomi	Sosial Budaya
Klaster 1: Infrastruktur Berkelanjutan						
Klaster 2: Inovasi Digital						
Klaster 3: Logistik yang Rapi						
Klaster 4: Keunggulan Regulasi						
Klaster 5: Mobilitas Orang						

Seiring dengan berakhirnya MPAC 2010 di tahun 2015, ASEAN hadir dengan inisiatif konektivitas yang lebih dipertajam atau dikenal dengan MPAC 2025. Penajaman tersebut setidaknya terjadi di tiga aspek. Pertama, MPAC 2025 mempunyai masa implementasi yang lebih panjang, yakni sepuluh tahun. Hal ini mempertimbangkan karakteristik dari pembangunan proyek infrastruktur yang memerlukan waktu yang lama, mulai dari perencanaan, pendanaan, hingga implementasi. Kedua, MPAC 2025 mulai memberikan ruang perhatian lebih pada konektivitas di bidang selain fisik/infrastruktur. Di dalam dokumen MPAC 2025, terdapat perubahan dalam pengembangan konektivitas yang semula dominan aspek fisik, bergerak pada aspek non-fisik, seperti fasilitasi perdagangan, investasi, hingga untuk memperlancar mobilitas masyarakat di ASEAN.⁷⁰ Hal ini tercermin dari visi MPAC 2025, yaitu terciptanya “ASEAN yang terhubung dan terintegrasi secara komprehensif dan berlanjut yang akan mempromosikan daya saing, inklusivitas, dan kesadaran terhadap Komunitas (ASEAN) yang lebih tinggi”. Ketiga, MPAC 2025 menjabarkan tujuan strategisnya secara lebih spesifik sesuai dengan klasternya, walaupun klaster tersebut masih dominan diperuntukkan bagi Komunitas Ekonomi ASEAN.

Terlepas dari penajaman tersebut, terdapat tantangan berupa keberlanjutan dalam inisiatif konektivitas ASEAN. Tantangan dimaksud berkaitan dengan komitmen

⁶⁹ The ASEAN Secretariat, *Master Plan on ASEAN Connectivity 2025*, Agustus 2016, <https://asean.org/wp-content/uploads/2018/01/47.-December-2017-MPAC2025-2nd-Reprint-.pdf>.

⁷⁰ Muhammad Arif dan Vierna Tasya Wensatama, “Connecting Southeast Asia – Progress under the Master Plan on ASEAN Connectivity 2025,” *ASEAN Briefs* 6, no. 2, (2019): 4.

politik anggaran. ASEAN tidak mempunyai kapasitas untuk sepenuhnya melakukan pembangunan konektivitas secara mandiri. Pembiayaan dari pembangunan konektivitas di ASEAN hampir seluruhnya mengandalkan sumber eksternal seperti bank pembangunan dan/atau investasi dari negara mitra ASEAN. Dalam implementasinya, konektivitas ASEAN dikelola oleh ASEAN Connectivity Coordinating Committee (ACCC) yang terdiri dari perwakilan masing-masing negara anggota dan bertugas untuk menyelaraskan inisiatif di tingkat regional dengan prioritas nasional Negara Anggota ASEAN. Selain itu, ACCC juga secara rutin menyelenggarakan pertemuan untuk membahas strategi pencapaian MPAC dan menerbitkan sejenis kartu penilaian (*score card*) untuk menilai progres dari MPAC. Sayangnya, selain progres yang tercatat di dalam dokumen MPAC 2025, belum ditemukan informasi resmi lebih lanjut dari ACCC terkait progres dari implementasi MPAC hingga sekarang.

Informasi yang diketahui sejauh ini hanya terbatas pada penjelasan mengenai MPAC 2010 sebagai suatu inisiatif yang ambisius karena periode pelaksanaan yang singkat 2011 s.d. 2015 tanpa adanya komitmen anggaran memadai. Terbukti, 52 dari 125 inisiatif yang digagas dalam MPAC 2010 belum terwujud hingga akhir periode dan akan dilanjutkan pada MPAC 2025. Sebagai salah satu strategi untuk mencari sumber pendanaan bagi proyek-proyek yang ada di dalam MPAC, ASEAN mengeluarkan inisiatif *Connecting the Connectivities* pada tahun 2019. Inisiatif ini bertujuan untuk mempromosikan konektivitas regional, yang mencakup kerja sama dan kolaborasi antar Negara Anggota ASEAN dan negara lainnya di luar kawasan. *Connecting the Connectivities* juga bertujuan untuk mengundang dan menyelaraskan inisiatif MPAC 2025 dengan inisiatif konektivitas lain seperti Tiongkok (BRI), Jepang (*Expanded Partnership for Quality Infrastructure*), India (*Act East Policy*), dan inisiatif konektivitas lainnya.⁷¹

ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dan Respons Negara Mitra

Tidak hanya mengeluarkan *Connecting the Connectivities*, ASEAN juga mengeluarkan suatu pandangan regional terkait geopolitik di kawasan Indo-Pasifik yang dinamakan AOIP pada tahun 2019. Setidaknya terdapat dua penjelasan rasional di balik peluncuran AOIP.

- Bagi Indonesia sebagai negara pelopor AOIP, kepemimpinan Presiden Joko Widodo bertekad untuk memperkuat posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik melalui cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang kuat dari sisi pertahanan maritim dan makmur dari sisi pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia berusaha untuk menjadikan AOIP sebagai wadah untuk berdialog dan bekerja sama secara inklusif, menghindari rivalitas dan dalam kadar tertentu membantu Indonesia menjadi poros maritim dunia.
- Bagi ASEAN, keberadaan AOIP dapat bermanfaat untuk meningkatkan sentralitas ASEAN di kawasan Indo-Pasifik dan mengukuhkan proses pembangunan Komunitas ASEAN. Selain itu, AOIP juga diharapkan dapat memberikan dan menegaskan momentum bagi mekanisme yang dipimpin oleh ASEAN dalam menghadapi tantangan sekaligus meraup manfaat dari dinamika lingkungan regional dan global. AOIP diharapkan pula dapat berfungsi menjadi jalan tengah

⁷¹ Department of ASEAN Affairs, Ministry of Foreign Affairs Thailand, "National Efforts Related to ASEAN Connectivity," connectivity.asean.org, 25 September, 2018, <https://connectivity.asean.org/resource/symposium-on-fostering-regional-connectivity-in-the-indo-pacific-region-connecting-the-connectivities11-june-2018-bangkok-thailand/>.

rivalitas negara besar dengan menawarkan kerja sama yang lebih inklusif dan tidak memihak.⁷² Empat area kerja sama AOIP antara lain kerja sama maritim, konektivitas, Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030, serta kerja sama ekonomi dan bidang lainnya.

Meskipun MPAC dan AOIP adalah dua gagasan yang tidak linear, keduanya bersifat komplementer. MPAC berkonsentrasi pada konektivitas sepenuhnya, sementara AOIP merupakan payung lebih besar dengan MPAC sebagai salah satu bagiannya. Dengan kata lain AOIP bersifat sebagai pandangan visioner, sementara MPAC adalah gagasan operasional. Inisiatif konektivitas MPAC, baik 2010 dan 2025, terdiri dari penjelasan yang terukur dari sisi perencanaan hingga implementasi. Sementara itu, AOIP merupakan norma yang tidak bersifat operasional. Menurut Siswo Pramono, AOIP adalah bintang pemandu, sedangkan MPAC adalah kapal yang berlayar yang memerlukan panduan tersebut.⁷³

AOIP sangat didominasi oleh motif politik untuk memperkuat posisi ASEAN dalam dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Akan tetapi, penguatan posisi ini harus didukung dengan modalitas dasar secara internal dan eksternal, seperti dinamika Negara Anggota ASEAN dalam memandang AOIP dan bagaimana negara mitra wicara menanggapi gagasan AOIP. Di lain pihak, MPAC cenderung didominasi oleh motif ekonomi. Terlepas dari komplementaritas ini, inisiatif konektivitas ASEAN masih menempatkan ASEAN sendiri sebagai penerima manfaat (*beneficiary*) dan belum bisa disejajarkan dengan inisiatif konektivitas negara lain. Dengan kata lain, inisiatif konektivitas ASEAN bukan diperuntukkan sebagai suatu inisiatif yang berkompetisi dengan inisiatif konektivitas negara lain.

Lima negara mitra memiliki tanggapan awal yang relatif beragam terhadap AOIP. Tanggapan dapat dilihat dalam momentum pertemuan tingkat tinggi pertama, setelah peluncuran AOIP, dengan negara-negara mitra di bulan November 2019. Jepang merupakan mitra yang paling eksplisit menyampaikan dukungannya sebagaimana tercatat dalam pernyataan ketua 22nd ASEAN-Japan Summit.⁷⁴ Amerika Serikat tercatat mendukung AOIP, walaupun 7th ASEAN Summit saat itu tidak diwakilkan oleh Presiden ataupun Wakil Presidennya.⁷⁵ Korea Selatan juga tercatat mendukung AOIP sebagaimana terekam dalam ASEAN-ROK Commemorative Summit 2019.⁷⁶ Tiongkok merupakan mitra yang relatif ambigu dalam memberikan tanggapan awal dengan hanya berharap

⁷² "Indonesia Dorong ASEAN Outlook on The Indo-Pacific Hadapi Ketidakpastian Regional Dalam Pertemuan Senior Officials' Asean-Republik Korea," Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Agustus, 2020, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1601/berita/indonesia-dorong-asean-outlook-on-the-indo-pacific-hadapi-ketidakpastian-regional-dalam-pertemuan-senior-officials-asean-republik-korea>.

⁷³ Calvin Khoe, "ASEAN Outlook on the Indo-Pacific and Indonesia's Indo-Pacific Strategy: What's Next?" wawancara Siswo Pramono oleh Calvin Khoe, *Foreign Policy Community of Indonesia*, Mei, 2021, <https://www.fpcindonesia.org/wp-content/uploads/2021/05/FPCI-Policy-to-Watch-Dr-Siswo-Indo-Pacific-Updated.pdf>.

⁷⁴ "Chairman's Statement of The 22nd ASEAN-Japan Summit Bangkok/Nonthaburi," Association of Southeast Asian Nations, 4 November, 2019, <https://asean.org/wp-content/uploads/2019/11/chairmans-statement-of-the-22nd-asean-japan-summit-final.pdf>.

⁷⁵ "Chairman's Statement of The 7th ASEAN-US Summit Bangkok/Nonthaburi," Association of Southeast Asian Nations, 4 November, 2019, <https://asean.org/wp-content/uploads/2019/11/FINAL-Chairmans-Statement-of-the-7th-ASEAN-US-Summit.pdf>.

⁷⁶ "Co-Chairs' Statement of The 2019 ASEAN-Republic of Korea Commemorative Summit 'Partnership for Peace, Prosperity for People'," Association of Southeast Asian Nations, 26 November, 2019, <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/03/FINAL-Co-Chairs-Statement-of-the-2019-ASEAN-ROK-Commemorative-Summit.pdf>.

bahwa AOIP dapat menjadi panduan untuk mengeksplorasi dan mempromosikan kerja sama dengan mitra eksternal.⁷⁷ Mengingat tidak adanya pertemuan tingkat tinggi antara ASEAN-Uni Eropa yang terjadi di tahun 2019, tanggapan awal yang dianalisis dalam tulisan ini merujuk pada pertemuan tingkat menteri ASEAN-Uni Eropa ke-23 akhir tahun 2020. Dalam keterangan pers bersama pada pertemuan dimaksud, disebutkan ASEAN berupaya menarik dukungan Uni Eropa terhadap AOIP. Meskipun demikian, Uni Eropa belum terlihat memberikan tanggapan dan posisi yang jelas terhadap AOIP.⁷⁸

Inisiatif Konektivitas Mitra Eksternal

Sejak peluncuran AOIP di tahun 2019, kelima negara mitra tidak hanya memberikan tanggapan awal tetapi juga mulai bergerak menawarkan inisiatifnya masing-masing baik itu yang bersifat khusus konektivitas maupun geopolitik. Secara alami masing-masing inisiatif tersebut tentunya mengandung kepentingan-kepentingan dari negara penggagasyang mungkin berkonflik satu sama lainnya. Sebagai contohnya IPEF disinyalir sebagai perwujudan upaya pelepasan AS dari ketergantungannya terhadap Tiongkok sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Pada tahun 2021, dua mitra perdagangan besar Indonesia, Tiongkok dan Uni Eropa, tercatat merilis inisiatif terbaru mereka.

Tiongkok menawarkan inisiatif baru yang dinamakan GDI. GDI diproyeksikan sebagai inisiatif pelengkap atas BRI yang telah dirintis sejak tahun 2013. BRI sendiri bertujuan untuk memajukan ekonomi dan konektivitas regional melalui pembangunan infrastruktur pada kelompok negara yang berlokasi di sepanjang rute perdagangan jalur sutera. Sementara itu, GDI bertujuan untuk mendukung pemenuhan tujuan SDGs pada 2023. Pandemi Covid-19 menjadi latar belakang utama dari kemunculan GDI. Xi Jinping dalam sesi ke-76 Sidang Majelis Umum PBB menyampaikan empat poin ajakan: 1) prioritas untuk mengalahkan Covid-19 yang menjadi ancaman bagi masa depan umat manusia; 2) merevitalisasi ekonomi dan mencapai pembangunan global yang kuat, lebih hijau, dan seimbang; 3) memperkuat solidaritas dan menjunjung sikap saling menghormati, serta kerja sama yang saling menguntungkan dalam menjalankan praktik hubungan internasional; dan 4) meningkatkan tata kelola global dengan di saat bersamaan mempraktikkan multilateral yang sesungguhnya.⁷⁹

Uni Eropa memperkenalkan inisiatif baru yang dinamakan Global Gateway. Inisiatif ini lahir dari keinginan Uni Eropa untuk berperan lebih dalam mengatasi kesenjangan infrastruktur global di tengah kompetisi geopolitik yang sedang berlangsung, SDGs tahun 2030 dan Perubahan Iklim.⁸⁰ Global Gateway juga diharapkan mampu menawarkan solusi alternatif untuk pembiayaan infrastruktur dengan mempertimbangkan lanskap utang negara penerima. Terdapat lima aspek yang menjadi fokus dari inisiatif ini, yaitu transportasi, digitalisasi, kesehatan, perubahan iklim dan energi, serta riset dan edukasi. Dalam menjalankan inisiatif ini, Uni Eropa mensyaratkan sejumlah elemen antara lain penghormatan pada nilai demokrasi, kemitraan yang adil, fokus pada aspek keamanan,

⁷⁷ "Chairman's Statement of The 22nd ASEAN-China Summit Bangkok/Nonthaburi," Association of Southeast Asian Nations, 3 November, 2019, <https://asean.org/wp-content/uploads/2019/11/Chairmans-Statement-of-the-22nd-ASEAN-China-Summit-final.pdf>.

⁷⁸ "Co-chairs' press release of the 23rd ASEAN-EU ministerial meeting," Council of the European Union, 1 Desember, 2020, <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/01/co-chairs-press-release-of-the-23rd-asean-eu-ministerial-meeting/>.

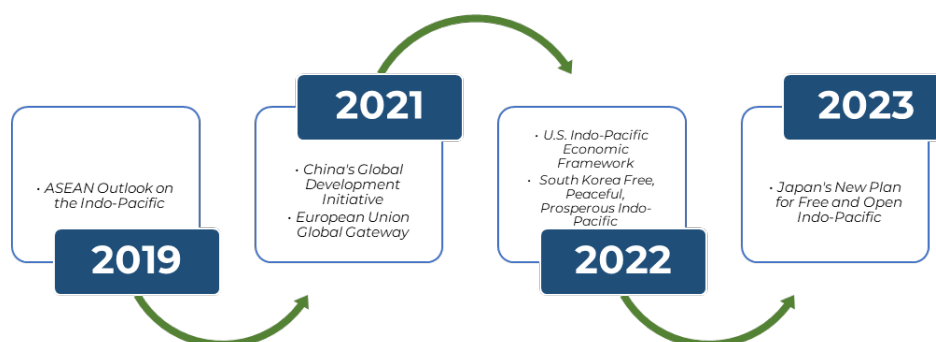
⁷⁹ MoFA PRC, "Bolstering Confidence".

⁸⁰ European Commission, *Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank The Global Gateway*, 1 Desember, 2021, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021JC0030>.

pemerintahan yang baik, kebijakan yang mendukung pada transisi energi hijau, dan mendorong keterlibatan pihak swasta. Uni Eropa akan menggelontorkan dana hingga 300 Miliar Euro pada inisiatif konektivitas ini.

Setelah era cakupan global memudar, yang kemungkinan besar dipicu oleh Covid-19, dua mitra lain kemudian menghadirkan inisiatif terbaru dengan lebih berfokus pada kawasan Indo-Pasifik. Di tahun 2022, Amerika Serikat mengeluarkan inisiatif kerja sama ekonomi komprehensif baru yang dinamakan IPEF. IPEF dicetuskan dalam kunjungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ke Jepang pada akhir Mei 2022.

Bagan 18. Inisiatif Konektivitas Mitra Eksternal



Tidak hanya Amerika Serikat, Korea Selatan juga merilis inisiatif FPPIP di penghujung tahun 2022. Inisiatif ini memiliki sembilan area kerja, yaitu 1) tatanan kawasan, 2) penegakan hukum dan HAM, 3) non-proliferasi dan kontra-terorisme, 4) keamanan komprehensif, 5) keamanan ekonomi, 6) sains dan teknologi, 7) perubahan iklim dan keamanan energi, 8) kerja sama pembangunan, serta 9) pertukaran dan pemahaman bersama.⁸¹ Mengingat Korea Selatan juga merupakan negara yang menitikberatkan perkembangan teknologi tinggi dalam perekonomiannya, sektor-sektor teknologi krusial seperti semikonduktor, kecerdasan buatan, ilmu teknologi kuantum, ilmu biologi mutakhir, hingga teknologi telekomunikasi dan luar angkasa generasi terbaru kerap dibahas dalam dokumen FPPIP. Agenda konektivitas yang dibahas cenderung bersifat konektivitas digital. Inisiatif ini merupakan kelanjutan dari New Southern Policy yang menjadikan 3P sebagai fokus, yaitu *People, Prosperity and Peace*.

Pada tahun 2023, Jepang menjadi mitra yang paling baru menawarkan inisiatifnya. Inisiatif geopolitik dan geoekonomi tersebut dinamakan NPFOIP. NPFOIP dicetuskan oleh Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, dalam kunjungannya ke India pada akhir Maret 2023. NPFOIP terdiri atas empat pilar, yaitu 1) prinsip untuk perdamaian dan aturan untuk kesejahteraan, 2) menghadapi tantangan dengan cara Indo-Pasifik, 3) konektivitas multi-tingkatan, dan 4) memperluas upaya untuk keamanan dan pemanfaatan “laut” secara aman ke “udara”. NPFOIP merupakan pengembangan dari inisiatif Indo-Pasifik Mantan Perdana Menteri Shinzo Abe. Apabila dibandingkan dengan inisiatif awal tersebut, NPFOIP cenderung memberikan nuansa baru dengan adanya pilar 2, 3, dan 4. Penegasan mengenai “cara Indo-Pasifik” dan “perluasan usaha keamanan ke udara” merupakan sesuatu yang tidak spesifik muncul dalam inisiatif FOIP milik pemerintahan Abe.⁸²

⁸¹ The Government of The Republic of Korea, “Strategy For A Free, Peaceful, and Prosperous Indo-Pacific Region,” 28 Desember, 2022, https://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=322133.

⁸² Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Free and Open Indo-Pacific,” diakses pada April 2023 <https://www.mofa.go.jp/files/000430632.pdf>.

Identifikasi Peluang dari Berbagai Inisiatif Eksternal

Berbagai inisiatif eksternal yang hadir pasca peluncuran AOIP membawa peluang bagi Indonesia untuk memperbaiki tingkat partisipasinya dalam GVC dan bagi ASEAN untuk mengisi kekurangan dalam jaringan konektivitasnya secara intra-kawasan dan antar-kawasan. Oleh karena itu, sub-bagian ini secara umum akan mengidentifikasi lima peluang penting yang kiranya dapat Indonesia ambil dengan berpartisipasi dalam inisiatif tersebut. Perlu ditekankan bahwa peluang ini dapat berubah bergantung pada perkembangan geopolitik dan geoekonomi yang ada. Dengan demikian, penilaian peluang pada monograf ini dilakukan terbatas berdasarkan pada dokumen kebijakan resmi yang berkaitan dengan masing-masing inisiatif. Kelima peluang tersebut antara lain adalah:

- Transfer teknologi: apakah inisiatif tersebut menyatakan tawaran alih teknologi secara eksplisit? Di bidang apakah tawaran tersebut diberikan? Transfer teknologi dalam tulisan ini lebih dimaknai sebagai transfer kemampuan untuk memproduksi barang tertentu melalui manufaktur bersama, bukan hanya sekedar hibah teknologi tertentu.
- Peningkatan kapasitas: apakah inisiatif tersebut menyatakan peningkatan kapasitas secara eksplisit? Di bidang apakah tawaran tersebut diberikan?
- Pengurangan biaya perdagangan: apakah inisiatif tersebut menyatakan pengurangan biaya perdagangan secara eksplisit? Di bidang apakah tawaran tersebut diberikan? Apabila tidak secara langsung, apakah secara tidak langsung biaya perdagangan akan berkurang ketika berpartisipasi dalam inisiatif tersebut?
- Pembiayaan infrastruktur: apakah inisiatif tersebut menyatakan pembiayaan infrastruktur secara eksplisit? Di bidang apakah tawaran tersebut diberikan?
- Investasi swasta: apakah inisiatif tersebut menyatakan investasi swasta secara eksplisit? Di bidang apakah tawaran tersebut diberikan?

Tabel 3. Identifikasi Peluang dari Berbagai Inisiatif Eksternal

	Tiongkok	Uni Eropa	Amerika Serikat	Korea Selatan	Jepang
Inisiatif/ Peluang	Global Development Initiative	Global Gateway	Indo Pacific Economic Framework	Free, Peaceful, Prosperous Indo-Pacific	A New Plan for Free and Open Indo-Pacific
Peluang 1: Transfer Teknologi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Peluang 2: Peningkatan Kapasitas	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Peluang 3: Pengurangan Biaya Perdagangan	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya
Peluang 4: Pembiayaan Infrastruktur	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Peluang 5: Investasi Swasta	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya

Peluang Transfer Teknologi

Terlepas dari kebutuhan strategis Indonesia untuk meningkatkan kemampuan manufakturnya, transfer teknologi merupakan salah satu peluang yang paling jarang ditawarkan oleh beragam inisiatif ini.

Sebagaimana yang dapat terlihat dari Tabel 3, hanya Jepang yang secara eksplisit memberikan penawaran alih teknologi ketika berpartisipasi dalam NPFQIP. Alih teknologi yang dijanjikan adalah di bidang pertahanan. Merujuk pada dokumen kebijakan NPFQIP, Indonesia termasuk dalam salah satu mitra transfer⁸³ dan keduanya sudah menandatangani landasan hukum transfer terkait pada tahun 2021.⁸⁴ Meskipun belum terdapat implementasi konkret sejak dokumen ditandatangani, tetapi teknologi yang ditransfer bersifat penyelamatan dan pemantauan maritim⁸⁵ sejalan dengan tiga prinsip transfer teknologi Jepang.⁸⁶ Jika peluang ini dimanfaatkan dengan tepat bukan tidak mungkin Indonesia berkesempatan masuk dalam GVC untuk industri pertahanan.

Di sisi lain, monograf tidak melupakan kerja sama Korea Selatan dan Indonesia telah menjalin program pengadaan pertahanan bersama, termasuk pesawat tempur KF-21 dan kapal selam kelas Nagapasa, sebelum inisiatif FPPIP diluncurkan.⁸⁷ Akan tetapi, dalam perkembangannya muncul berbagai permasalahan antara lain penundaan pembayaran dari pihak Indonesia⁸⁸, serta alih teknologi yang tidak pasti akibat pembatasan dari Amerika Serikat selaku pemegang izin komponen teknologi pertahanan dalam pesawat tempur KF.⁸⁹ Di dalam FPPIP sendiri pun tidak begitu jelas tawaran transfer teknologi yang dijanjikan terlepas dari status Indonesia sebagai mitra strategis khusus Korea Selatan.

Tiongkok relatif tidak berbeda. Pada dasarnya, dokumen tidak secara gamblang menyebutkan perihal transfer teknologi sebagai rangkaian area pembangunan yang dikedepankan dalam inisiatif. Berdasarkan perkembangan diskusi pada *High-Level Dialogue on Global Development* bulan Juni 2022, tercatat bahwa Tiongkok menjadikan pembangunan industrialisasi, termasuk kapasitas produksi industri dan manufaktur sebagai satu dari delapan area yang akan menjadi fokus kerja sama praktis dalam kerangka GDI.⁹⁰

⁸³ Ministry of Foreign Affairs of Japan, *New Plan for a 'Free and Open Indo-Pacific (FOIP): Items of Cooperation*, Mei, 2023, https://www.mofa.go.jp/fp/pc/page3e_001336.html.

⁸⁴ Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang, *Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang tentang Pengalihan Alat dan Teknologi Pertahanan*, 30 Maret, 2021, <https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=JPN-2021-0565.pdf>.

⁸⁵ Jon Grevatt, "Japan, Indonesia Sign Defence Trade Deal," *Janes*, 31 Maret, 2021, https://www.janes.com/defence-news/news-detail/japan-indonesia-sign-defence-trade-deal_16606. Lihat juga tulisan dari The Sankei Shimbun, "Japan Offers to Jointly Build Warship with Indonesia," *Japan Forward*, 21 Mei, 2021, <https://japan-forward.com/japan-offers-to-jointly-build-warship-with-indonesia/>.

⁸⁶ Ministry of Foreign Affairs of Japan, *Three Principles on Transfer of Defense Equipment and Technology*, April 2014, https://www.meti.go.jp/policy/ampo/law_document/tutatu/t11kaisei/boueisoubiitensangensoku_honbun_english.pdf.

⁸⁷ Alexander M. Hynd, Max Broad, dan Waffaa Kharisma, *Indonesia-South Korea at 50: One Step Further for the Special Strategic Partnership* (Jakarta: CSIS Indonesia, 2023), 6.

⁸⁸ Jon Grevatt, "Indonesia Restarts KF-21 Repayment to South Korea," *Janes*, 3 November, 2022, <https://www.janes.com/defence-news/news-detail/indonesia-restarts-kf-21-repayments-to-south-korea>.

⁸⁹ Evan Laksmana dan Andrew W. Mantong, "Missing Pillars of Strategic Autonomy Security Cooperation between Korea and ASEAN," dalam *The New Southern Policy Plus: Progress and Way Forward*, ed. Kwon Hyung Lee dan Yoon Jae Ro. (Seoul: Korea Institute for International Economic Policy, 2021), 192.

⁹⁰ China Daily, "Chair's Statement".

Sementara itu, tidak ada klausul spesifik baik dari Global Gateway dan IPEF yang menjanjikan akan adanya tawaran alih teknologi ketika berpartisipasi. Pada batasan tertentu, persoalan ini dapat dimaklumi dengan mengingat mahalannya biaya penelitian dan pengembangan suatu teknologi. Selain itu, hak kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomi sangat tinggi sehingga negara penerima harus memiliki kemampuan untuk melindunginya. Belum lagi persoalan preferensi sikap geopolitik yang terkadang menjadi syarat alih teknologi ini. Indonesia perlu mengelola ekspektasinya dalam menyikapi peluang ini.

Peluang Peningkatan Kapasitas

Berbanding terbalik dengan transfer teknologi, peluang peningkatan kapasitas secara masif ditawarkan oleh semua inisiatif konektivitas. Bahkan, peluang ini menjadi satu-satunya elemen yang sama dibandingkan dengan keempat peluang lain.

Dalam konteks GDI, pidato yang disampaikan Xi pada peluncuran GDI secara khusus menyebutkan komitmen terhadap pendekatan yang berfokus terhadap kesejahteraan masyarakat (*people-centered approach*). Perkembangan yang berlangsung kian menunjukkan pengembangan kapasitas sebagai salah satu fokus tawaran GDI. Dalam dokumen daftar proyek termin pertama GDI disebutkan rencana pelaksanaan proyek pelatihan sumber daya manusia (SDM) meliputi semua area prioritas GDI oleh Badan Kerja Sama Pembangunan Internasional Tiongkok (China International Development Cooperation Agency, CIDCA).⁹¹

Di lain pihak, Uni Eropa atau Team Europe, selaku pelaksana dari Global Gateway, disebutkan akan memberikan bantuan teknis untuk peningkatan kapasitas bagi tenaga ahli dan kajian teknis bagi negara mitra. Dukungan Uni Eropa ini diberikan secara berdampingan dengan proyek yang berjalan di negara mitra. Termasuk di antara negara mitra Uni Eropa tersebut adalah Indonesia.

Senada dengan itu, IPEF pun akan menawarkan peluang pengembangan kapasitas dan keterampilan sesuai pilar-pilarnya. Pilar 1 membuka kesempatan pengembangan kapasitas untuk menerapkan ketentuan perdagangan berstandar tinggi. Pilar 2 membuka kesempatan pengembangan kapabilitas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta kapasitas tenaga kerja terampil untuk rantai pasok sektor kritis. Pilar 3 membuka kesempatan pengembangan kapasitas berkaitan langsung dengan ekonomi bersih. Sementara pilar 4 membuka kesempatan pengembangan kapasitas di bidang administrasi perpajakan dan mobilisasi sumber daya domestik. Kerja sama konkret yang sudah dijalankan IPEF untuk peluang ini adalah IPEF *Upskilling Initiative* yang memungkinkan perempuan mendapatkan pelatihan pemberdayaan ekonomi melalui alat-alat digital.⁹²

Korea Selatan melalui dokumen kebijakan FPPIP juga menegaskan tawaran peningkatan kapasitas SDM dalam konteks mempercepat pencapaian SDGs bagi negara-negara berkembang melalui kerja sama teknologi. Kesempatan ini dapat digunakan Indonesia untuk dapat meningkatkan kualitas SDM khususnya yang terkait dengan teknologi Industri 4.0 dan juga pengembangan keterampilan untuk pekerjaan masa depan. Beberapa peningkatan kapasitas teknis juga disebutkan contoh dalam sektor Hak Asasi Manusia (HAM) dan teknologi keamanan nuklir.

⁹¹ Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, *List of First-batch Projects of GDI Project Pool*, September 2022, https://www.fmprc.gov.cn/eng/wjdt_665385/2649_665393/202209/P020220921624707087888.pdf.

⁹² "Fact Sheet: IPEF Upskilling Initiative," The United States Department of Commerce, dirilis pada September 2022, <https://www.commerce.gov/sites/default/files/2022-09/IPEF-Upskilling-Fact-Sheet.pdf>.

Dalam konteks NPF OIP Jepang, dokumen kebijakannya turut menawarkan pengembangan SDM secara komprehensif.⁹³ Pengembangan SDM tersebut di antaranya diberikan melalui program pelatihan, penelitian di Jepang, program ko-kreasi, memfasilitasi mobilitas SDM, kolaborasi antara pemerintah-industri-universitas, serta penyelenggaraan kompetisi dan seminar.⁹⁴ Indonesia sendiri diproyeksikan menerima peningkatan kapasitas di beberapa area tematik termasuk di bidang penyelenggaraan hukum (*rule of law*), uji tuntas HAM bagi bisnis dan pemasok, penanggulangan bencana, investigasi tindak kriminal, manajemen dan operasional infrastruktur transportasi, serta industri perkapalan.

Peluang Pengurangan Biaya Perdagangan

Pengurangan biaya perdagangan merupakan salah satu peluang yang tidak ditawarkan oleh inisiatif yang sifatnya berskala global, seperti Global Gateway dan GDI, tetapi ditawarkan oleh inisiatif yang berkonsentrasi pada kawasan Indo-Pasifik.

Tinjauan terhadap dokumen-dokumen terkait GDI tidak menemukan adanya pembahasan terkait fasilitas penurunan biaya perdagangan sebagai salah satu fasilitas yang ditawarkan. Temuan tersebut pada dasarnya sesuai dengan tujuan utama dari GDI yang lebih berfokus pada pemenuhan SDGs tahun 2030. Satu-satunya pembahasan terkait perdagangan yang berhasil ditemukan yakni mengenai salah satu fokus area dari GDI terkait dengan dukungan untuk menciptakan tatanan perdagangan internasional yang lebih adil dan merata untuk komoditas pangan.

Inisiatif Global Gateway juga tidak menyebutkan terkait fasilitasi perdagangan baik dalam bentuk pengurangan hambatan tarif atau non-tarif. Sebaliknya, perlu diwaspadai implikasi dan risiko dari berbagai kebijakan Uni Eropa, seperti EU Deforestation-free Products Regulation, EU Carbon Border Adjustment Mechanism, EU Net Zero Industry Act, European Chips Act yang mungkin pada batasan tertentu dapat meningkatkan biaya hambatan non-tarif.

Berbanding terbalik dengan keduanya, kerja sama terkait dengan perdagangan cukup banyak dibahas dalam dokumen FPPIP Korea Selatan yang memberikan perhatian khusus terhadap rantai pasok yang stabil dan berdaya tahan sebagai salah satu objektif. Lalu, aspek yang juga menonjol adalah pentingnya keamanan ekonomi regional dalam rantai pasok. Tidak banyak disebutkan upaya-upaya untuk menurunkan biaya perdagangan seperti kerja sama fasilitas perdagangan. Akan tetapi, terdapat inisiatif untuk memiliki sistem peringatan dini dalam kerangka multilateral khususnya untuk industri dan produk strategis. Indonesia dapat menangkap peluang dari komitmen Korea Selatan dalam mendiversifikasi hubungan ekonomi dan meningkatkan kerja sama strategis dengan negara-negara yang memiliki nilai-nilai yang sama.

Walaupun tidak menjamin akses pasar ataupun pengurangan hambatan tarif, peluang IPEF masih dapat dinilai dari ketentuan terkait penyelesaian hambatan non-tarif khususnya di dua pilar. Pada pilar 1, IPEF berupaya mendorong kerja sama administrasi dan peraturan di sektor agrikultur, serta penyederhanaan prosedur bea cukai melalui digitalisasi dokumen dan pembayaran. Pada pilar 2, IPEF berupaya mendorong koordinasi instrumen pemerintah dalam merespons krisis dan kerentanan rantai pasok melalui suatu sistem peringatan dini gangguan rantai pasok. Hasil terbaru dari perundingan IPEF di Detroit akhir Mei 2023 mengenai pembentukan Dewan Rantai Pasok, jaringan respons krisis rantai pasok, dan Dewan Penasihat untuk hak tenaga

⁹³ MoFA of Japan, "FOIP."

⁹⁴ *Ibid.*

kerja⁹⁵ dalam batasan tertentu dapat memfasilitasi komunikasi lebih intensif mengenai hambatan rantai pasok di antara negara-negara anggota.

NPFOIP Jepang relatif serupa dengan inisiatif FPPIP Korea Selatan dan IPEF. Meskipun inisiatif ini tidak memberikan konsesi selayaknya suatu kesepakatan dagang tradisional, NPFOIP tetap berpotensi menurunkan biaya perdagangan melalui inisiatif untuk mendiversifikasi proses hulu dan tengah rantai pasok komoditas kritis, digitalisasi prosedur perdagangan dan persetujuan di seluruh moda transportasi, serta membangun jejaring dan sistem komunikasi.⁹⁶ Minerals Security Partnership (MSP) merupakan salah satu bentuk inisiatif perdagangan non-tradisional yang disebutkan dalam NPFOIP⁹⁷ dan mulai diwujudkan dengan adanya kesepakatan bilateral untuk penguatan rantai pasok komoditas kritis Amerika Serikat-Jepang pada Maret 2023.⁹⁸ Indonesia dapat mengambil peluang dari potensi NPFOIP tersebut untuk meningkatkan daya saingnya dari segi fasilitasi perdagangan.

Peluang Pembiayaan Infrastruktur

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam sub-bahasan mengenai ASEAN, pembiayaan infrastruktur menjadi salah satu permasalahan besar bagi ASEAN dan negara berkembang di dunia. Pembiayaan infrastruktur menjadi semakin strategis terutama sejak Tiongkok menjalankan BRI pada tahun 2013. Oleh sebab itu menjadi wajar apabila peluang pembiayaan infrastruktur ditawarkan oleh hampir seluruh inisiatif, kecuali IPEF. Tindakan tersebut kemungkinan dilatarbelakangi oleh dua faktor. Pertama, karakteristik negara anggota IPEF yang juga menyertakan negara berkembang. Kedua, Amerika Serikat memiliki kerangka pembiayaan infrastruktur lain diantaranya Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII)⁹⁹ yang tidak menjadi cakupan bahasan tulisan ini.

Dalam konteks GDI, pembiayaan infrastruktur bergerak dalam kerangka 17 target SDGs. Berikut merupakan beberapa proyek infrastruktur yang difasilitasi oleh GDI, diantaranya pembangunan Laboratorium Pengujian Narkoba di Antigua dan Barbuda, penggalian sumur sebagai bagian dari rekonstruksi pasca bencana di Zimbabwe, dan proyek kelengkapan telekomunikasi di Suriah. Akan tetapi, secara khusus proyek GDI di Indonesia tidak membahas tentang pembiayaan infrastruktur, melainkan hanya membahas tentang implementasi SDG di tingkat lokal serta solusi perubahan iklim berbasis alam.¹⁰⁰

Sementara itu dalam konteks Global Gateway, Indonesia dijadwalkan sebagai salah satu negara penerima manfaat dari inisiatif ini di kawasan Asia Pasifik untuk tahun anggaran 2023. Secara lebih rinci, Uni Eropa berkomitmen untuk memberikan investasi melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang mencakup dua bidang,

⁹⁵ "Press Statement on the Substantial Conclusion of IPEF Supply Chain Agreement Negotiations," The United States Department of Commerce, 27 Mei, 2023, <https://www.commerce.gov/news/press-releases/2023/05/press-statement-substantial-conclusion-ipef-supply-chain-agreement>.

⁹⁶ MoFA of Japan, "FOIP."

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ The United States Trade Representative, *Agreement between The Government of The United States of America and The Government of Japan on Strengthening Critical Minerals Supply Chains*, 28 Maret, 2023 <https://ustr.gov/sites/default/files/2023-03/US%20Japan%20Critical%20Minerals%20Agreement%202023%2003%2028.pdf>.

⁹⁹ "Memorandum on the Partnership for Global Infrastructure and Investment," The White House, 26 Juni, 2022, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/06/26/memorandum-on-the-partnership-for-global-infrastructure-and-investment/>.

¹⁰⁰ MoFA PRC, "List of First-batch Projects of GDI."

yaitu 1) bidang energi dengan mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara; dan 2) bidang transportasi dengan mengembangkan rel ganda dan elektrifikasi dari kereta api di Indonesia.¹⁰¹ Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Uni Eropa berpandangan investasi strategis yang tepat bagi Indonesia dalam kerangka Global Gateway berada pada proyek terkait dua bidang di atas.

Dalam konteks FPIIP Korea Selatan, dokumen kebijakannya secara spesifik menuliskan *special strategic partnership* sebagai dasar hubungan bilateral dengan Indonesia yang mencakup perdagangan bilateral dan pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu, Indonesia perlu lebih aktif untuk memperdalam dan memanfaatkan kerja sama ekonomi internasional dengan Korea Selatan dalam cakupan aspek yang cukup luas. Saat ini Indonesia dan Korea Selatan memiliki tiga kerangka kerja sama ekonomi internasional termasuk bilateral (Indonesia-Korea CEPA), regional (ASEAN-Korea FTA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP). Dalam pengembangan dan pendanaan infrastruktur, dokumen FPIIP menjelaskan beberapa sektor utama yang menjadi fokus Korea Selatan di antaranya adalah pembuatan cetak biru kerja sama infrastruktur kendaraan listrik. Adapun sektor ini cukup sejalan dengan fokus pemerintah saat ini untuk mendorong investasi ekosistem kendaraan listrik. Pada tahun 2022, Hyundai telah melakukan investasi sebesar 1,55 Miliar Dolar AS untuk produksi mobil listrik di Indonesia. Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga memiliki perhatian terkait dengan infrastruktur yang berkelanjutan yang terkait dengan perubahan iklim dan infrastruktur kesehatan dan medis di kawasan Indo-Pasifik. Meskipun demikian, belum terdapat elaborasi lebih jauh tentang kriteria dan juga skema kerja sama infrastruktur yang ditawarkan dalam FPIIP.

Berbeda dengan mitra lain, Jepang memberikan perhatian khusus terhadap infrastruktur dalam NPFOP yang dibuktikan dengan pengulangan istilah tersebut sebanyak 80 kali sepanjang keseluruhan dokumen.¹⁰² Setidaknya terdapat tiga karakteristik peluang pendanaan infrastruktur dalam NPFOP: 1) pendanaan tersebut disalurkan melalui *Official Development Assistance* (ODA) Jepang dengan juga memperhatikan keberlanjutan hutang negara penerima dan proses yang transparan serta adil; 2) pentingnya mempromosikan investasi infrastruktur yang berkualitas sesuai dengan Prinsip G-20 terkait; 3) dukungan infrastruktur yang ditawarkan bersifat multi-dimensional mulai dari infrastruktur pengolahan limbah, komunikasi, transportasi, hingga pertahanan. Dalam pidato kebijakan di India, Perdana Menteri Kishida menyebutkan bahwa Jepang akan memobilisasi lebih dari 75 Miliar Dolar AS untuk mendukung infrastruktur di Indo-Pasifik per tahun 2030.¹⁰³ Indonesia disebutkan sudah mendapatkan manfaat pendanaan infrastruktur Jepang termasuk melalui proyek pelabuhan Patimban, MRT Rute Utara-Selatan dan Timur-Barat, serta pelabuhan perikanan.¹⁰⁴

Peluang Investasi Swasta

Investasi swasta menjadi peluang khas yang ditawarkan inisiatif Amerika Serikat dan sekutu utamanya termasuk Uni Eropa dan Jepang. Hanya inisiatif Tiongkok

¹⁰¹ European Commission, "Global Gateway EU-Asia and the Pacific flagship projects for 2023: Partnerships on Digital, Climate and Energy, Transport, Health, Education and Research," dirilis pada Maret 2023, <https://international-partnerships.ec.europa.eu/system/files/2023-04/Asia-Pac-flagship-projects-for-2023-V06.pdf>.

¹⁰² MoFA of Japan, "FOIP."

¹⁰³ Ministry of Foreign Affairs of Japan, *The Future of The Indo-Pacific – Japan's New Plan for a "Free and Open Indo-Pacific" – "Together with India, as Indispensable Partner"*, 20 Maret, 2023, <https://www.mofa.go.jp/files/100477739.pdf>.

¹⁰⁴ MoFA of Japan, "FOIP."

yang secara relatif tidak memasukkan secara eksplisit investasi swasta. Korea Selatan cenderung ambigu dalam dokumen inisiatifnya.

Tinjauan terhadap dokumen-dokumen terkait GDI tidak menemukan adanya pembahasan terkait investasi swasta sebagai salah satu fasilitas yang ditawarkan. Penyebutan pihak swasta hanya dijumpai dalam salah satu dokumen pernyataan pers, yang berbunyi tentang ajakan bagi komunitas internasional, termasuk pihak swasta untuk memberikan dukungan terhadap pemerintah Pakistan yang mendalami duka mendalam akibat rangkaian bencana alam.

Temuan serupa dijumpai pada inisiatif Korea Selatan, di mana peranan sektor swasta dan non-pemerintah lainnya seperti organisasi internasional, akademisi, organisasi masyarakat sipil hanya disebutkan dalam dokumen FPPIP sebagai kepentingan (*stakeholders*) kerja sama di kawasan Indo-Pasifik. Namun demikian, tidak begitu dielaborasi mengenai cara atau area-area investasi swasta yang akan hadir dengan inisiatif FPPIP ini.

Berbeda dengan inisiatif Tiongkok dan Korea Selatan, Uni Eropa melalui Global Gateway mendorong keterlibatan pihak swasta dalam pelaksanaan inisiatif termasuk pembiayaan dan implementasi di lapangan. Uni Eropa bahkan menyebut bahwa salah satu prinsip kunci dari Global Gateway adalah investasi dari pihak swasta. Dalam konteks IPEF, juga terdapat dua pilar di mana investasi swasta cenderung ditekankan secara eksplisit. Pada pilar 2, IPEF mendorong agar terjadinya kerja sama erat dengan swasta dalam berinvestasi pada rantai pasok logistik terutama infrastruktur. Pada pilar 3, IPEF mendorong agar adanya kemitraan publik-privat dan instrumen keuangan finansial campuran dalam berinvestasi pada proyek-proyek transisi energi dan/atau energi bersih. Pada dua pilar lainnya, peluang investasi swasta tidak secara eksplisit disampaikan.

Inisiatif NPFOP Jepang bahkan secara terstruktur menjelaskan mengenai investasi swasta. Peluang tersebut akan dihadirkan melalui tiga cara: 1) pengenalan kerangka baru untuk memobilisasi permodalan swasta bagi usaha rintisan di negara mitra; 2) mempertimbangkan amandemen Undang-Undang Bank Jepang untuk Kerja Sama Internasional (Japan Bank for International Cooperation, JBIC) agar perusahaan asing yang berkontribusi terhadap rantai pasok Jepang dapat masuk dalam portofolio pinjaman Jepang; 3) memobilisasi dukungan pendanaan infrastruktur bersama dengan dana publik.¹⁰⁵ Investasi swasta juga diproyeksikan bergerak dalam teknologi dekarbonisasi, rantai nilai pangan kelautan, digitalisasi prosedur perdagangan, dan sistem peringatan dini.¹⁰⁶

Merefleksikan keseluruhan penjelasan, tampak NPFOP menjadi inisiatif yang paling kaya akan peluang yang ditawarkan bagi Indonesia dibandingkan dengan inisiatif lain. Tampak pula bahwa tidak ada konsistensi sikap khususnya di antara negara-negara Amerika Serikat dan sekutunya khususnya berkaitan dengan inisiatif yang ditawarkan. Tidak terlihat konsensus dalam menawarkan pembiayaan infrastruktur, transfer teknologi, ataupun pengurangan biaya perdagangan.

Identifikasi Risiko dari Berbagai Inisiatif Eksternal

Seperti dua sisi koin, inisiatif konektivitas tidak hanya menghadirkan peluang tetapi turut diikuti oleh serangkaian risiko yang berpotensi menghambat partisipasi Indonesia dalam GVC. Sehubungan dengan itu, sub-bahasan ini akan mengidentifikasi tiga jenis risiko yang umumnya dapat menghambat upaya Indonesia untuk meningkatkan

¹⁰⁵ MoFA of Japan, "FOIP."

¹⁰⁶ *Ibid.*

partisipasinya di dalam GVC. Hambatan tersebut disebabkan oleh kekakuan geopolitik sehingga menjadi terbatas dalam pemilihan mitra, terjerat hutang akibat pembiayaan infrastruktur yang tidak produktif dan tidak berkelanjutan, rantai pasok yang rentan, permasalahan lingkungan dan perubahan iklim yang memburuk, ataupun tensi sosial di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengantisipasi setidaknya tiga jenis risiko berikut:

- Risiko geopolitik: risiko ini dapat terindikasi dari sejauh mana masing-masing inisiatif menekankan mengenai nilai ideologis tertentu, apakah negara pengusung memiliki kebijakan yang bersifat melepaskan, serta keberlanjutan daripada inisiatif tersebut baik karena siklus pemilihan umum atau faktor lain.
- Risiko ekonomi: risiko ini dapat terindikasi dari jenis instrumen pembiayaan yang digunakan untuk menjalankan inisiatif, aktor yang terlibat dalam kerja sama, persyaratan jaminan pemerintah, serta kerentanan rantai pasok.
- Risiko sosial dan lingkungan: risiko ini dapat terindikasi dari sejauh mana keterlibatan tenaga kerja negara pengusung dan tingkat kapasitasnya, serta sejauh mana klausul mitigasi perubahan iklim dan analisis dampak lingkungan dicantumkan secara eksplisit oleh masing-masing inisiatif.

Risiko Geopolitik

Setiap inisiatif memiliki risiko geopolitiknya masing-masing. Sebagian memiliki risiko yang relatif terkonsentrasi pada basis nilai ideologis, sementara sebagian lainnya terkonsentrasi pada basis kekhawatiran akan keberlanjutan inisiatif tersebut dalam jangka panjang. Hal yang secara konsisten melekat pada seluruh inisiatif adalah risiko geopolitik dari kebijakan domestik negara pengusung yang bersifat pelepasan.

Dari nilai ideologis, setidaknya terdapat tiga inisiatif yang menegaskan nilai ideologis yang dianut yang berpotensi menghambat fleksibilitas Indonesia dalam bermitra dengan pihak lain. Jepang secara eksplisit menyertakan nilai-nilai politik tertentu baik di dalam pidato kebijakan maupun dokumen kebijakan NPFOIP. Beberapa diantaranya adalah penekanan respons terhadap otoritarianisme digital dan perilaku hegemonik Rusia.¹⁰⁷

Tidak jauh berbeda dengan dokumen FPPIP Korea Selatan. Aspek ideologis terlihat dari beberapa penjelasan yang menekankan adanya ketidakpastian lingkungan keamanan di kawasan serta *democratic backsliding*¹⁰⁸ yang mengancam nilai-nilai universal seperti kebebasan, prinsip hukum, dan HAM. Selain itu, kompetisi geopolitik dan militer yang meningkat ditambah dengan rendahnya transparansi dan faktor kepercayaan membuat keamanan kawasan menjadi semakin beragam. Namun demikian, dokumen FPPIP menegaskan bahwa strategi ini bersifat inklusif tanpa mengecualikan negara-negara tertentu dengan syarat memiliki visi dan prinsip-prinsip kerja sama yang selaras dengan Korea Selatan. Secara spesifik, dokumen FPPIP menyebutkan senjata

¹⁰⁷ MoFA of Japan, "FOIP."

¹⁰⁸ *Democratic backsliding* merupakan degradasi kualitas demokrasi secara gradual dan berimplikasi pada peluang otokratisasi. Indikasi melemahnya demokrasi mampu ditinjau dari adanya peningkatan konsentrasi kekuasaan di tangan eksekutif yang berdampak pada berkurangnya peranan legislatif hingga regulator independen, erosi standar politik dan konstitusional, pelemahan kebebasan sipil dan kebebasan pers, serta kerusakan integritas pemilu. Kemunduran demokrasi juga didukung dengan eksistensi polarisasi politik, saat terjadi fragmentasi kubu politik, peningkatan diskriminasi dan intoleransi. Meg Russell, Alan Renwick dan Lisa James, "What Democratic Backsliding and is the UK at Risk?," *Constitution Unit UCL Department of Political Science*, Juli 2022, https://www.ucl.ac.uk/constitution-unit/sites/constitution_unit/files/backsliding_-_final_1.pdf.

nuklir dan misil Korea Utara sebagai salah satu ancaman utama tidak hanya di kawasan tapi juga seluruh dunia. Pemerintah Korea Selatan juga menyebutkan agresi militer yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina sebagai pelanggaran UN Charter yang membahayakan aspek ekonomi dan keamanan kawasan Indo-Pasifik.

Uni Eropa dengan inisiatif Global Gateway-nya pun demikian. Pertama, dalam dokumen perencanaannya, Uni Eropa dengan lugas di bagian pembuka menekankan pentingnya nilai demokrasi dalam menghadapi tantangan global.¹⁰⁹ Global Gateway akan melakukan kerja sama dan investasi serta menunjukkan bagaimana nilai-nilai demokrasi menawarkan kepastian dan keadilan bagi investor, keberlanjutan bagi negara mitra, dan manfaat jangka panjang bagi seluruh pihak yang terlibat. Uni Eropa secara tegas menyebutkan akan bekerja sama secara erat dengan negara-negara yang memiliki pemikiran yang sama, dalam aspek demokrasi, dalam rangka pengembangan konektivitas dan infrastruktur yang berkualitas. Uni Eropa turut memastikan bahwa investasi yang diberikan akan bersifat inklusif dalam kesetaraan gender.¹¹⁰ Meskipun Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia tidak secara khusus mempunyai keberpihakan pada ideologi tertentu dalam kerja sama internasionalnya. Kondisi tersebut berpotensi menjadi risiko bagi negara dengan haluan ideologi lain yang hendak bekerja sama dengan Indonesia.

Menariknya dari risiko berbasis nilai ideologis tidak ditemukan dari inisiatif yang diusung oleh dua negara besar, Amerika Serikat dan Tiongkok. Dalam peluncuran IPEF, memang disebutkan bahwa inisiatif ini bersifat inklusif dan terbuka bagi pihak lain yang ingin bergabung selama memenuhi tujuan yang ada.¹¹¹ Berbagai pernyataan tingkat menteri atas keempat pilar IPEF pun tidak ada narasi untuk mengecualikan negara dengan sistem politik tertentu. Akan tetapi, monograf melihat penilaian risiko geopolitik IPEF tidak dapat hanya mengandalkan berbagai pernyataan tersebut. Utamanya mengingat bahwa pernyataan tingkat menteri disusun dan disetujui oleh seluruh negara anggota IPEF, termasuk Indonesia.

Pada dokumen GDI tidak teridentifikasi penyebutan tentang risiko geopolitik secara langsung. Poin ketiga dalam pidato Xi mengenai ajakan memperkuat solidaritas internasional diikuti dengan pembahasan untuk mengadvokasi perdamaian, pembangunan kesetaraan, keadilan, demokrasi dan kebebasan, yang merupakan nilai-nilai utama dari kemanusiaan. Secara bersamaan Xi menyampaikan pentingnya pengedepanan dialog dan kerja sama atas dasar kesetaraan dan saling menghormati dalam menghadapi perbedaan dan konflik. Berdasarkan itu, GDI cenderung tidak memberikan batasan nilai politik terhadap anggotanya. Tambahan lagi, poin keempat pidato Xi mengangkat tentang multilateralisme yang menekankan pada sistem internasional dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai sentral.¹¹²

Dari kebijakan domestik yang bersifat pelepasan, tercatat bahwa setiap negara pengusung menjalankan kebijakan dimaksud yang berpotensi menghambat fleksibilitas

¹⁰⁹ European Commission, *Joint Communication Global Gateway*, 1.

¹¹⁰ *Ibid.*, 4.

¹¹¹ "Remarks by President Biden at Indo-Pacific Economic Framework For Prosperity Launch Event," The White House, 23 Mei, 2023, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/05/23/remarks-by-president-biden-at-indo-pacific-economic-framework-for-prosperity-launch-event/>.

¹¹² MoFA PRC, "Bolstering Confidence".

¹¹³ Scott Kennedy dan Matthew P. Goodman, "Decoupling Kabuki: Japan's Effort to Reset, Not End Its Relationship with China," *CSIS*, 28 Juli 2020, <https://www.csis.org/analysis/decoupling-kabuki-japans-effort-reset-not-end-its-relationship-china>.

Indonesia dalam bermitra dengan pihak lain. Sebagai gambaran, kebijakan domestik Jepang untuk memberikan subsidi bagi 87 perusahaan yang berniat merelokasi rantai pasoknya dari Tiongkok ke Asia Tenggara dan/atau kembali ke Jepang pada saat pandemi COVID-19,¹¹³ berpotensi memperburuk situasi walaupun kebijakan tersebut tidak semata diambil karena faktor geopolitik. Dalam pertemuan terakhir antara Menteri Luar Negeri Jepang dan Tiongkok pada awal April 2023 sudah diafirmasi bahwa Jepang tidak akan mengadopsi pendekatan pelepasan dari Tiongkok.¹¹⁴ Namun demikian, risiko geopolitik itu tetap ada utamanya dalam melihat pendekatan Jepang terhadap Rusia melalui sanksi pembekuan aset pejabat Rusia dan larangan ekspor produk ke Rusia yang memiliki fungsi ganda untuk militer.¹¹⁵

Tabel 4. Risiko Geopolitik dari Berbagai Inisiatif Eksternal

	Tiongkok	Uni Eropa	Amerika Serikat	Korea Selatan	Jepang
Inisiatif/ Peluang	Global Development Initiative	Global Gateway	Indo-Pacific Economic Framework	Free, Peaceful, Prosperous Indo-Pacific	A New Plan for Free and Open Indo-Pacific
Nilai Ideologis	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
Kebijakan Bersifat Pelepasan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Keberlanjutan dalam Jangka Panjang	Mungkin	Kurang mungkin	Kurang Mungkin	Mungkin	Mungkin
Kategori Risiko Geopolitik	Moderat	Tinggi	Moderat	Tinggi	Tinggi

Terkait dengan kebijakan pelepasan, dokumen FPIIP Korea Selatan berulang kali menjelaskan bahwa rantai pasok yang stabil dan berdaya tahan merupakan aspek yang penting dalam kawasan Indo-Pasifik. Salah satu inisiatif yang diikuti oleh Korea Selatan yakni *Chip-4 Alliance*, merupakan aliansi Amerika Serikat bersama Taiwan, Jepang dan Korea Selatan yang bertujuan untuk menjaga resiliensi rantai pasok semikonduktor.

Tren dalam berbagai dokumen kebijakan Amerika Serikat sebagai negara penggagas IPEF cukup mengkhawatirkan, termasuk Strategi Indo-Pasifik (2022), Strategi Keamanan Nasional (2022), dan Strategi Keamanan Siber Nasional (2023). Beragam dokumen tersebut menunjukkan satu tren yang sama bahwa Tiongkok

¹¹⁴ “Li Qiang Meets with Japanese Minister for Foreign Affairs Yoshimasa Hayashi,” Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 2 April 2023, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202304/t20230403_11053703.html.

¹¹⁵ Junko Suetomi, “Japan announces further sanctions against Russia,” *Sanction News*, 28 Februari 2023, <https://sanctionsnews.bakermckenzie.com/japan-announces-further-sanctions-against-russia/>.¹¹⁶ The White House, *The Indo-Pacific Strategy of the United States*, Februari 2022, <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/U.S.-Indo-Pacific-Strategy.pdf>.

¹¹⁶ The White House, *The Indo-Pacific Strategy of the United States*, Februari 2022, <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/U.S.-Indo-Pacific-Strategy.pdf>.

¹¹⁷ The White House, *National Security Strategy*, Oktober 2022, <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/11/8-November-Combined-PDF-for-Upload.pdf>.

menjadi batasan definisi “inklusif” menurut Amerika Serikat. Dalam Strategi Indo-Pasifik, Tiongkok dipandang setara dengan perubahan iklim dan pandemi sebagai ujian terhadap visi Amerika Serikat.¹¹⁶ Begitu pula dengan dikotomi demokrasi versus otokrasi yang terdapat dalam Strategi Keamanan Nasional (2022)¹¹⁷ serta penegasan Tiongkok sebagai ancaman paling luas, paling aktif, dan paling persisten terhadap Amerika Serikat dalam dokumen Strategi Keamanan Siber Nasional (2023).¹¹⁸

Kebijakan pelepasan juga dilakukan oleh Uni Eropa. Adanya invasi Rusia ke Ukraina menjadi salah satu pengubah permainan di mana Uni Eropa memutuskan untuk melakukan kebijakan pelepasan dari Rusia, khususnya dalam sektor energi, bahan mentah strategis, dan beberapa sektor lainnya.¹¹⁹ Di samping mengakui bahwa Tiongkok adalah mitra kerja sama ekonomi yang strategis, Uni Eropa juga mempertimbangkan untuk melakukan kebijakan pelepasan terhadap Tiongkok dalam rangka mengurangi kerentanan GVC-nya.

Terlepas dari adanya kritik Presiden Tiongkok terhadap proteksionisme, dalam praktiknya Tiongkok merupakan salah satu negara yang melaksanakan praktik pelepasan. Sebut saja rencana strategis *Made in China 2025* yang diluncurkan oleh pemerintah Tiongkok tahun 2015 dan *Dual Circulation Strategy* yang diumumkan oleh pemerintah Tiongkok pada 2020 bertujuan untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri dan ekspor. Selanjutnya, Tiongkok turut merilis Undang-Undang Kontrol Ekspor yang mengatur ekspor teknologi sensitif tertentu. Yang terbaru bahkan Administrasi Ruang Siber Tiongkok bahkan sudah mulai melarang pembelian produk *chip* perusahaan Amerika Serikat, *Micron Technology*, khusus untuk proyek-proyek infrastruktur kritis.¹²⁰

Dari keberlanjutan berbagai inisiatif tersebut, tampak setengahnya kemungkinan akan berlanjut. Sebagian yang berlanjut antara lain adalah NPFOIP Jepang. Arah kebijakan geopolitik ini kemungkinan terus berlanjut seiring dengan membaiknya tingkat penerimaan Perdana Menteri Kishida,¹²¹ dan kemenangan partai penguasa saat ini dalam pemilihan tingkat daerah di April 2023.¹²² Inisiatif FPPIP yang diusung oleh Pemerintahan Presiden Yoon tidak banyak melahirkan kontroversi dan dinilai sebagai penyempurnaan konsep strategi New Southern Policy yang berpusat pada strategi regional di ASEAN dan India. Dalam konteks Tiongkok, GDI tampak muncul sebagai inisiatif yang memperoleh dukungan dari semua pihak pemerintah. Fokus GDI pada pemenuhan SDGs tahun 2030 dipandang sebagai pelengkap dari inisiatif sebelumnya yang lebih berfokus pada infrastruktur, yakni BRI. Xi menjadi garda terdepan yang

¹¹⁶ The White House, *National Cybersecurity Strategy*, dirilis pada Maret 2023, <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/03/National-Cybersecurity-Strategy-2023.pdf>.

¹¹⁹ Fransisco Di Comite dan Paolo Pasimeni, “Tracking the EU decoupling from Russia,” *CEPR*, 14 April, 2023, <https://cepr.org/voxeu/columns/tracking-eu-decoupling-russia>.

¹²⁰ “China Bans Micron’s Products from Key Infrastructure over Security Risk,” *Financial Times*, dirilis pada Mei 2023, <https://www.ft.com/content/e6a8e034-cbc2-4267-9b41-b7670db7d130>.

¹²¹ Jiji, “Approval rate for Kishida’s Cabinet rises above 30% in latest poll,” *The Japan Times*, 14 April, 2023, <https://www.japantimes.co.jp/news/2023/04/14/national/kishida-cabinet-support-improve/>. Lihat juga Yuko Nakano, “A Snapshot of Japan’s 2023 Political Landscape,” CSIS, 17 April 2023, <https://www.csis.org/analysis/snapshot-japans-2023-political-landscape>.

¹²² “Japan PM Says Ruling Coalition must Deliver Before Upcoming Elections,” *Kyodo News*, 10 April 2023, <https://english.kyodonews.net/news/2023/04/eafde29611ca-japan-pm-says-ruling-coalition-must-deliver-before-upcoming-elections.html>.

¹²³ “Xi Jinping Holds Talks with President of Belarus Aleksandr Lukashenko,” Consulate General of the People’s Republic of China in Davao, 1 Maret, 2023, http://davao.china-consulate.gov.cn/eng/zgyw_10/202303/t20230303_11034766.htm.

mempromosikan keberadaan GDI. Pada saat bersamaan, unsur pemerintah lain turut secara konsisten menyampaikan narasi terkait dengan pembangunan, khususnya negara berkembang.¹²³

Dua inisiatif yang masih diragukan keberlanjutannya antara lain datang dari negara demokrasi barat yakni Amerika Serikat dan Uni Eropa. Karakteristik IPEF yang tidak melibatkan Kongres dan hanya bertumpu pada eksekutif,¹²⁴ memungkinkan inisiatif ini ditinggalkan seiring dengan pergantian pemerintahan. Keputusan administrasi Trump meninggalkan Kemitraan TPP di tahun 2017 cukup menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya untuk tidak memberikan komitmen dan energi terlalu banyak terhadap suatu inisiatif ketika keberlanjutannya masih dipertanyakan. Pencapaian tiga luaran terkait rantai pasok IPEF mungkin menjadikannya lebih berumur panjang walaupun tanpa kepemimpinan Amerika Serikat seperti dalam konteks Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Dalam konteks Uni Eropa, tidak ada kejelasan terkait keberlanjutan inisiatif Global Gateway yang berlangsung pasca tahun 2027, meskipun kontribusi besaran nilai investasinya akan naik secara signifikan. Disebutkan bahwa Global Gateway berada dalam kendali Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen. Dengan demikian, inisiatif ini didasarkan hanya pada suatu masa presidensi dan tidak memiliki rencana keberlanjutan setelah masa presidensi 2027 berakhir.

Indikator di atas tampak terindikasi bahwa inisiatif dari tiga negara, yakni Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa, memiliki risiko geopolitik yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan inisiatif dari Amerika Serikat dan Tiongkok. Hasil temuan menjadi menarik mengingat tensi geopolitik umumnya didorong oleh kompetisi antara dua negara besar.

Risiko Ekonomi

Tidak hanya risiko geopolitik, setiap inisiatif memiliki risiko ekonominya masing-masing. Risiko ekonomi bahkan menjadi tidak terhindarkan dari inisiatif konektivitas khususnya berkaitan dengan keberlanjutan hutang dan konsentrasi rantai pasok. Akan tetapi, identifikasi risiko ekonomi ini relatif lebih sulit dibandingkan risiko geopolitik mengingat keterbatasan informasi yang tersedia secara publik dalam setiap dokumen kebijakan.

Dari segi instrumen, tampak tiga inisiatif jauh lebih spesifik dalam mendeskripsikan karakteristik pendanaan proyeknya, yaitu NPFOIP, Global Gateway, GDI. NPFOIP mendeskripsikan sejumlah proyeknya merupakan pinjaman melalui bantuan

¹²⁴ "Growing Trade Policy Split Between White House and Congress Highlighted in Hearings," *ST&R*, Maret, 2023, <https://www.strtrade.com/trade-news-resources/str-trade-report/trade-report/march/growing-trade-policy-split-between-white-house-and-congress-highlighted-in-hearings>.

¹²⁶ Japan International Cooperation Agency, *Japanese ODA Loan Ex-Ante Evaluation: Patimban Port Development Project*, https://www2.jica.go.jp/en/evaluation/pdf/2022_IP-583_1_s.pdf.

¹²⁵ "Signing of Japanese ODA Loan Agreements with Indonesia: Contributing to the Strengthening of the Japan-Indonesia Partnership by Supporting Economic Growth and Climate Change Response Initiatives," Japan International Cooperation Agency, 6 April, 2023, https://www.jica.go.jp/english/news/press/2023/20230406_10e.html.

¹²⁷ Japan International Cooperation Agency, *Japanese ODA Loan Ex-Ante Evaluation: Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project (Phase 2) (II)*, https://www2.jica.go.jp/en/evaluation/pdf/2022_1942101_1_s.pdf.

¹²⁸ European Commission, *Joint Communication Global Gateway*, 9.

pembangunan Jepang dan melibatkan mekanisme antar pemerintah secara bilateral.¹²⁵ Dua proyek terkait Indonesia dalam dokumen NPFOIP antara lain pengembangan Pelabuhan Patimban tahap II¹²⁶ dan Moda Raya Terpadu (MRT) fase II¹²⁷.

Selain NPFOIP, Global Gateway juga menjabarkan pembiayaannya yang terdiri dari dua komponen, yaitu utang dan hibah melalui EFSD+.¹²⁸ Belum ditemukan sumber yang menyatakan bahwa kerja sama melalui kanal Global Gateway memberikan mekanisme utang yang tidak adil atau adanya jebakan utang. Sejauh ini, risiko semacam tersebut belum ditemukan dalam pelaksanaan kerja sama infrastruktur yang digagas oleh Uni Eropa kepada negara mitra. Selain itu, Uni Eropa akan membantu negara penerima manfaat untuk mempersiapkan modalitas yang diperlukan supaya tidak menjadikan beban ekonomi bagi negara penerima.

Berbeda dengan NPFOIP dan Global Gateway, instrumen pendanaan GDI lebih cenderung bersifat hibah dengan kerangka Global Development and South-South Cooperation Fund (GDSSCF). Tiongkok melalui lembaga bantuan pembangunan internasional mereka berkomitmen memberikan tambahan pendanaan sebesar 1 Miliar Dolar AS dari jumlah saat ini sebesar 3 Miliar Dolar AS.¹²⁹ Poin yang perlu ditekankan dalam konteks ini, yakni perlunya kehati-hatian dalam melihat pendanaan GDI secara lebih jauh, utamanya jika menggarisbawahi GDI sebagai kebijakan komplementer dari BRI yang dalam perkembangannya saat ini mengalami stagnasi. Oleh karena itu, pada gilirannya GDI sebagai inisiatif konektivitas RRT perlu dipahami secara komprehensif dengan turut memperhitungkan BRI.

Inisiatif lainnya tidak begitu lengkap dalam mengelaborasi instrumen yang digunakan. FPPIP hanya menegaskan komitmen Korea Selatan dalam meningkatkan asistensi kerja sama pembangunan di kawasan Indo-Pasifik melalui ODA dan menargetkan menjadi negara sepuluh besar dalam ODA. Akan tetapi tidak terdapat skema dan mekanisme akses pembiayaan yang ditawarkan. Begitu pula dengan instrumen pendanaan untuk proyek-proyek terkait IPEF. Amerika Serikat memang telah menganggarkan 50 Miliar Dolar AS untuk IPEF dalam Tahun Fiskal 2024.¹³⁰ Sayangnya, tidak terdapat penjelasan mengenai karakteristik proyek yang akan ditawarkan Amerika dengan mempertimbangkan kesepakatan luaran IPEF yang diharapkan rampung pada akhir tahun 2023.¹³¹

Dari segi keterlibatan pemerintah, Tabel 5 telah merangkumkan bagaimana seluruh inisiatif eksternal mengindikasikan keterlibatan baik dari segi pemerintah negara pengusung, negara penerima, ataupun keduanya. Keterlibatan pemerintah Indonesia cenderung relatif beragam di setiap inisiatif. Pemerintah Indonesia berlaku sebagai peminjam dalam kerangka proyek NPFOIP dengan Kementerian Perhubungan sebagai lembaga implementasinya. Dalam konteks proyek FPPIP, pemerintah Indonesia terindikasi berlaku sebagai fasilitator mengingat fokus Korea Selatan di antaranya adalah membuat cetak biru kerja sama infrastruktur kendaraan listrik. Dalam konteks program IPEF, pemerintah Indonesia sejauh ini hanya berlaku sebagai negosiator dari norma dan kepentingan nasional dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

¹²⁹ "Chair's Statement of the High-Level Dialogue."

¹³⁰ The White House, *Budget of the U.S.: Fiscal Year 2024* (Washington: U.S. Government Publishing Office, 2023), 11.

¹³¹ Cathleen D. Cimino-Isaacs, Kyla H. Kitamura, dan Mark E. Manyin, "Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF)," *Congressional Research Service*, 16 Juni 2023, <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12373>.

¹³² Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, *Surat Pengumuman Pelatihan dari CMATC Climate Change*, 14 Maret 2023, https://pusdiklat.bmkg.go.id/uploads/artikel/20230314_Surat_Pengumuman_Pelatihan_dari_CMATC_climate_change_2023_sign.pdf.

bertindak selaku ujung tombaknya. Dalam konteks program GDI, pemerintah Indonesia lebih cenderung berlaku sebagai penerima pengembangan kapasitas di bidang meteorologi dan klimatologi.¹³² Dalam konteks Global Gateway, pemerintah Indonesia lebih bertindak selaku penerima pengembangan kapasitas sekaligus implementasi dari investasi Uni Eropa.¹³³

Tabel 5. Risiko Ekonomi dari Berbagai Inisiatif Eksternal

	Tiongkok	Uni Eropa	Amerika Serikat	Korea Selatan	Jepang
Inisiatif/ Peluang	Global Development Initiative	Global Gateway	Indo-Pacific Economic Framework	Free, Peaceful, Prosperous Indo-Pacific	A New Plan for Free and Open Indo-Pacific
Pinjaman sebagai Instrumen	Tidak	Ya	Tidak relevan/ tidak diketahui	Tidak relevan/ tidak diketahui	Ya
Pemerintah Terlibat dalam Pelaksanaan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Prasyarat Jaminan Pemerintah	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak relevan/ tidak diketahui	Tidak
Rantai Pasok yang Terkonsentrasi	Tidak relevan/ tidak diketahui	Ya	Tidak	Tidak	Ya
Kategori Risiko Ekonomi	Rendah	Moderat	Rendah	Rendah	Moderat

Dari segi prasyarat jaminan pemerintah (*sovereign guarantee*), terindikasi bahwa secara umum tidak terdapat klausul eksplisit dalam dokumen kebijakan inisiatif GDI, IPEF, dan NPFOIP yang menyatakan prasyarat ini. Dokumen rujukan yang dirilis Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency, JICA) untuk dua proyek NPFOIP di Indonesia menegaskan tidak adanya jaminan pemerintah. Program-program GDI juga tampak tidak memiliki prasyarat minimum mengingat bentuknya yang terkadang berupa bantuan kemanusiaan dengan melibatkan organisasi internasional sebagai pihak ketiga. Dengan bentuk yang sangat renggang, IPEF juga tidak mengindikasikan persyaratan jaminan pemerintah di dalam pilar-pilarnya. Bahkan IPEF memungkinkan negara untuk tidak berpartisipasi dalam pilar yang tidak disetujui mereka. Dalam konteks Global Gateway, tidak ditemukan sumber yang menyebutkan persyaratan adanya jaminan keuangan atau sejenisnya yang harus disediakan oleh Indonesia agar Uni Eropa bisa mencairkan investasinya dalam peningkatan transportasi kereta api di Surabaya.¹³⁴ Di sisi lain, Global Gateway dan FPPIP perlu mendapatkan perhatian lebih mengingat informasi yang disediakan belum komprehensif. Poin lain yang juga penting ditekankan di sini adalah tidak adanya klausul eksplisit dalam dokumen

¹³³ "Membangun Kemitraan EU - Indonesia yang Lebih Kuat untuk Mendorong Pertumbuhan yang Berkelanjutan dan Inklusif," wawancara Thibaut Portevin oleh Arise Plus Indonesia, *Arise+ Indonesia*, Mei 2023, <https://ariseplus-indonesia.org/id/kegiatan/perspektif/membangun-kemitraan-eu-indonesia-yang-lebih-kuat-untuk-mendorong-pertumbuhan-yang-berkelanjutan-dan-inklusif.html>.¹³⁴ "International Partnerships", European Commission, diakses pada Mei 2023, https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/global-gateway/transport_en?page=0.

¹³⁴ "International Partnerships", European Commission, diakses pada Mei 2023, https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/global-gateway/transport_en?page=0.

bukan berarti tidak ada prasyarat jaminan pemerintah ketika diimplementasikan di lapangan. Pemerintah Indonesia perlu melakukan verifikasi secara berkelanjutan dalam setiap negosiasinya.

Dari segi rantai pasok, tidak terdapat pola umum di antara berbagai inisiatif eksternal. NPFOP dan Global Gateway cenderung berupaya mendiversifikasi rantai pasok hanya pada negara-negara yang berpandangan sama (*like-minded*). Konsentrasi kerja sama rantai pasok NPFOP diantaranya dilakukan melalui IPEF, MSP, dan *Supply Chain Resilience Initiative* yang diinisiasi oleh Australia, India dan Jepang.¹³⁵ Global Gateway memiliki pola serupa, yakni dengan penekanan terhadap elemen keamanan rantai pasok dan sinergi bersama negara anggota G-7.¹³⁶

FPPIP dan IPEF cenderung berada di tengah dari segi mengupayakan diversifikasi rantai pasok. Tidak ditemukan secara eksplisit arah strategi dalam FPPIP yang berpotensi meningkatkan konsentrasi yang dapat mengakibatkan menurunnya ketahanan rantai pasok di Indonesia. Hal ini mengingatkan komitmen Korea Selatan untuk menjadikan FPPIP sebagai strategi yang inklusif. Serupa dengan itu, tendensi rantai pasok yang diciptakan oleh IPEF juga bersifat terdiversifikasi dengan inklusif mengingat keragaman karakteristik negara IPEF dan sifatnya yang multilateral. Catatan yang perlu menjadi perhatian adalah risiko tersebut akan sangat jauh berbeda ketika mempertimbangkan pandangan domestik Amerika Serikat yang memperjuangkan rantai pasok agar terkonsentrasi pada negara yang berpandangan sama.¹³⁷ Dalam konteks GDI, rantai pasok relatif tidak sepenuhnya relevan mengingat fokus program-programnya lebih pada SDGs dan bukan pada perdagangan ataupun infrastruktur.

Walaupun dengan keterbatasan informasi yang ada, setidaknya dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa Global Gateway dan NPFOP memiliki risiko ekonomi moderat dibandingkan dengan inisiatif lainnya. Terdapat tiga alasan yang melatarbelakangi penilaian ini. Pertama, kedua inisiatif menggunakan pinjaman sebagai instrumen pendanaan. Kedua, diversifikasi rantai pasok yang dibayangkan dalam dua inisiatif ini cenderung terbatas. Ketiga, informasi yang disajikan relatif lebih tersedia. Peninjauan terhadap risiko ekonomi dari tiga inisiatif lain, yakni GDI, FPPIP, dan IPEF, harus terus dilakukan seiring dengan perkembangan kebijakan di negara pengusung.

Risiko Sosial dan Lingkungan

Risiko lain yang tidak dapat dihindarkan dari suatu inisiatif eksternal adalah risiko sosial dan lingkungan. Risiko ini menjadi penting mengingat tren kebijakan dunia saat ini yang cenderung menerapkan standar khusus baik di bidang tenaga kerja maupun lingkungan. Sehingga, potensi daya saing Indonesia akan berkurang apabila tidak mengikuti standar-standar tersebut. Di sisi lain, terdapat kepentingan Indonesia juga untuk memastikan agar proyek-proyek dalam setiap inisiatif eksternal tidak menimbulkan tensi sosial di kalangan masyarakat akar rumput dan merusak lingkungan.

¹³⁵ MoFA of Japan, "FOIP."

¹³⁶ European Commission, *Joint Communication Global Gateway*.

¹³⁷ The White House, *Building Resilient Supply Chains, Revitalizing American Manufacturing, and Fostering Broad-Based Growth: 100-Day Reviews under Executive Order 14017*, Juni, 2021, <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/06/100-day-supply-chain-review-report.pdf>.

Tabel 6. Risiko Sosial dan Lingkungan dari Berbagai Inisiatif Eksternal

	Tiongkok	Uni Eropa	Amerika Serikat	Korea Selatan	Jepang
Inisiatif/ Peluang	Global Development Initiative	Global Gateway	Indo-Pacific Economic Framework	Free, Peaceful, Prosperous Indo-Pacific	A New Plan for Free and Open Indo-Pacific
Tenaga Kerja dari Negara Pengusung	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tingkat Kapasitas Tenaga Kerja	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Standar Tenaga Kerja	Tidak relevan/ tidak diketahui	Ya	Ya	Tidak relevan/ tidak diketahui	Ya
Komitmen terhadap dampak lingkungan	Tidak relevan/ tidak diketahui	Ya	Ya	Tidak relevan/ tidak diketahui	Ya
Komitmen terhadap mitigasi iklim	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Kategori Risiko Ekonomi	Moderat	Moderat	Rendah	Rendah	Rendah

Dari segi pelibatan tenaga kerja negara pengusung, risiko ini secara umum tidak dapat dihindarkan mengingat seluruh inisiatif menawarkan peluang peningkatan kapasitas bagi Indonesia. Namun demikian, persoalan ini idealnya tidak perlu memberikan kekhawatiran berlebih mengingat keterampilan yang dibawa kemungkinan besar berbeda dengan keterampilan masyarakat akar rumput secara umum. Dalam konteks proyek NPFOP, tenaga kerja Jepang yang terlibat cenderung berketerampilan tinggi, termasuk insinyur dan pakar.¹³⁸ Jepang turut memitigasi risiko tensi sosial dengan masyarakat lokal melalui pelaksanaan konsultasi, permintaan persetujuan, mekanisme untuk merespons keluhan, pemberian kompensasi, serta pemulihan lingkungan sekitar.¹³⁹

Walaupun FPPIP tidak serta menjelaskan mengenai tenaga kerja migran dari Korea Selatan secara spesifik, bidang area kerja samanya yang lebih berfokus pada teknologi tinggi relatif memberikan dasar keyakinan bahwa tensi sosial relatif dapat diminimalisasi. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pekerja asal Korea Selatan yang datang ke Indonesia juga lebih banyak berketerampilan menengah ke atas. Penekanan FPPIP mengenai pentingnya hubungan *people-to-people* antara Korea Selatan dengan kawasan melalui diplomasi *soft power* diyakini dapat mengendalikan risiko tensi sosial di tengah masyarakat.

Dalam konteks IPEF, tidak terdapat kesepakatan yang memudahkan mobilitas tenaga kerja antara negara anggotanya. Kalaupun ada tenaga kerja dari negara IPEF yang datang ke Indonesia kemungkinannya lebih bersifat berketerampilan tinggi

¹³⁸ MoFA of Japan, "FOIP."

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ Millenium Challenge Corporation, "Star Report Indonesia," Agustus, 2019, <https://assets.mcc.gov/content/uploads/report-2019001228901-indonesia-star-report-.pdf>.

dan dalam waktu terbatas sebagaimana dicanangkan dalam konteks *IPEF Upskilling Initiative*. Merujuk pada inisiatif Amerika Serikat sebelumnya seperti *Millenium Challenge Compact* (2011-2019), tidak terdapat catatan buruk mengenai tensi di tengah masyarakat.¹⁴⁰

Global Gateway tidak jauh berbeda. Uni Eropa melalui *Team Europe* akan membawa tenaga ahli dari Eropa untuk memberikan bantuan teknis kepada negara penerima manfaat dalam aspek peningkatan kapasitas. Mengingat keterampilan dan keahlian tinggi (*high-skilled labours*) dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur inisiatif Uni Eropa ini, sumber daya Indonesia perlu dipersiapkan dengan baik agar dapat menjawab harapan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal.

Dalam konteks GDI, terindikasi bahwa proyek-proyek yang ada cenderung tidak melibatkan tenaga kerja Tiongkok dengan keterampilan rendah dalam jumlah besar melainkan tenaga kerja ahli dalam jumlah kecil. Hal ini dikarenakan proyek tersebut berbentuk hibah barang, pengembangan kapasitas, penelitian dan pengembangan (litbang), dan rekonstruksi pasca bencana. Namun demikian, sentimen negatif yang telah berkembang di masyarakat Indonesia terkait dengan tenaga kerja asing Tiongkok dalam konteks inisiatifnya sebelumnya, BRI, tetap perlu menjadi pertimbangan dalam melihat GDI.

Dari segi standar tenaga kerja, tidak semua inisiatif eksternal mewajibkan diadopsinya standar tertentu. Informasi yang sejauh ini belum begitu komprehensif tampak pada inisiatif GDI dan FPPIP. Sementara, negara-negara G-7 tampak memiliki pandangan yang tersendiri terkait standar tenaga kerja. Dalam konteks IPEF, hasil kesepakatan yang terbaru menunjukkan adanya keinginan Amerika Serikat untuk mulai mempromosikan nilai-nilai tenaga kerjanya melalui Dewan Penasihat IPEF untuk Hak - Hak Tenaga Kerja.¹⁴¹ Dalam konteks Global Gateway, prinsip yang ada menekankan bahwa penghormatan bagi hak asasi manusia, seperti penguatan kesetaraan gender, dan perlindungan bagi pekerja adalah mutlak. Presiden Komisi Eropa von der Leyen bahkan menyatakan pelarangan produk-produk di pasar yang merupakan hasil dari sistem kerja paksa.¹⁴² Dalam konteks NPFOIP, Jepang juga mengagendakan promosi “bisnis dan HAM” untuk diadopsi sebagai nilai internasional.¹⁴³

Dari segi komitmen terhadap lingkungan, seluruh inisiatif secara umum mengindikasikan kehendak untuk bekerja sama di bidang mitigasi perubahan iklim. Namun sebagian inisiatif belum memberikan informasi secara komprehensif mengenai bagaimana langkah-langkah pengurangan dampak lingkungan dilakukan dalam proyeknya. Sebagian inisiatif tersebut di antaranya adalah FPPIP dan GDI. Dokumen FPPIP menekankan area kerja sama internasional dalam perubahan iklim dan teknologi hijau merupakan fokus area kerja sama contohnya melalui ASEAN-ROK Dialogue on Environment and Climate Change. Dokumen-dokumen GDI juga menunjukkan perhatian Tiongkok terhadap perubahan iklim. Adapun hingga saat ini teridentifikasi tujuh proyek terkait isu perubahan iklim yang berada di bawah payung GDI. Satu proyek berskala global, satu proyek berada di kawasan Afrika, dan lima proyek berada di kawasan Asia Pasifik, dengan dua diantaranya berada di ASEAN.¹⁴⁴

¹⁴¹ “Press Statement on the Substantial Conclusion of IPEF Supply Chain Agreement Negotiations,” U.S. Embassy and Consulates in Indonesia, 31 Mei, 2023, <https://id.usembassy.gov/press-statement-on-the-substantial-conclusion-of-ipef-supply-chain-agreement-negotiations/>.

¹⁴² “2021 State of the Union Address by President von der Leyen”, European Commission, 15 September, 2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/SPEECH_21_4701.

¹⁴³ MoFA of Japan, “FOIP.”

¹⁴⁴ MoFA PRC, “List of First-batch Projects of GDI”.

Sementara itu, inisiatif negara-negara anggota Group of Seven (G7) menegaskan upaya lebih dalam mengendalikan dampak lingkungan. Jepang di antaranya berkomitmen untuk melakukan analisis dampak lingkungan dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen dua proyek berkaitan NPFOIP. Jepang berupaya memastikan agar lokasi Pelabuhan Patimban dan MRT tidak terletak pada kawasan lindung, dilengkapi dengan upaya pengurangan polusi suara/ debu/air, serta mampu berkontribusi terhadap pengurangan emisi GRK.¹⁴⁵

Global Gateway juga selalu menekankan pentingnya penilaian terhadap dampak lingkungan dalam pembangunan proyek infrastrukturnya. Uni Eropa memastikan bahwa proyek mereka tidak akan membahayakan lingkungan sekitar serta mendorong pengembangan energi hijau. Global Gateway bertujuan untuk melakukan investasi baik dari sisi mitigasi maupun ketahanan iklim yang sangat memengaruhi aspek krusial kehidupan lainnya, seperti makanan, kesehatan, keamanan insani, mitigasi perubahan iklim, dan sebagainya.

IPEF juga menunjukkan adanya komitmen terhadap lingkungan pada pilar perdagangan dan rantai pasok. Secara khusus, klausul yang ada dalam kedua pilar berupaya untuk mendorong agar negara-negara anggota mempromosikan peraturan-peraturan dan inisiatif yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, juga terdapat pilar khusus energi bersih yang terdiri dari kerja sama transisi energi dan dekarbonisasi ekonomi.

Sesuai Tabel 6, tampak seluruh inisiatif eksternal memiliki lanskap risiko lingkungan yang relatif sama. Namun demikian yang membedakannya adalah lanskap risiko sosial antara lain standar tenaga kerja dan pengalaman terkait tenaga kerja yang dibawa oleh negara pengusung gagasan. GDI memiliki risiko lebih moderat dikarenakan pengalaman hubungan ketenagakerjaan Indonesia-Tiongkok dalam proyek-proyek BRI. Sementara, Global Gateway memiliki risiko lebih moderat dikarenakan standar tenaga kerja yang ada relatif menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk mengikuti. Ketidaksiapan yang ada membuat standar tersebut lebih sebagai risiko dibandingkan peluang.

Di sisi lain, NPFOIP, IPEF, dan FFPIP masih berada pada lanskap risiko rendah. FPPIP belum tampak menekankan pada standar tenaga kerja tertentu dan tidak juga memiliki pengalaman ketenagakerjaan buruk terkait inisiatif sebelumnya, New Southern Policy. Walaupun NPFOIP dan IPEF memiliki standar tenaga kerja, keduanya masih bersifat promosi ataupun anjuran tanpa adanya penekanan tertentu.

Risiko Keseluruhan dari Berbagai Inisiatif Eksternal

Bagian ini pada akhirnya tidak menyimpulkan bahwa partisipasi dalam inisiatif yang satu lebih baik dari partisipasi di inisiatif lainnya. Bagian ini lebih bertujuan untuk menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap inisiatif dan juga setiap proyek di dalamnya. Meskipun tidak diberikan bobot dalam penilaian kategori risiko, risiko geopolitik layak mendapatkan tempat tersendiri mengingat kontestasi geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang melatarbelakangi adanya berbagai inisiatif eksternal ini. Risiko ekonomi juga sangat kritis apabila Indonesia ingin memperkuat ketahanan untuk menghadapi dinamika global. Sementara, risiko sosial dan lingkungan juga tidak boleh dilupakan dalam meningkatkan partisipasi Indonesia pada rantai pasok global.

Secara spesifik, bagian ini melihat bahwa risiko geopolitik dan sosial-lingkungan perludiantisipasi lebih baik ketika Indonesia berpartisipasi dalam GDI. Dalam partisipasinya di Global Gateway, risiko secara keseluruhan memang penting diantisipasi Indonesia walaupun kategori risiko geopolitik relatif lebih tinggi. Dalam partisipasinya di IPEF, risiko

¹⁴⁵ JICA, *Patimban Port*. Lihat juga JICA, *MRT Phase II*.

geopolitik perlu menjadi perhatian utama Indonesia sebagaimana partisipasinya dalam dua inisiatif tingkat kawasan yang lain yakni FPPIP dan NPFPIP. Apabila Indonesia dapat mengelola peluang dan risiko inisiatif ini dengan baik, kemungkinan akan mempercepat ASEAN mencapai skala konektivitas yang lebih diharapkan.

Tabel 7. Risiko Keseluruhan dari Berbagai Inisiatif Eksternal

	Tiongkok	Uni Eropa	Amerika Serikat	Korea Selatan	Jepang
Inisiatif	Global Development Initiative	Global Gateway	Indo-Pacific Economic Framework	Free, Peaceful, Prosperous Indo-Pacific	A New Plan for Free and Open Indo-Pacific
Risiko Geopolitik	Moderat	Tinggi	Moderat	Tinggi	Tinggi
Risiko Ekonomi	Rendah	Moderat	Rendah	Rendah	Moderat
Risiko Sosial dan Lingkungan	Moderat	Moderat	Rendah	Rendah	Rendah

Modal Indonesia dalam Menghadapi Kompetisi Global

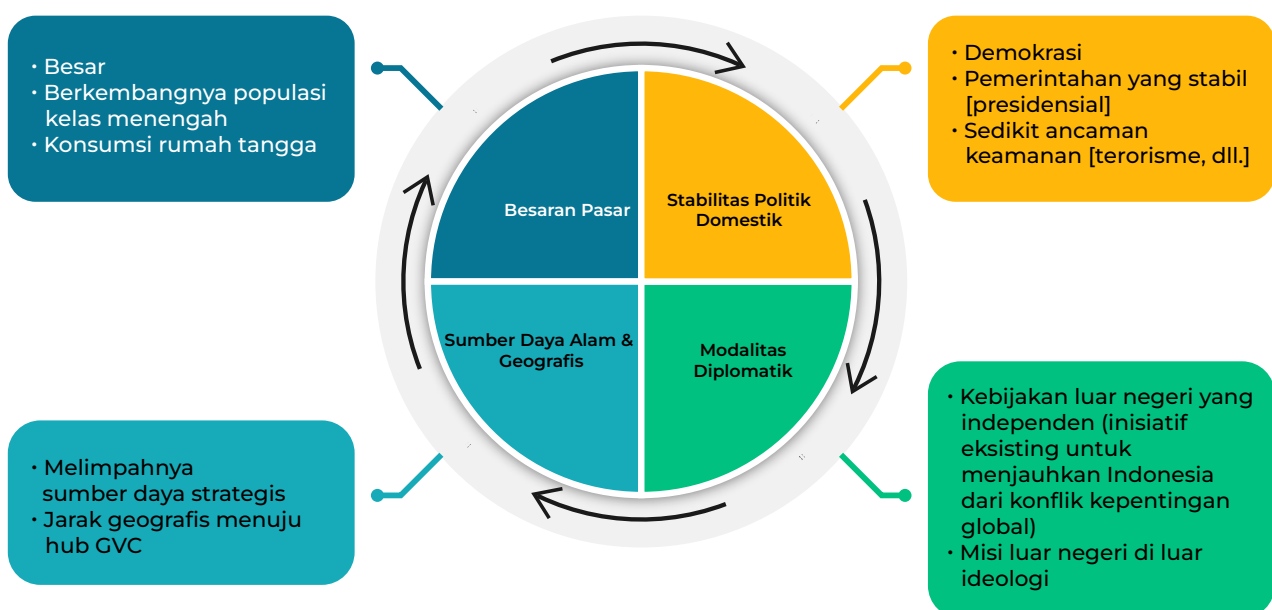
Terlepas dari berbagai peluang dan risiko berbagai inisiatif konektivitas tersebut, Indonesia tidak serta merta dapat mengelola semuanya. Kemampuan Indonesia sangat ditentukan oleh faktor penguangkit dan penghambat sebagaimana dijelaskan dalam bagian ini. Pembahasannya akan dibagi ke dalam tiga struktur, yaitu konteks, perbandingan dengan negara ASEAN terpilih, serta refleksi terhadap inisiatif yang ada.

Terdapat empat poin utama terkait faktor penguangkit dan penghambat bagi Indonesia. **Pertama**, faktor penguangkit atau penghambat bagi Indonesia untuk berpartisipasi lebih dalam GVC mungkin tidak selalu sejalan dengan faktor penguangkit atau penghambat bagi Indonesia untuk mendapatkan manfaat dari beragam inisiatif geopolitik yang ada. Aspek kebaruan dari tulisan ini adalah mencoba untuk melihat kekuatan dan hambatan Indonesia dilihat dengan perspektif geopolitik dan ekonomi. **Kedua**, faktor penguangkit atau penghambat tidak selamanya akan memegang status tersebut. Pada titik tertentu, faktor penguangkit dapat berubah menjadi faktor penghambat begitu pula sebaliknya. **Ketiga**, faktor penguangkit tidak bersifat absolut sehingga faktor-faktor tersebut perlu dilihat dalam konteks apabila dibandingkan dengan negara lain atau dalam kondisi tertentu seperti COVID-19. **Keempat**, sangat mungkin terdapat faktor-faktor lain di luar pembahasan yang belum tercakup dalam tulisan ini. Faktor-faktor yang ada dalam tulisan ini berpatokan pada kajian GVC sebelumnya: OECD (2015), UNIDO (2018), ADB Institute (2020), World Bank (2020), dan WTO (2021).

Faktor Penguangkit

Secara garis besar, Indonesia memiliki empat faktor penguangkit untuk mendapatkan keuntungan dari beragam inisiatif yang ada. Keempat faktor penguangkit tersebut antara lain besaran pasar, sumber daya alam dan letak geografis yang strategis, stabilitas politik, serta modalitas diplomatik.

Bagan 19. Faktor Penguangkit



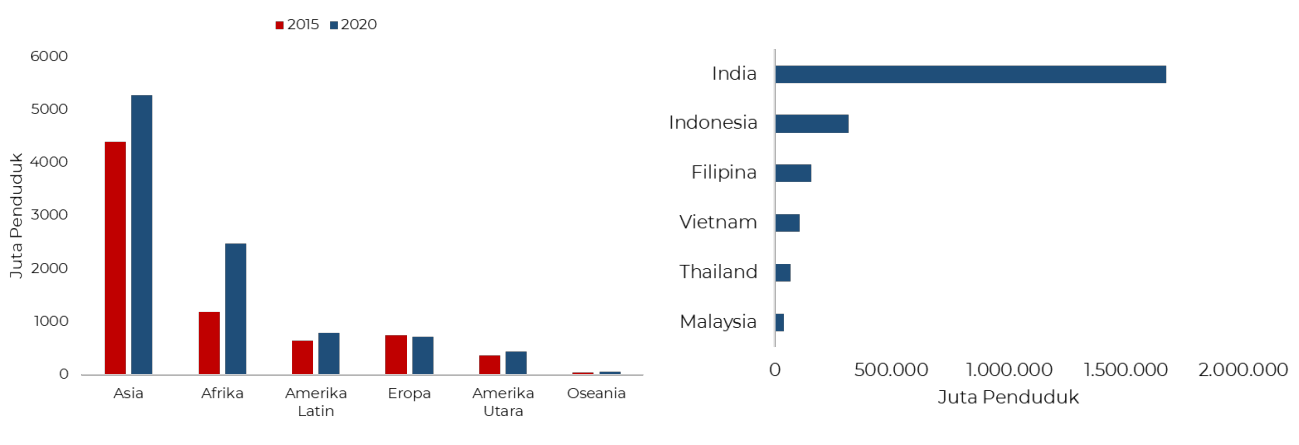
Besaran Pasar (*Market Size*)

Dalam menavigasi inisiatif konektivitas global, besaran pasar dan pertumbuhan ekonomi menjadi daya tarik dan kekuatan ekonomi strategis Indonesia. Terdapat dua elemen utama pembentuk faktor besaran pasar sebagai modal Indonesia untuk bergabung dalam inisiatif-inisiatif konektivitas global. Pertama, kapasitas industri yang besar seiring dengan besarnya penduduk usia produktif sebagai potensi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh proyek-proyek strategis dan dunia usaha. Data BPS pada tahun 2022 menyebutkan bahwa jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai sekitar 144 juta jiwa atau hampir 70% dari total penduduk usia kerja. Kedua, meningkatnya daya beli kelompok menengah juga menjadi salah satu alasan investor luar negeri dalam berinvestasi di Indonesia.

Pada tahun 2030, BPS memprediksi Indonesia akan memiliki bonus demografi yang merupakan periode di mana jumlah populasi produktif sebuah negara melebihi jumlah populasi non-produktif.¹⁴⁶ Fenomena ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena jumlah tenaga kerja untuk mendukung aktivitas produksi akan meningkat. Sisi konsumsi juga akan meningkat karena sejalan dengan meningkatkan populasi yang bekerja berarti bahwa masyarakat terdapat kecenderungan konsumsi yang juga meningkat. Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang yang berjalan seiring dengan bertumbuhnya populasi mereka mengakibatkan munculnya masyarakat berpendapatan menengah yang diprediksi akan menjadi mayoritas penduduk kawasan Asia Timur-Tenggara, termasuk Indonesia, di 2050.¹⁴⁷

Proyeksi populasi sebagaimana di atas menghadirkan daya tarik bagi keterlibatan aktor-aktor asing, meskipun juga berpotensi menimbulkan pengangguran yang lebih tinggi. Untuk itu, pemerintah perlu mendorong penciptaan lapangan kerja, yang dapat dilakukan dengan menarik investasi luar negeri dengan fokus pada sektor padat karya. Oleh sebab itu, kerja sama ekonomi internasional yang berorientasi pada penciptaan lapangan pekerjaan formal yang berkualitas ini sangat diperlukan untuk menyerap tenaga kerja dengan keterampilan dasar dan menengah.¹⁴⁸ Potensi dari inisiatif-inisiatif konektivitas global ini perlu dimaksimalkan untuk dapat menyerap tenaga kerja dan memberikan *spillover effect* kepada perekonomian lokal khususnya proyek-proyek infrastruktur.

Bagan 20. Jumlah Populasi 2015 dan 2020 (kiri) dan Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2050 (kanan)¹⁴⁹



¹⁴⁶ Tusianti et al., *Analisis Profil Penduduk Indonesia: Mendeskripsikan Peran Penduduk dalam Pembangunan* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022), 55.

⁴⁷ Bappenas, *Background Study: Visi Indonesia 2045* (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2019), 14.

¹⁴⁸ Frederico Gil Sander dan Pui Shen Yoong, *Structural Transformation and Labor Productivity in Indonesia: Where are All the Good Jobs* (Washington DC: The World Bank Group, 2022), 4.

Di ASEAN sendiri, jumlah penduduk pada tahun 2023 mencapai hampir 700 juta dan Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar yang menyumbang sekitar 40% dari total penduduk di ASEAN. Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat. Kondisi tersebut memperlihatkan signifikansi dan faktor strategis yang dimiliki oleh Indonesia sebagai salah satu daya tawar dalam persaingan geopolitik.

Sebagaimana terlihat pada Bagan 20, komposisi penduduk dunia akan mengalami perubahan sejalan dengan melambatnya pertumbuhan penduduk dan berlangsungnya fase penuaan yang terjadi, termasuk di Indonesia pada tahun 2050. Fenomena tersebut menyebabkan proporsi penduduk dengan usia lanjut akan meningkat dua kali lipat. Beberapa negara seperti negara-negara Eropa dan negara berpendapatan tinggi di Asia mengalami pertumbuhan penduduk negatif atau dengan kata lain penurunan jumlah penduduk. Sementara itu, benua Afrika menjadi penyumbang pertumbuhan penduduk terbesar dengan proporsi penduduk usia muda yang masih cukup signifikan. Pada tahun 2050, Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 324 juta di tahun 2045.¹⁵⁰

Tumbuh pesatnya penduduk kelas menengah dunia juga menjadi salah satu potensi ekonomi yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia. Negara-negara berkembang seperti Tiongkok, India dan Brasil yang memiliki pertumbuhan ekonomi relatif tinggi serta populasi kelas menengah dan produktif yang besar akan menjadi kekuatan ekonomi di masa depan. Oleh sebab itu, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara dengan PDB keempat terbesar di dunia setelah Tiongkok, Amerika Serikat dan India.¹⁵¹

Dengan demikian, besarnya pasar domestik dan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil merupakan faktor penting bagi Indonesia untuk dapat mengambil keuntungan dari inisiatif-inisiatif konektivitas, khususnya yang menekankan pada aspek perdagangan, investasi serta peningkatan kapasitas tenaga kerja. Misalnya, investasi proyek-proyek infrastruktur logistik dari NPF0IP Jepang dan energi dari Global Gateway Uni Eropa dapat mendukung kinerja logistik secara menyeluruh, memperbaiki fasilitasi perdagangan serta potensi pendanaan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sertapotensi akses pasar bagi Indonesia dan negara-negara mitra. Inisiatif FPPIP secara khusus melihat potensi pasar kendaraan listrik di ASEAN dan Indonesia sehingga merupakan mitra strategis bagi Indonesia dalam membangun ekosistem produksi kendaraan listrik.

Stabilitas Politik Domestik

Modalitas lain Indonesia untuk mengelola peluang dan risiko dari berbagai inisiatif konektivitas eksternal adalah stabilitas politik domestik. Sejak pemilihan umum langsung di tahun 2004, konstelasi politik dalam negeri relatif stabil walaupun terdapat juga sanggahan bahwa kondisi yang berlangsung cenderung stagnan.¹⁵² Terlepas dari perdebatan tersebut, stabilitas politik idealnya memberikan kesempatan bagi kepemimpinan nasional untuk memastikan kebijakannya berjalan hingga akhir masa pemerintahan. Instabilitas politik kemungkinan besar akan membatasi pertumbuhan

¹⁴⁹ Diolah dari "United Nations 'Global Issues: Population'," diakses pada 18 Januari 2023, <https://www.un.org/en/global-issues/population>.

¹⁵⁰ "Bappenas Luncurkan Proyeksi Penduduk 2020-2050," *Tempo Nasional*, dirilis pada 16 Mei 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1726510/bappenas-luncurkan-proyeksi-penduduk-2020-2050>.

¹⁵¹ Kevin Daly dan Tadas Gedminas, "The Path to 2075: Slower Global Growth but Convergence Remains Intact," *Goldman Sachs*, 6 Desember, 2022, <https://www.goldmansachs.com/intelligence/pages/gs-research/the-path-to-2075-slower-global-growth-but-convergence-remains-intact/report.pdf>.

¹⁵² Marcus Mietzner, "INDONESIA: Yudhoyono's Legacy between Stability and Stagnation," (2012): 121.

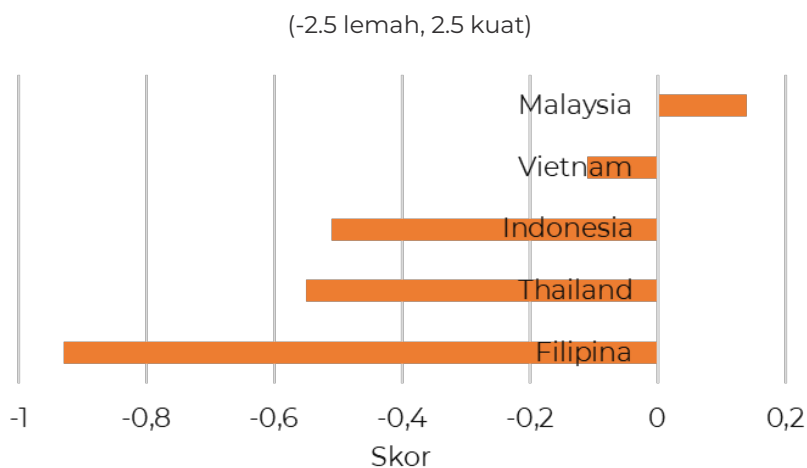
faktor produktivitas total yang berujung pada rendahnya pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil per kapita.¹⁵³

Karakteristik khas konstelasi partai politik domestik juga dalam batasan tertentu dapat memberikan modalitas bagi Indonesia. Sebagaimana ditekankan oleh Fossati et. al (2020), perbedaan antara partai-partai domestik lebih terkonsentrasi pada isu-isu kultural-religius dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi.¹⁵⁴ Di satu sisi, kemiripan pandangan ini dapat mengurangi risiko terjadinya kebuntuan antara eksekutif-legislatif atas suatu kebijakan ekonomi atau memungkinkan adopsi kebijakan secara lebih cepat. Di sisi lain, pertanyaan berkaitan dengan kualitas kebijakan ekonomi tersebut serta bagaimana elemen religius semakin memengaruhi ekonomi pasca kegiatan politik di tahun 2014, 2017, 2019 masih perlu dijawab.

Kehadiran organisasi masyarakat sipil juga dapat membantu memperkuat stabilitas politik domestik. Khususnya organisasi yang secara konsisten mempromosikan pandangan moderasi beragama termasuk Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah,¹⁵⁵ menjadi penting dalam keberagaman masyarakat. Sebagaimana disebutkan oleh Nasr (2005), Islam yang lebih moderat di Indonesia kemungkinan besar berkorelasi dengan lebih partisipatifnya Indonesia dalam ekonomi global dibandingkan dengan negara Asia Selatan.¹⁵⁶ Ruck, Bentley, dan Lawson (2018) juga mengafirmasi bahwa toleransi terhadap ekspresi individu berkorelasi dengan pertumbuhan PDB yang lebih baik.¹⁵⁷

Stabilitas politik domestik tentu tidak menjadi modalitas absolut bagi Indonesia apabila membandingkannya dengan negara-negara di kawasan. Merujuk pada data *Worldwide Governance Indicators* dari Bank Dunia (2021), Indonesia masih menempati posisi yang relatif tertinggal dibandingkan dengan dua negara ASEAN lain, yaitu Malaysia dan Vietnam. Sejauh ini, Indonesia hanya dipersepsikan stabilitas politiknya lebih baik dibandingkan dengan Thailand dan Filipina.

Bagan 21. Estimasi Stabilitas Politik dan Ketiadaan Kekerasan/Terrorisme di Sejumlah Negara ASEAN 2021¹⁵⁸



¹⁵³ Ari Aisen dan Francisco Jose Veiga, *How Does Political Instability Affect Economic Growth?*, (IMF Working Paper, 2011), 1.

¹⁵⁴ Fossati et al., "Ideological representation in clientelistic democracies: The Indonesian case," *Electoral Studies* 63 (2020): 2.

¹⁵⁵ Alexander R. Arifianto, "The State of Political Islam in Indonesia," *Asia Policy* 15, no. 4 (2020): 114.

¹⁵⁶ Vali Nasr, "The Rise of "Muslim Democracy," *Journal of Democracy* 16, no. 2 (2005): 19.

¹⁵⁷ Ruck et al., "Religious change preceded economic change in the 20th century," *Science Advances* 4 (2018): 3.

Catatan penting bagi Indonesia adalah stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan/terorisme tidak hanya berdasarkan pada selesainya masa jabatan satu pemerintahan hingga periode seharusnya. Jika demikian adanya, maka seharusnya skor Indonesia akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia yang memiliki tiga Perdana Menteri antara tahun 2018-2021.¹⁵⁹

Stabilitas politik domestik secara umum merupakan modal penting bagi Indonesia untuk mengambil peluang dari kelima inisiatif. Secara khusus, stabilitas politik domestik memungkinkan Indonesia memiliki nilai lebih ketika mengambil peluang investasi swasta sebagaimana yang ditawarkan oleh inisiatif konektivitas Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Dengan stabilitas politik domestik yang ada, kepemimpinan nasional Indonesia juga dapat berkonsentrasi menghadapi risiko geopolitik dan memiliki fleksibilitas dalam menentukan respons kebijakan atas risiko ekonomi.

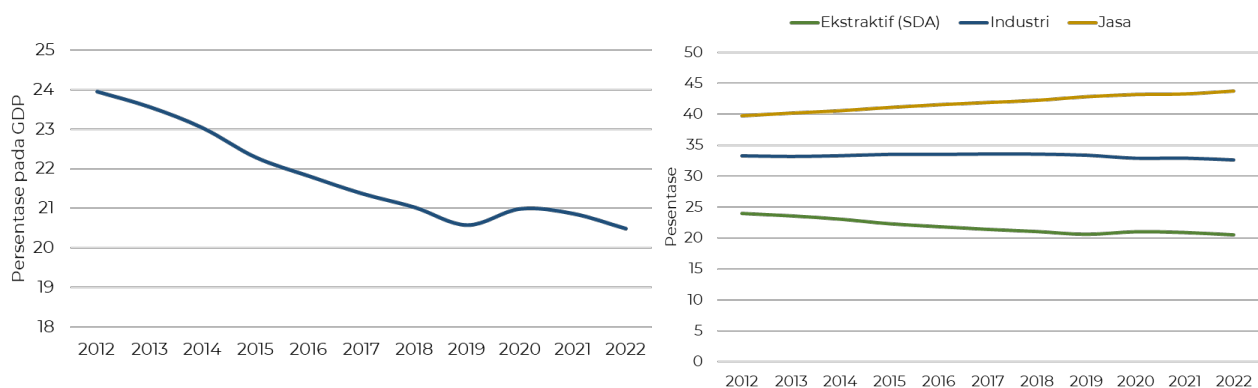
Sumber Daya Alam dan Geografi

Tidak perlu diragukan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam (SDA) berlimpah. Kondisi tersebut tercermin dalam posisi awal Indonesia dalam GVC yang telah dibahas pada bagian awal monograf ini. Secara umum, ekspor Indonesia masih didominasi oleh barang mentah.

Dominasi barang mentah dalam ekspor Indonesia bukan suatu yang buruk. Di satu sisi, barang mentah dapat dilihat sebagai titik awal dari sebuah GVC. Oleh sebab itu negara-negara lain membutuhkan barang mentah dari Indonesia untuk diolah lebih lanjut sehingga cenderung sulit untuk mengucilkan Indonesia dari GVC. Di sisi lain, posisi Indonesia di hulu membuka ruang untuk integrasi vertikal lebih lanjut secara domestik untuk mengolah barang mentah dimaksud dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi. Dalam konteks ini, kekayaan SDA Indonesia menghadirkan potensi yang dapat diungkit melalui integrasi lebih intensif dalam GVC.

Akan tetapi, perkembangan menunjukkan terdapat penurunan kontribusi SDA terhadap nilai tambah bruto Indonesia selama periode 2012 – 2022. Meskipun penurunan mengalami perlambatan selama periode 2019–2022 karena adanya *commodity boom* pasca Covid-19, fenomena tersebut tidak cukup mendongkrak kontribusi komoditas terhadap nilai tambah bruto Indonesia.

Bagan 22. Perbaikan Kontribusi Nilai Tambah Bruto Sektorial SDA dan Non-SDA Indonesia¹⁶⁰



¹⁵⁸ Diolah dari "Worldwide Governance Indicators 2021," *The World Bank*, dirilis pada 2021, <https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators>.

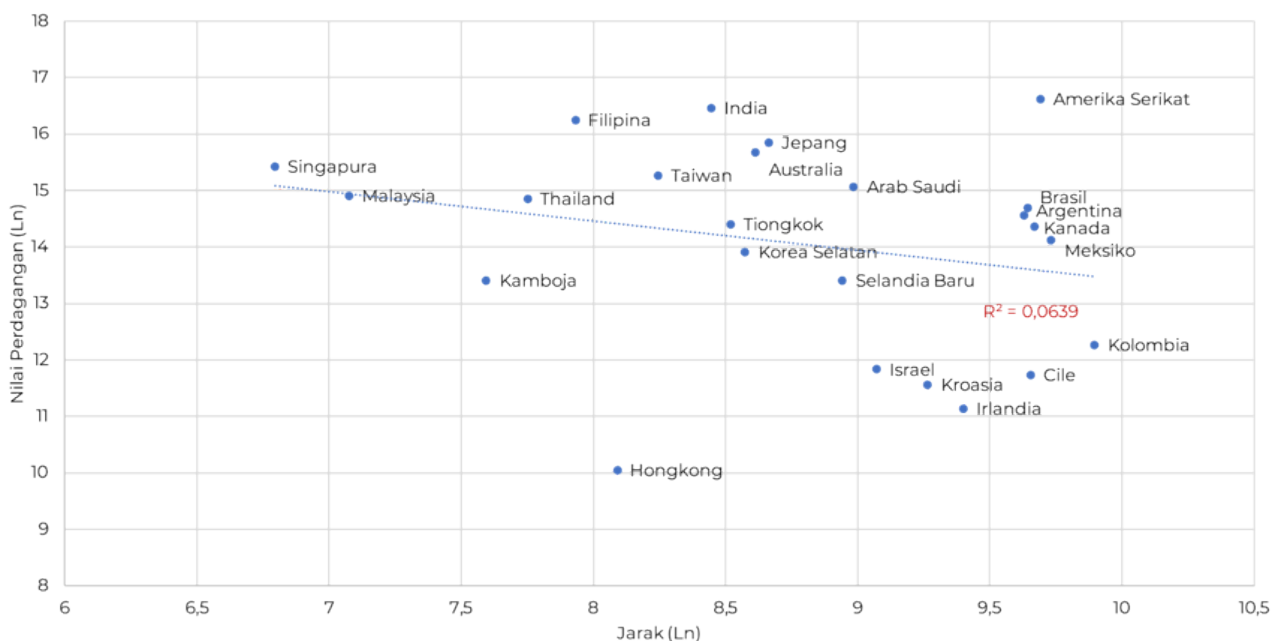
¹⁵⁹ Yen Nen Lee, "Malaysia gets a new prime minister – the country's third in 3 years," *CNBC*, 20 Agustus, 2021, <https://www.cnbc.com/2021/08/20/malaysia-king-appoints-ismail-sabri-yaakob-as-new-prime-minister.html>.

¹⁶⁰ Diolah dari "Badan Pusat Statistik 'PDB Seri 2010 (Miliar Rupiah),' " diakses pada Mei 2023, <https://www.bps.go.id/indicator/11/65/2/-seri-2010-pdb-seri-2010.html>.

Tinjauan lebih lanjut pada Bagan 22 menunjukkan, kondisi di atas dipengaruhi oleh peningkatan nilai tambah sektor jasa secara prematur. Sektor jasa sebagai tahapan ketiga dari pembangunan ekonomi telah mendominasi, padahal Indonesia masih termasuk negara dengan pendapatan menengah. Apabila dikaitkan dengan SDA, kondisi di atas memperlihatkan adanya ketidakmampuan Indonesia dalam menciptakan rantai nilai yang meluas secara skala ekonomi untuk mencegah adanya tahapan yang prematur. Jika ini terus dibiarkan, maka Indonesia tidak akan pernah bisa memiliki posisi strategis yang memadai untuk berpartisipasi lebih jauh dalam GVC.

Bukti empiris mengafirmasi bahwa teori ekonomi geografi berlaku dalam praktik perdagangan antar Indonesia.¹⁶¹ Tabulasi silang pada Bagan 23 menunjukkan semakin tinggi jarak terhadap *hub*, maka semakin rendah nilai perdagangannya. Sebagai gambaran, nilai perdagangan dengan Singapura yang memiliki jarak terdekat bernilai 5 Miliar Dolar AS. Sementara itu, perdagangan dengan Kolombia yang memiliki jarak terjauh bernilai hanya 200 juta Dolar AS. Indonesia perlu memahami situasi ini sebagai dasar untuk mengoptimasi posisi dalam perdagangan global.

Bagan 23. Hubungan antara Jarak terhadap Hub dan Nilai Perdagangan Indonesia¹⁶²

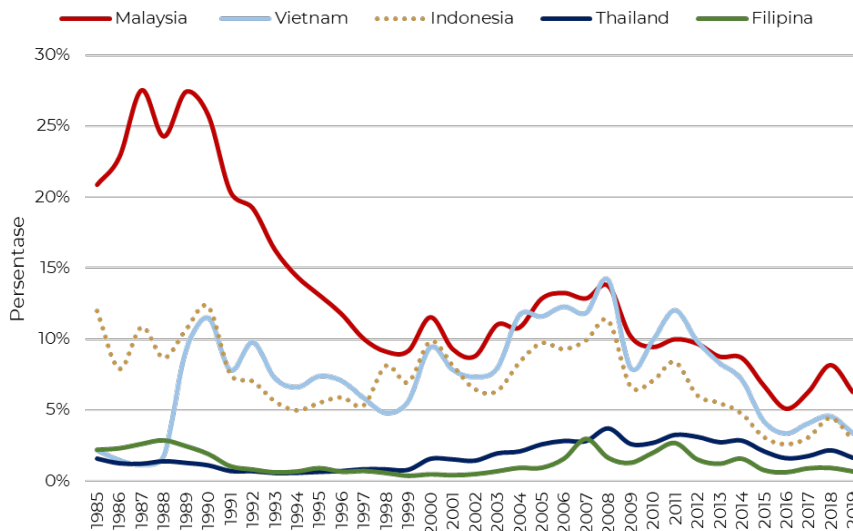


Dalam gambaran yang lebih luas, Malaysia sebagai negara ASEAN yang memiliki persentase rente SDA terhadap PDB paling tinggi menunjukkan pola serupa dengan Indonesia. Bagan 24 menunjukkan terjadi penurunan signifikan rente SDA terhadap PDB Malaysia. Sementara itu, Filipina dan Thailand memiliki tren rente SDA terhadap PDB yang relatif stagnan dibandingkan ketiga negara yang lain. Akan tetapi, ini tidak mengherankan mengingat kedua negara tersebut memulai dengan persentase rente SDA terhadap PDB yang lebih rendah.

¹⁶¹ Pemahaman merujuk pada *Gravity Model* yang menjelaskan bahwa arus barang akan cenderung negatif terhadap jarak geografis kedua lokasi. Dengan kata lain, peningkatan jarak yang tercipta antarnegara berpotensi melemahkan volume perdagangan internasional. Scott Baier dan Samuel Standaert, "Gravity Models and Empirical Trade," *Economics and Finance Oxford University Press*, 31 Maret, 2020, <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190625979.013.327>

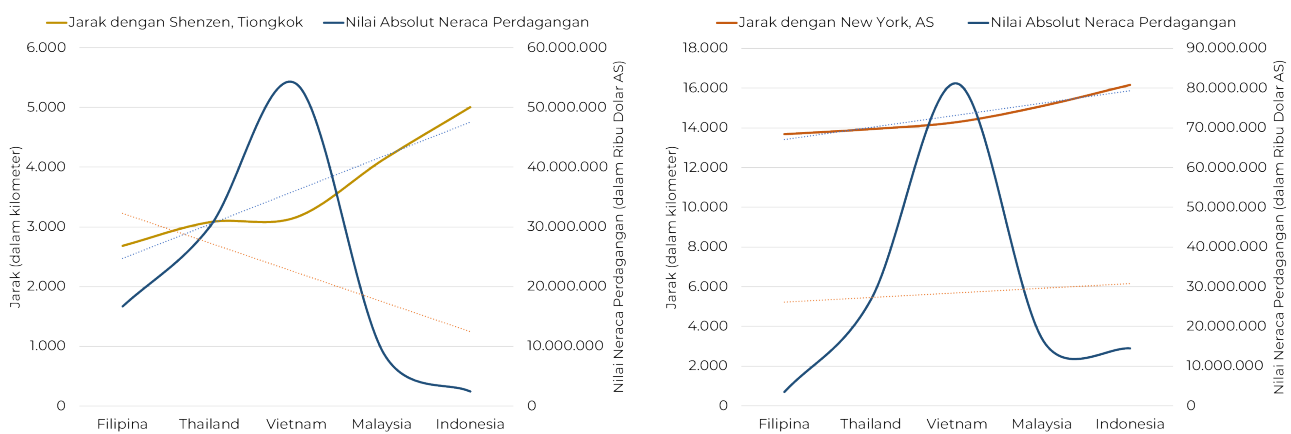
¹⁶² Diolah dari "Trade Map 'List of Product Commercialized by Indonesia'," *International Trade Centre*, diakses pada Mei 2023, www.trademap.org. Lihat juga "Distance Calculator", diakses pada Mei 2023, <https://www.distancecalculator.net/>.

Bagan 24. Perbandingan Rente SDA Negara Asia Tenggara¹⁶³



Perbandingan jarak antara *hub* dengan nilai absolut perdagangan lima negara Asia Tenggara kembali mengonfirmasi jarak sebagai determinan perdagangan. Jarak yang semakin jauh dari *hub*, cenderung menyebabkan semakin rendah nilai perdagangan. Meskipun sebagai catatan ditemukan anomali dalam konteks Vietnam-Tiongkok dan Vietnam-AS.

Bagan 25. Perbandingan Jarak antara Hub dengan Nilai Absolut Perdagangan¹⁶⁴



Dalam konteks ini, Indonesia memang telah menggunakan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) sebagai kesempatan untuk menegaskan pemenuhan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia terutama di kawasan Indo-Pasifik sebagaimana diulas pada bagian sebelumnya. Akan tetapi, keuntungan lokasi geografis Indonesia yang berada di antara samudera Hindia dan Pasifik juga dimiliki oleh negara Asia Tenggara lainnya. Indonesia bahkan dapat dikatakan memiliki posisi yang kurang menguntungkan karena memiliki jarak yang relatif lebih jauh terhadap *hub* jika dibandingkan negara Asia Tenggara lain.

¹⁶³ Diolah dari “The World Bank ‘Total Natural Resources Rents (% of GDP),’” diakses pada Mei 2023, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.TOTL.RT.ZS>.

¹⁶⁴ Diolah dari “Trade Map ‘List of Product Commercialized by Selected Countries,’” *International Trade Centre*, diakses pada Mei 2023, www.trademap.org. Lihat juga “Distance Calculator”, diakses pada Mei 2023, <https://www.distancecalculator.net/>.

SDA merupakan faktor penting yang dapat menjadi modal bagi penguatan posisi strategis Indonesia dalam GVC. Akan tetapi, perlu dipahami tentang adanya kebutuhan untuk menciptakan rantai nilai yang meluas secara nilai tambah dan skala ekonomi. Selain itu, SDA memiliki sifat terbatas sehingga tidak selamanya Indonesia dapat menggantungkan roda perekonomian pada faktor ini. Sebagai gambaran, proyeksi BPS bahwa batu bara sebagai komoditas unggulan akan habis dalam kisaran 60 tahun ke depan. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mengambil manfaat dari berbagai inisiatif konektivitas yang ada khususnya dalam konteks pengembangan infrastruktur ekstraksi dan pengolahan SDA yang tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Modalitas Diplomati

Politik luar negeri (polugri) Indonesia bebas dan aktif hingga saat ini masih menjadi jangkar bagi penyusunan kebijakan luar negeri dari masa Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo. Konsistensi polugri bebas aktif ini merupakan suatu kekuatan yang dimiliki Indonesia dalam memosisikan diri dalam dinamika hubungan internasional untuk bisa disesuaikan dengan kepentingan nasional. Secara lebih teknis, kekuatan polugri bebas aktif juga bisa diterjemahkan pada kerja sama untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global, khususnya dalam memilih mitra kerja sama yang strategis untuk bisa meningkatkan kontribusi Indonesia dalam rantai pasok global.

Ada dua aspek dari polugri bebas dan aktif, yaitu aspek konseptual (ideologis) dan operasional (material). Dari sisi konseptual, bebas dan aktif mengindikasikan suatu pandangan bahwa Indonesia berperan secara aktif dalam perdamaian dunia dan tidak terjebak pada kepentingan suatu kelompok tertentu selain kepentingan nasional Indonesia.¹⁶⁵ Secara material, polugri bebas aktif, setidaknya dari masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, selalu berusaha menempatkan diri sebagai kekuatan menengah (*middle power*) baik di tataran regional maupun global. Baik Presiden SBY maupun Jokowi menempatkan isu demokrasi, Islam, dan hak asasi manusia sebagai bagian dari polugri bebas aktif serta meningkatkan peranan Indonesia melalui partisipasi di isu-isu pemerintahan global dan forum-forum internasional.¹⁶⁶ Peran Indonesia sebagai kekuatan tengah bersifat strategis untuk merespons dan berkontribusi pada tatanan internasional yang bisa dicapai dengan memainkan peranan-peranan khususnya sebagai kekuatan tengah yang bisa berkontribusi pada pembangunan norma-normal regional maupun global.¹⁶⁷ Setidaknya terdapat lima peranan yang ditawarkan oleh posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah dan polugri bebas aktifnya: a) Indonesia berperan sebagai pemimpin regional, khususnya dalam kerja sama di ASEAN; b) suara bagi negara berkembang; c) advokasi untuk demokrasi; d) jembatan penengah;¹⁶⁸ dan e) turut serta dalam perdamaian dunia.

Polugri bebas aktif juga masih relevan untuk digunakan hingga saat ini berdasarkan beberapa alasan. Pertama, bebas aktif menawarkan netralitas bagi Indonesia dalam memilih mitra kerja samanya di tengah rivalitas yang makin memanas negara-negara adidaya, khususnya Amerika Serikat dengan Tiongkok. Kedua, polugri bebas aktif juga memberikan fleksibilitas bagi presiden di periode tertentu untuk menjabarkan secara lebih operasional kebijakan luar negerinya. Misalnya dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo mempunyai cita-cita untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip bebas dan aktif. Ketiga, alih-

¹⁶⁵ Fathiyah Wardah, "Politik Luar Negeri Bebas Aktif Masih Relevan," *VOA Indonesia*, dirilis pada 18 Agustus 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/pengamat-politik-luar-negeri-bebas-aktif-masih-relevan/6706969.html>.

¹⁶⁶ "BRIN Research Professor: Two Factors Influence Indonesian Foreign Political Activism," *BRIN*, dirilis pada 17 Mei 2022, <https://ipsh.brin.go.id/2022/05/17/brin-research-professor-two-factors-influence-indonesian-foreign-political-activism/>.

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ Moch Faisal Karim, "Middle Power, Status-seeking and Role Conceptions: The Cases of Indonesia and South Korea," *Australian Journal of International Affairs* (2018): 13.

alih menghindari rivalitas di tataran regional maupun global, polugri bebas aktif bisa dimanfaatkan untuk bisa meraup manfaat dari persaingan yang ada. Keempat, polugri bebas aktif juga memberikan kekuatan bagi Indonesia untuk bisa mempromosikan nilai-nilai dan prinsip yang menjadi fondasi Indonesia, khususnya terkait dengan kemampuan Indonesia untuk “mengawinkan” nilai demokrasi dengan nilai keislaman (sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia dan penduduk muslim terbesar di dunia), di samping secara simbolik menyelenggarakan acara-acara multilateral besar¹⁶⁹, seperti KTT Group of Twenty (G20) yang berlangsung pada tahun 2022. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa polugri bebas aktif telah menjadi salah satu kekuatan Indonesia dalam menjalankan Presidensi G20 di tengah situasi global yang sulit dan memperkuat kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia.¹⁷⁰

Indonesia secara aktif melakukan diplomasi yang berdasarkan prinsip bebas dan aktif dalam beberapa bidang. Pertama, sebagai upaya turut serta menjaga ketertiban dunia dan perdamaian, sejak tahun 1957 hingga 2020, Indonesia secara aktif mengirimkan 29 misi pasukan perdamaian dunia lewat Kontingen Garuda. Pada tahun 2020, Indonesia memiliki 2,705 personel TNI dan Polri yang tergabung dalam Misi Garuda dan menjadi jumlah terbanyak di Asia Tenggara.¹⁷¹

Kedua, sebagai jembatan negara yang tengah berkonflik, Indonesia telah berperan serta sebagai mediator di berbagai konflik yang melibatkan negara mulai dari kawasan Asia Tenggara hingga Afrika. Dalam keketuaan G20 tahun 2022, Indonesia juga mengupayakan perdamaian antara Ukraina dengan Rusia di mana Presiden Jokowi melakukan jawatan ke kedua negara untuk membahas solusi perdamaian. Presiden Jokowi memiliki kepentingan untuk menghentikan perang antara kedua negara tersebut agar rantai pasok pangan, pupuk, dan energi bisa segera pulih kembali.¹⁷²

Ketiga, meskipun Indonesia saat ini masih merupakan salah satu negara penerima ODA, Indonesia juga berkontribusi sebagai negara donatur yang turut memberikan bantuan bagi negara lain yang memerlukan bantuan khususnya dalam konteks pembangunan yang dikelola oleh Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI). Sejak tahun 2020, Indonesia sudah menggelontorkan bantuan sebesar hampir 85 Miliar Rupiah kepada 16 negara dan 2 kelompok negara.¹⁷³ Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani menyatakan bahwa kerja sama pembangunan internasional yang dilakukan melalui LDKPI ini diarahkan untuk pencapaian SDGs, mendukung keketuaan ASEAN 2023, dan memperkuat diplomasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya, untuk menunjukkan peran Indonesia di kancah internasional.¹⁷⁴

¹⁶⁹ *Ibid*, 12.

¹⁷⁰ Radityo Dharmaputra “Terjebak Netralitas di Tengah Politik Global, Masih Relevankah Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia?” *The Conversation*, 9 November, 2022, <https://theconversation.com/terjebak-netralitas-di-tengah-politik-global-masih-relevankah-politik-luar-negeri-bebas-aktif-indonesia-192031>.

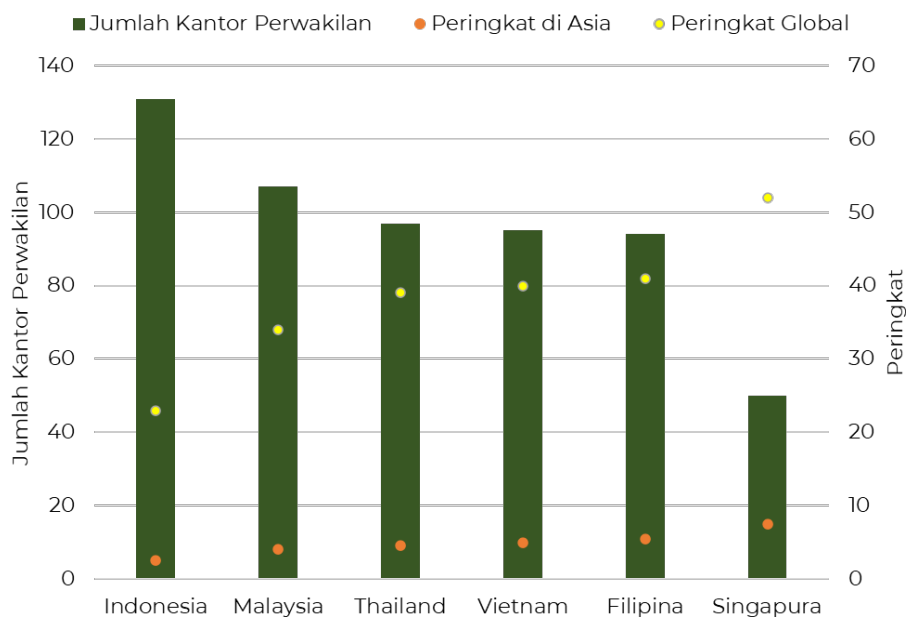
¹⁷¹ Faqihah M. Itsnaini, “Misi Garuda: Peran Indonesia Menjaga Perdamaian Dunia Lewat Kontingen Garuda,” *Detik News*, 13 Maret, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5491938/misi-garuda-peran-indonesia-menjaga-perdamaian-dunia-lewat-kontingen-garuda>.

¹⁷² “Bertemu dengan Presiden Putin, Presiden Jokowi: Indonesia Siap Menjembatani Komunikasi Rusia-Ukraina,” Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 1 Juli 2022, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3756/berita/bertemu-dengan-presiden-putin-presiden-jokowi-indonesia-siap-menjembatani-komunikasi-rusia-ukraina>.

¹⁷³ “Penerima Hibah,” Lembaga Kerja Sama Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diakses pada Mei 2023, <https://ldkpi.kemenkeu.go.id/page/penerima-hibah>.

¹⁷⁴ Abdul `Aziz Maghfur, “Berikan Arah Pelaksanaan Tugas LDKPI, Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri Pimpin Rapat Komite Pengarah,” Lembaga Kerja Sama Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dirilis pada 28 Maret 2023, <https://ldkpi.kemenkeu.go.id/post/berikan-arahan-pelaksanaan-tugas-ldkpi,-menteri-keuangan-dan-menteri-luar-negeri-pimpin-rapat-komite-pengarah>.

Bagan 26. Indeks Diplomasi Global¹⁷⁵



Selain itu, pada rilis terakhirnya di tahun 2021, *Lowy Institute* mengeluarkan Indeks Diplomasi Global yang mengidentifikasi jaringan diplomatik negara-negara anggota G20, OECD, dan beberapa negara lainnya dengan melihat berapa banyak perwakilan suatu negara di negara-negara lain di dunia, baik dilihat dari kedutaan, konsulat, misi permanen, atau perwakilan lainnya. Dibanding dengan seluruh negara anggota ASEAN, Indonesia menempati peringkat tertinggi secara umum, yang disusul oleh Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Singapura.

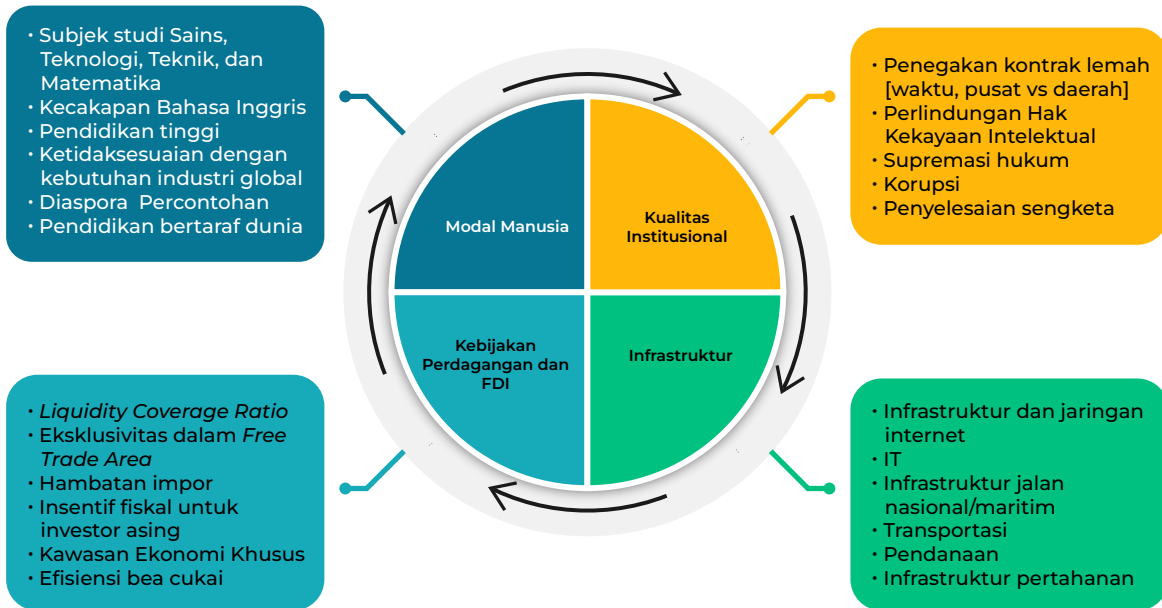
Semakin tinggi peringkat suatu negara mengindikasikan semakin banyak perwakilan yang ditempatkan oleh negara asal ke negara mitranya. Hal ini juga mengindikasikan bahwa semakin tinggi peringkatnya, semakin baik pula hubungan suatu negara dengan negara mitranya. Indonesia, dengan peringkat yang dimiliki, memiliki modal yang kuat untuk bisa meningkatkan kerja sama dengan negara-negara yang menawarkan inisiatif konektivitas.

Jika dilihat dari lima inisiatif konektivitas yang dibahas dalam tulisan ini, politik luar negeri bebas dan aktif Indonesia adalah fondasi yang baik bagi Indonesia karena kebijakan bebas dan aktif tidak mengarahkan untuk condong ke suatu negara dengan ideologi tertentu. Justru, kebijakan luar negeri Indonesia didesain untuk digunakan secara praktis dan pragmatis demi mendapatkan kepentingan nasional Indonesia. Oleh sebab itu, kebijakan luar negeri bebas dan aktif ini bisa sejalan dengan semua inisiatif konektivitas tanpa melihat apakah inisiatif tersebut mendukung gagasan keterbukaan demokrasi, seperti IPEF atau Global Gateway, atau mendukung gagasan inklusivitas keanggotaannya, seperti GDI.

¹⁷⁵ Diolah dari Lowy Institute, "Global Diplomacy Index 2021 Country Ranking," dirilis pada 2021, https://globaldiplomacyindex.lowyinstitute.org/country_rank.html.

Faktor Penghambat

Bagan 27. Faktor Penghambat

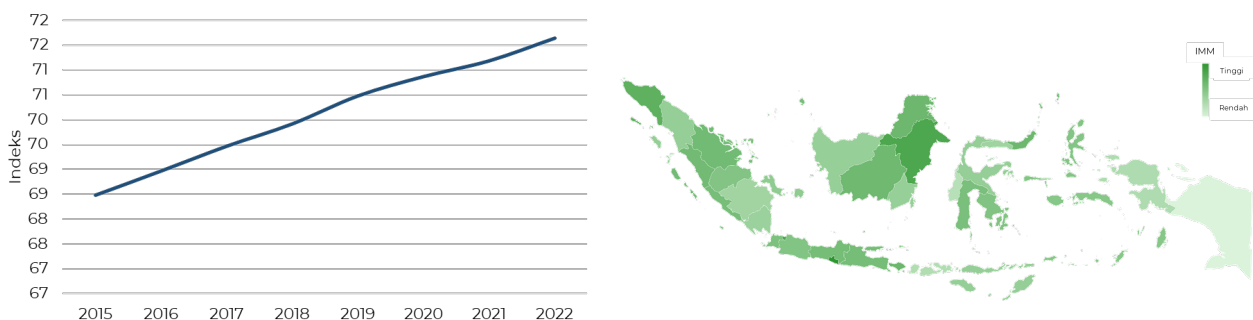


Secara garis besar, Indonesia memiliki empat faktor penghambat untuk mendapatkan keuntungan dan mengelola risiko dari beragam inisiatif yang ada. Keempat faktor penghambat tersebut antara lain kualitas sumber daya manusia, kebijakan perdagangan dan investasi asing, kualitas institusional, serta infrastruktur baik fisik maupun digital.

Modal Manusia

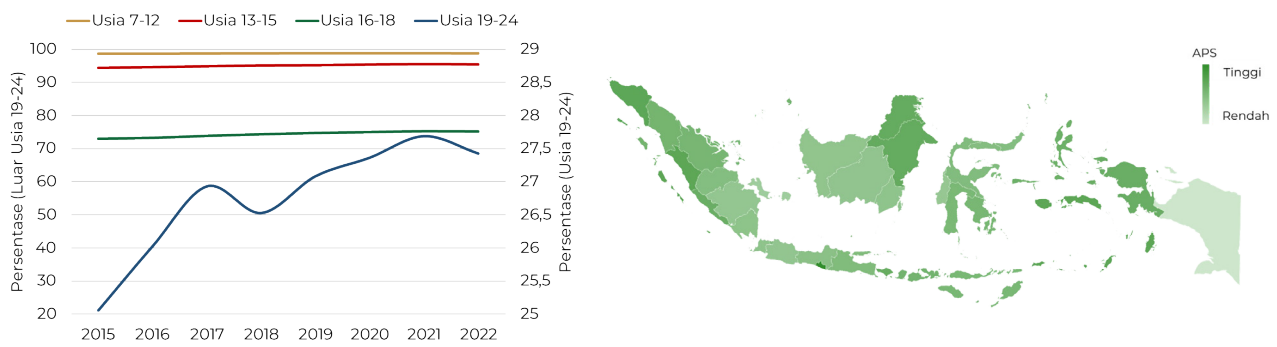
Sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam meningkatkan posisi strategis Indonesia dalam konteks konektivitas. Indeks Modal Manusia (IMM) dalam periode 2015 – 2021 menunjukkan capaian modal manusia Indonesia terus bertumbuh secara konsisten. Akan tetapi, pemetaan dalam level provinsi menunjukkan adanya kesenjangan yang berarti antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Tiga provinsi dengan capaian IMM tertinggi, yakni DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur. Sementara itu, tiga provinsi dengan capaian IMM terendah, yakni Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat dan Papua.

Bagan 28. Indeks Modal Manusia di Indonesia 2015-2021¹⁷⁶

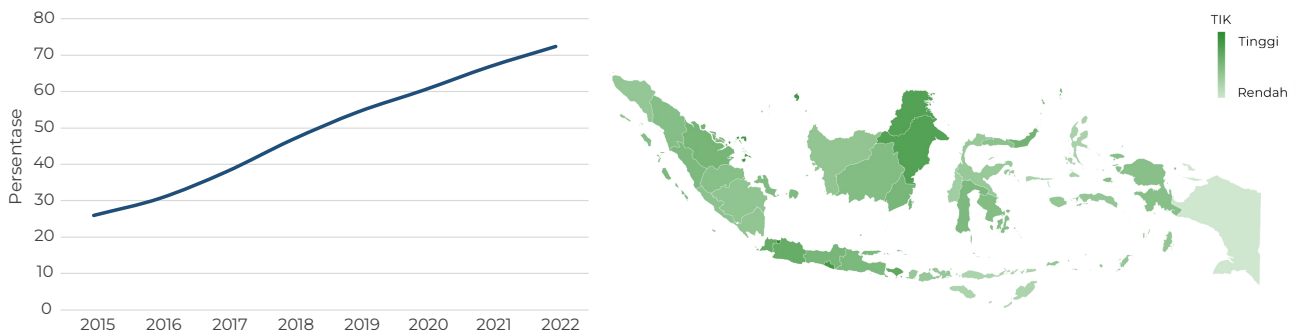


¹⁷⁶ Diolah dari Badan Pusat Statistik, "Indeks Pembangunan Manusia," diakses pada Mei 2023, <https://www.bps.go.id/indicator/26/413/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia.html>.

Bagan 29. Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia 2015-2021¹⁷⁷



Bagan 30. Keterampilan TIK di Indonesia¹⁷⁸



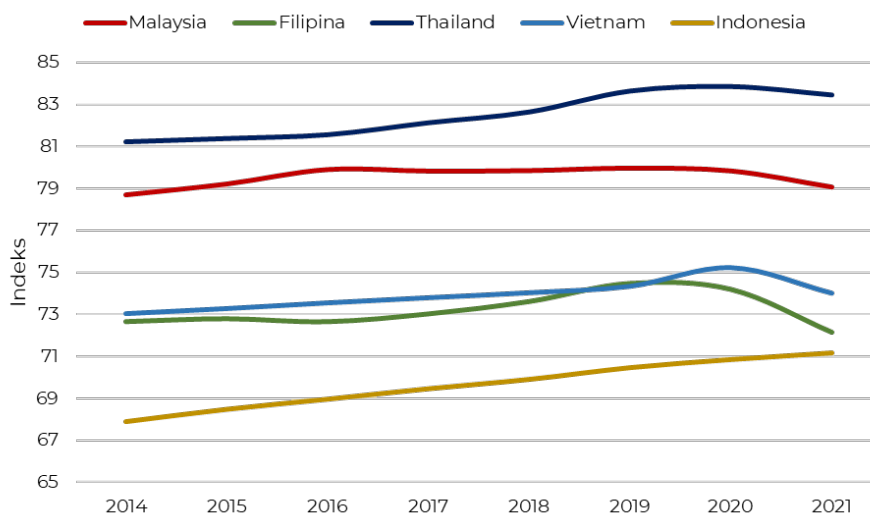
Melengkapi tinjauan, studi mencatat adanya pertumbuhan angka partisipasi sekolah selama periode 2015-2021. Akan tetapi, pemetaan dalam level provinsi kembali menunjukkan adanya kesenjangan antara Indonesia Barat dan Timur. Tiga provinsi di Indonesia dengan capaian APS tertinggi, yaitu DI Yogyakarta, Aceh, dan Bengkulu. Kondisi serupa terlihat dalam pengukuran kemampuan TIK di Indonesia khususnya pada jenjang usia 15-19 tahun yang menunjukkan pertumbuhan untuk periode 2015-2022. Akan tetapi, pemetaan nasional kembali menunjukkan kesenjangan literasi dan konektivitas digital pada Indonesia Barat dan Timur. Semua provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat keterampilan TIK di atas rerata nasional berada di Indonesia Barat.

Kualitas SDM Indonesia yang masih tertinggal dengan kombinasi tingginya kesenjangan antara Indonesia Barat dan Timur menjadi urgensi bagi Indonesia untuk mengambil peluang dari berbagai inisiatif konektivitas yang ada. Sebagaimana temuan studi bahwa seluruh inisiatif konektivitas yang menjadi fokus kajian menjadikan pengembangan kapasitas SDM sebagai salah satu fokus. Hanya AOIP yang tidak memiliki fokus khusus pada pengembangan kapasitas melainkan pada mobilitas masyarakat di ASEAN.

¹⁷⁷ Diolah dari Badan Pusat Statistik, "Angka Partisipasi Sekolah (APS)," diakses pada Mei 2023, <https://www.bps.go.id/indicator/28/301/1/angka-partisipasi-sekolah-a-p-s-.html>.

¹⁷⁸ Diolah dari Badan Pusat Statistik, "Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-59 Tahun Dengan Keterampilan Teknologi Informasi Dan Komputer (TIK) Menurut Provinsi (Persen)," diakses pada Mei 2023, <https://www.bps.go.id/indicator/28/1447/1/proporsi-remaja-dan-dewasa-usia-15-59-tahun-dengan-keterampilan-teknologi-informasi-dan-komputer-tik-menurut-provinsi.html>.

Bagan 31. Indeks Modal Manusia 5 Negara Asia Tenggara¹⁷⁹



Sebagaimana ditemukan dalam kajian literatur, negara dengan tingkat pembangunan yang rendah cenderung memiliki tingkat gaji yang rendah. Kondisi tersebut sejalan dengan rendahnya tingkat keterampilan yang dibutuhkan untuk proses produksi di negara tersebut.¹⁸⁰ Berkaca pada kualitas SDM Indonesia saat ini, menjadikannya sebagai faktor penghambat dalam mengungkit GVC. Pasalnya, kualitas SDM Indonesia hanya mampu membawa Indonesia pada posisi hilir rantai pasok dengan penambahan nilai yang cenderung rendah. Selain itu, studi mencatat bahwa pengembangan tanpa disertai dengan transfer teknologi kapasitas cenderung memberikan dampak yang terbatas. Dalam konteks ini, hampir seluruh inisiatif konektivitas memiliki kesamaan, yaitu tidak adanya kepastian dan kejelasan transfer teknologi, kecuali Jepang. Jepang telah mengindikasikan peluang transfer teknologi di bidang pertahanan khususnya penyelamatan dan pemantauan maritim dan mendorong investasi swasta dengan transfer teknologi pada beberapa bidang. Selanjutnya, untuk dapat mengembangkan SDM itu sendiri dibutuhkan lingkungan penunjang seperti kesehatan SDM. Dalam konteks ini hanya Uni Eropa dan Korea Selatan yang secara eksplisit mengangkat aspek kesehatan dalam inisiatif konektivitas mereka. Adapun Tiongkok melalui GDI hanya secara spesifik menyoroti aspek kesehatan dalam konteks Covid-19.

Kualitas Institusional

Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan dalam menilai performa suatu negara secara domestik adalah tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum yang bisa memengaruhi kontribusi suatu negara dalam rantai pasok global. Baik secara langsung maupun tidak langsung, terdapat aspek-aspek yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi pemerintahan suatu negara dan bisa berdampak pada kemudahan berusaha. Bagi pelaku usaha atau investor, salah satu poin mendasar yang menjadi pertimbangan untuk memulai usahanya adalah kemudahan perizinan. Pemerintah berusaha menyederhanakan berusaha melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan mengharmonisasikan peraturan-peraturan perundangan yang saling tumpang tindih terkait kemudahan berusaha. Sebelumnya, di tahun 2018,

¹⁷⁹ Diolah dari United Nations Development Programme, "Human Development Index (HDI)," diakses pada Mei 2023, <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI>.

¹⁸⁰ Sakshi Aggarwal, "Smile Curve and Its Linkages with Global Value Chain," *Journal of Economics Bibliography* 4, no.3 (2017): 278-286.

pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang sistem *Online Single Submission* (OSS). Akan tetapi implementasinya masih terkendala beberapa hal, di antaranya belum selarasnya peraturan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2021 menemukan bahwa peraturan perizinan berusaha di tingkat pusat dan daerah masih belum sepenuhnya selaras dan lengkap untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.¹⁸¹ Hal ini berdampak pada perizinan berusaha di sektor yang memerlukan persyaratan dasar perizinan berusaha masih belum bisa diterbitkan melalui sistem OSS yang berbasis pada pendekatan risiko terutama yang berkaitan dengan lingkungan. Adanya otonomi daerah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memang memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola beberapa urusan bagi masyarakat di daerahnya. Akan tetapi, tanpa adanya penyelarasan peraturan di pusat dan daerah, desentralisasi justru bisa menghambat kemudahan berusaha. Hambatan dari sisi regulasi perizinan ini tentu berdampak pada operasionalisasi dari sistem OSS tersebut yang hingga saat ini masih belum optimal.

Permasalahan selanjutnya yang terkait dengan kemudahan berusaha adalah penegakan kontrak yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa usaha. Di dalam dokumen RPJMN 2020-2024, pemerintah menyebutkan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kemudahan berusaha adalah dengan memperbaiki kualitas dan efisiensi penyelesaian sengketa usaha. Laporan *Ease of Doing Business* yang dikeluarkan oleh Bank Dunia pada tahun 2020 menilai indeks kualitas prosedur peradilan Indonesia sebesar 8,9 dari 18.¹⁸² Nilai tersebut masih tergolong rendah karena sebagian besar proses peradilan masih dilaksanakan dengan prosedur yang berbelit, lama, berbiaya tinggi, dan belum memanfaatkan penggunaan teknologi secara optimal untuk menyederhanakan proses tersebut, meskipun sudah ada mekanisme peradilan elektronik (*e-court*) oleh Mahkamah Agung.

Aspek krusial lainnya terkait dengan perlindungan dan jaminan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang terdiri dari perlindungan hak cipta intelektual, perlindungan hak paten, perlindungan merek dagang, dan perlindungan hak cipta. Lemahnya jaminan perlindungan HAKI menjadi disinsentif untuk dilakukannya inovasi baik untuk produk dan jasa, baik konvensional maupun digital. Pada tahun 2022, performa Indonesia dalam perlindungan HAKI dinilai berada di antara jajaran negara terbawah dengan nilai 4,32 dan mendapat peringkat 97 dari 129.¹⁸³

Terakhir, meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan kemudahan berusaha, masalah korupsi masih menjadi hambatan utama dalam tata kelola pemerintahan dan

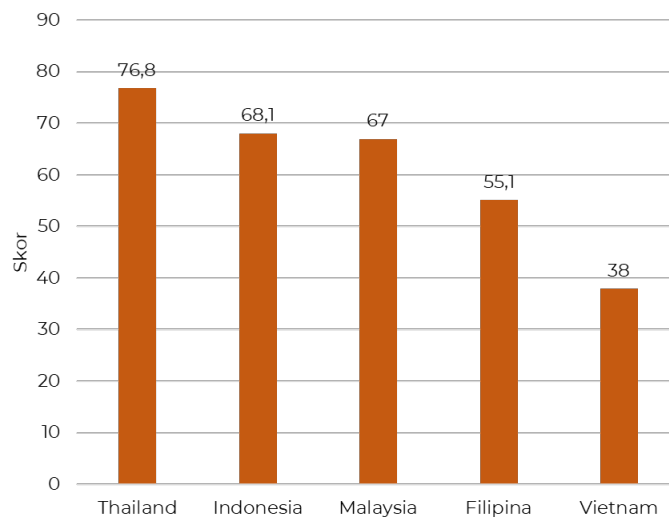
¹⁸¹ "Ketidakselarasan Peraturan Hambat Penerbitan Izin Berusaha OSS," *Warta Pemeriksa*, 16 Agustus, 2022, <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=37426>.

¹⁸² Penafian: Tulisan ini mengambil beberapa data dari Laporan *Ease of Doing Business* (EoDB) Bank Dunia meskipun pada tahun 2021 Bank Dunia menghentikan sementara penyusunan laporan tersebut karena adanya indikasi skandal pengaturan nilai untuk Tiongkok dan Arab Saudi dan inkonsistensi dengan laporan di tahun-tahun sebelumnya. Rujukan terhadap laporan Bank Dunia dalam tulisan ini dijadikan rujukan dengan beberapa pertimbangan: (1) Pemerintah Indonesia masih menggunakan indikator dari EoDB dalam dokumen RPJMN 2020 – 2024 untuk mengukur iklim dan peringkat kemudahan berusaha dan (2) data yang ditampilkan adalah estimasi dan bisa saja mengalami perubahan secara aktual dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia masih menggunakan rujukan dalam RPJMN 2020-2024 untuk meningkatkan iklim dan peringkat kemudahan Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintah Indonesia mengusulkan untuk menggunakan *World Competitiveness Index* yang dikeluarkan oleh *International Institute for Management-Development* dan dipadukan dengan *Rule of Law Index* (RoLI) yang dikeluarkan oleh *World Justice Project*.

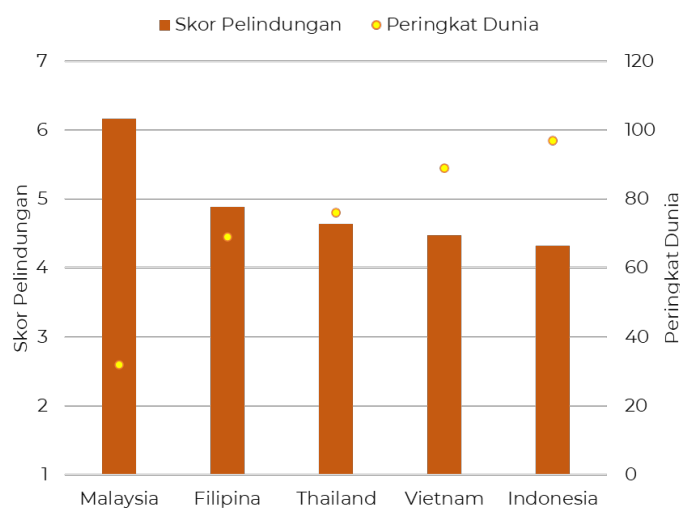
¹⁸³ Sary Levy-Carciente, "International Property Rights Index 2022," (Property Rights Alliance, 2022), 19.

hukum di Indonesia. Lebih khusus, korupsi di tingkat daerah justru banyak terjadi di area perizinan dan kemudahan berusaha.¹⁸⁴ Meskipun sempat anjlok pada tahun 2020 dan naik kembali pada tahun 2021, indeks korupsi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di dunia, permasalahan dari hulu (pencegahan) hingga hilir (penindakan) masih banyak dijumpai. *Indonesian Corruption Watch* bahkan mencatat setidaknya ada 252 kasus korupsi dengan 612 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dengan potensi kerugian negara hingga 33,6 triliun rupiah pada semester pertama tahun 2022.¹⁸⁵

Bagan 32. Perbandingan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Negara ASEAN Terpilih¹⁸⁶



Bagan 33. Perbandingan Skor Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual¹⁸⁷



¹⁸⁴ Herman Suparman, "Korupsi Perizinan di Daerah", *KPPOD Brief* (2019): 24.

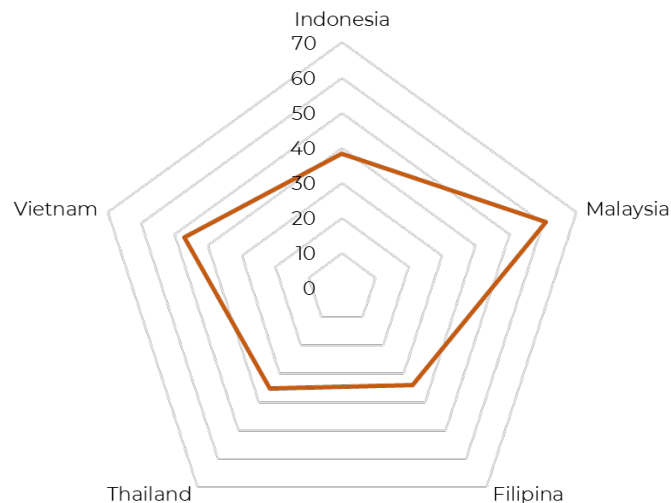
¹⁸⁵ Indonesia Corruption Watch, "Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2022," dirilis pada 22 November 2022, <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2022>.

¹⁸⁶ Merujuk pada profil kelima negara ASEAN yang diteliti oleh World Bank, *Doing Business 2020*, dirilis pada 2020, <https://documents1.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf>.

¹⁸⁷ Merujuk pada profil kelima negara ASEAN yang diteliti oleh Property Rights Alliance, *International Property Right Index*, dirilis pada 2022, <https://www.internationalpropertyrightsindex.org/countries>.

Permasalahan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum dalam beberapa aspek krusial di atas memang masih menjadi permasalahan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara di tingkat ASEAN. Jika membandingkan Indonesia dengan beberapa negara ASEAN terpilih yang memiliki karakter yang mirip, tata kelola pemerintahan dan hukum di Indonesia belum menunjukkan performa yang baik. Bahkan dalam aspek perlindungan HAKI dan pengendalian korupsi, Indonesia menunjukkan performa yang buruk sebagaimana ditunjukkan Bagan 33 di atas.

Bagan 34. Perbandingan Skor Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual¹⁸⁸



Rendahnya kualitas kinerja dan belum efisiennya tata kelola pemerintah dan hukum menjadi salah satu hambatan utama bagi terciptanya iklim usaha yang kondusif dan mendukung bagi pelaku usaha untuk berkembang. Tata kelola pemerintahan dan hukum adalah salah satu bidang di mana hanya akan tercipta jika ada kehendak dan komitmen politik yang tinggi untuk mengubah keadaan yang ada. Beberapa inisiatif konektivitas yang ditawarkan oleh negara-negara terpilih dalam tulisan ini memang menawarkan peningkatan kapasitas bagi pemerintah Indonesia, misal oleh Uni Eropa dalam penganggaran yang berkelanjutan dan Jepang dalam perencanaan kebijakan. Akan tetapi, tanpa adanya perubahan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan dan hukum dalam aspek perizinan, penyelesaian sengketa, dan jaminan perlindungan HAKI, maka tidak ada insentif dan motif yang lebih tinggi yang bisa ditawarkan bagi pelaku usaha baik dari dalam dan luar negeri untuk mengembangkan usahanya di Indonesia.

Kebijakan Perdagangan dan FDI

Dalam dunia yang semakin global, negara-negara menjadi lebih bergantung pada perdagangan internasional dan investasi luar negeri termasuk Indonesia. Rezim perdagangan serta investasi yang terbuka dan fasilitatif menjadi penting, khususnya dalam memaksimalkan potensi inisiatif-inisiatif konektivitas global. Meskipun demikian, Indonesia masih belum mampu untuk melaksanakannya sehingga menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia.

¹⁸⁸ Merujuk pada profil kelima negara ASEAN yang diteliti oleh Transparency International, *Corruption Perception Index*, dirilis pada tahun 2022, <https://www.transparency.org/>.

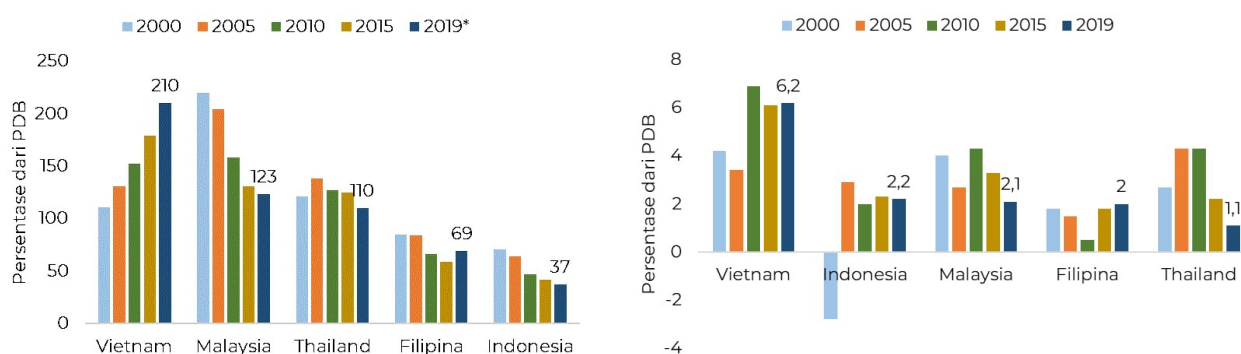
¹⁸⁹ Pangestu et al., "Fifty Years of Trade Policy in Indonesia: New World Trade, Old Treatments," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 51, no. 2 (Agustus 2015): 248.

Secara historis, posisi Indonesia terhadap kebijakan ekonomi global mengalami pasang surut. Menurut Pangestu et al. (2015), terdapat beberapa fase kebijakan perdagangan Indonesia yang berbeda.¹⁸⁹ Misalnya, selama krisis keuangan Asia pada tahun 1997–98, Indonesia mendorong agenda reformasinya dengan program penyesuaian struktural yang melekat pada paket pinjaman International Monetary Fund (IMF) yang mencakup pengurangan tarif impor secara bertahap, termasuk pada produk-produk sensitif dari industri berat; penghapusan NTB dan perizinan impor banyak produk pertanian; dan liberalisasi di sektor jasa.

Setelah krisis keuangan global pada tahun 2007–2008, pemerintah memberlakukan beberapa undang-undang tentang industri, perdagangan, dan hortikultura yang memberlakukan rezim perdagangan dan investasi yang lebih ketat.¹⁹⁰ Misalnya, UU 3/2014 tentang perindustrian mencerminkan fokus pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri melalui regulasi. Undang-undang tersebut memungkinkan pemerintah membatasi ekspor bahan mentah untuk mendorong pengolahan di dalam negeri. Tidak ada reformasi liberalisasi yang signifikan dalam kebijakan perdagangan dan investasi Indonesia dalam lima tahun terakhir. Sebaliknya, populisme dan nasionalisme telah meningkat, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Ambisi untuk swasembada, atau swasembada, diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih proteksionis dan anti impor, terutama pada produk pangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melakukan gebrakan reformasi regulasi dengan meloloskan UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi Indonesia dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Di sisi lain, kebijakan perdagangan juga digunakan sebagai strategi industrialisasi dan tren hilirisasi yang sedang dicanangkan oleh pemerintah seperti kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan pelarangan ekspor. Pemerintah menargetkan untuk melakukan strategi hilirisasi terhadap 21 komoditas dan menargetkan investasi sebesar 545,3 Miliar Dolar AS hingga tahun 2040.¹⁹¹ Strategi ini berseberangan dengan konsep GVC yang mengharuskan adanya konsistensi kebijakan ekspor dan impor.

Bagan 35. Indeks Keterbukaan Perdagangan/PDB (kiri); Aliran Masuk FDI Negara ASEAN Terpilih/PDB (kanan)¹⁹²



¹⁹⁰ Arianto. A. Patunru dan Sjamsu Rahardja, "Trade Protectionism in Indonesia: Bad Times and Bad Policy," *Lowy Institute for International Policy*, dirilis pada Juli 2015, https://think-asia.org/bitstream/handle/11540/6410/patunru_and_rahardja_trade_protectionism_in_indonesia_0.pdf?sequence=1.

¹⁹¹ "RI Buat Peta Hilirisasi Komoditas Strategis Sampai 2040," *CNN Indonesia*, dirilis pada Februari 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230208141018-92-910434/ri-buat-peta-hilirisasi-komoditas-strategis-sampai-2040>.

¹⁹² Diolah dari World Bank, "Trade (% of GDP): Selected ASEAN Countries," diakses pada Mei 2023, <https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.G>

Berdasarkan Bagan 35, Indeks keterbukaan Indonesia telah menurun sejak Krisis Keuangan Asia pada tahun 1998. Pada tahun 2019, total ekspor dan impor per PDB adalah 37% atau sama seperti pada awal 1970-an. Tren ini tidak hanya muncul di Indonesia tetapi juga di sebagian besar negara ASEAN. Pengecualian satu-satunya adalah Vietnam, yang berhasil menggandakan keterbukaan perdagangannya secara signifikan menjadi 210% dalam 20 tahun terakhir. Keterbukaan perdagangan Filipina juga mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2015. Perspektif lain dapat diperoleh dari indikator investasi seperti Penanaman Modal Asing (PMA) langsung dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Hal ini mencerminkan iklim dan peluang investasi di suatu negara, terutama dari perspektif investor asing. Di Indonesia, PMA langsung relatif stagnan selama sepuluh tahun terakhir pada angka 2%. Terjadi lonjakan dari tahun 2000 hingga 2014 akibat *commodity boom* (terutama kelapa sawit dan batu bara), yang kemudian diikuti oleh tren penurunan. Sebagian besar PMA langsung Indonesia berasal dari sektor yang berorientasi pada sumber daya alam dari perspektif sektoral, sementara sektor manufaktur mengalami penyusutan. Terdapat peningkatan di sektor jasa, seperti real estat, perhotelan, serta informasi dan teknologi, meskipun rezim PMA yang restriktif masih menghambat realisasinya. Singapura masih menjadi investor terbesar di Indonesia, sementara Tiongkok berhasil naik ke tiga besar dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam konteks inisiatif-inisiatif konektivitas global, kebijakan perdagangan dan investasi Indonesia yang tertutup dan kurang fasilitatif akan menjadi faktor penghambat dan menurunkan daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina. Kebijakan perdagangan dan investasi yang tertutup juga akan menyulitkan proyek investasi yang mengutamakan GVC seperti ekosistem produksi kendaraan listrik dan semikonduktor yang menjadi fokus FPPIP. Selain itu, Amerika Serikat dan Uni Eropa juga berulang kali menyampaikan perhatian tentang kebijakan perdagangan Indonesia yang cenderung *inward looking* dan kurang bersahabat dengan investor luar negeri. Misalnya, tantangan akan mungkin timbul dalam forum IPEF khususnya dalam pilar perdagangan dan rantai pasok. Hal ini memerlukan reformasi kebijakan menyeluruh agar dapat lebih aktif dan efektif mengambil keuntungan dari inisiatif-inisiatif tersebut.

Infrastruktur

Kuantitas dan kualitas infrastruktur menjadi faktor lain yang menghambat Indonesia untuk mengambil manfaat dari berbagai inisiatif konektivitas global. Sebagai negara kepulauan, kepemilikan Indonesia terhadap infrastruktur transportasi maritim yang berkualitas merupakan suatu keharusan.

Namun demikian, dari sekitar 1.000 lebih pelabuhan yang dikelola oleh pemerintah dan BUMN,¹⁹³ hanya satu yang berhasil menempati peringkat 100 besar Indeks Performa Pelabuhan Kontainer Global 2022.¹⁹⁴ Pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Tanjung Perak di urutan ke-97. Sementara pelabuhan Indonesia lainnya masih tertinggal di belakang termasuk Pelabuhan Tanjung Emas (132), Belawan (214), Panjang (228), dan Tanjung Priok (281).

Begitu pula dengan infrastruktur transportasi udara Indonesia. Terlepas dari adanya 33 bandara internasional per tahun 2021, pergerakan kargo internasional hanya berada di kisaran 423 ribu kilogram.¹⁹⁵ 97% di antaranya terpusat di Pulau Jawa termasuk

¹⁹³ Supriyo Ady Pracoyo dan M. Chusnul Syaichudin, *Informasi Transportasi Volume 12* (Jakarta: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2021).

¹⁹⁴ The World Bank, *The Container Port Performance Index 2022: A Comparable Assessment of Performance based on Vessel Time in Port* (Washington DC: The World Bank, 2023), 4.

¹⁹⁵ Kementerian Perhubungan, *Statistik Perhubungan – Data Operasional Tahun 2021* (Jakarta: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2022), 3-20.

bandara Soekarno-Hatta, Juanda, Ahmad Yani, dan Halim Perdana Kusumah. Angka pergerakan tersebut tiga kali lipat jauh lebih kecil dibandingkan pergerakan kargo domestik yang mencapai 1,2 juta kilogram.¹⁹⁶

Beberapa isu berkaitan infrastruktur transportasi udara di Indonesia saat ini adalah kepadatan bandara melebihi kapasitasnya,¹⁹⁷ kurangnya ketersediaan rute langsung antara daerah eksportir dengan tujuan, hingga terbatasnya pemenuhan standar internasional ekspor komoditas.¹⁹⁸ Ke depan, daya saing bandara-bandara tersebut juga kemungkinan besar akan dinilai dari tingkat digitalisasi dan pengurangan emisi GRK yang diterapkan.

Infrastruktur darat di Indonesia juga bukan tanpa masalah. Dari hampir 95.000 km jalan provinsi yang ada, hanya 51,67% di antaranya yang memiliki kondisi baik.¹⁹⁹ Sementara sisanya sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Khusus di wilayah timur Indonesia terutama Papua, Papua Barat, serta Nusa Tenggara Timur, jalan rusak memiliki porsi yang relatif besar sehingga berpotensi menghambat arus logistik.

Di abad ke-21, kepemilikan infrastruktur fisik yang berkualitas dalam jumlah besar saja tidak cukup. Negara juga perlu memiliki infrastruktur digital yang berkualitas dalam jumlah masif. Permasalahannya infrastruktur ini pun masih terbatas di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika 2022, Indonesia masih memiliki 150.000 titik layanan publik yang bahkan belum terlayani akses internet dengan baik.²⁰⁰ Begitu pula dengan cakupan layanan 4G yang baru mencapai 52,90% dari seluruh luas wilayah di 514 kabupaten/kota.²⁰¹ Kurangnya infrastruktur digital yang berkualitas tentu membatasi kapasitas Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain.

Sebagaimana diukur oleh Bank Dunia dalam *Logistics Performance Index* 2023, posisi Indonesia relatif tertinggal dibandingkan empat negara ASEAN lainnya. Keteringgalan tersebut baik dari segi nilai infrastruktur yang hanya mencapai 2,9 dan nilai pelayaran internasional dengan skor 3,0 dari 5.²⁰² Indonesia saat ini bahkan belum dapat bersaing dengan negara kepulauan lainnya di kawasan – Filipina dalam soal pelayaran internasional, menunjukkan masih banyaknya permasalahan terkait ekosistem transportasi maritim. Terlepas dari gencarnya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah beberapa tahun terakhir, tampak belum berkontribusi banyak terhadap peningkatan nilai kualitas infrastruktur Indonesia khususnya di tingkat internasional.

¹⁹⁶ *Ibid.*, 3-19.

¹⁹⁷ Titiek Anas dan Christopher Findlay, *Indonesia: Structural Reform in Air Transport Service* (Singapore: APEC Policy Unit, 2017), 20.

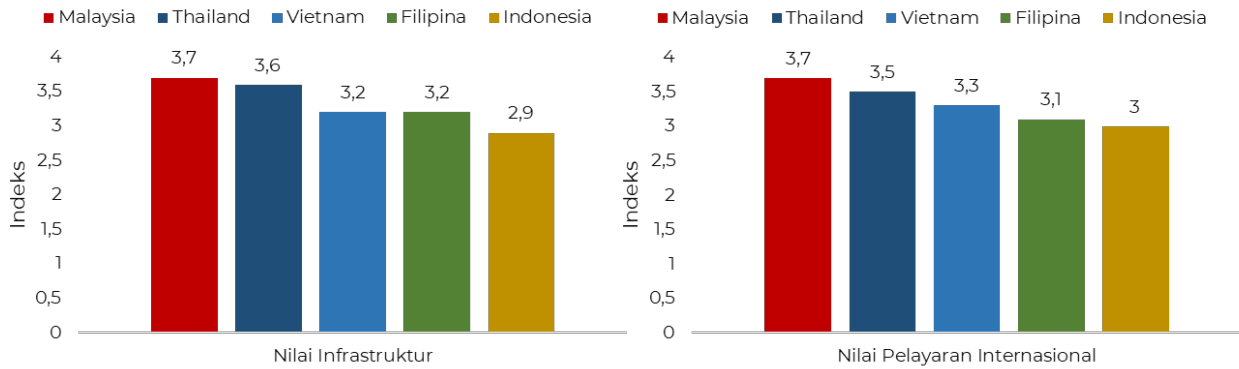
¹⁹⁸ Khasanah et al., "Management of the Grouper Export Trade in Indonesia," *Review in Fisheries Science & Aquaculture* 28, no. 1 (2020): 7.

¹⁹⁹ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Neraca Dataset – Kondisi Permukaan Jalan Provinsi*, diakses pada 18 Mei 2023, <https://data.pu.go.id/visualisasi/neraca-dataset-kondisi-permukaan-jalan-provinsi>. ²⁰⁰ Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Laporan Kinerja 2021* (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022), 73.

²⁰¹ *Ibid.*, 128.

²⁰² Diolah dari The World Bank, *Connecting to Compete 2023 Trade Logistics In An Uncertain Global Economy* (Washington DC: The World Bank, 2023), 33.

Bagan 36. Perbandingan Nilai Infrastruktur (kiri) dan Pelayaran Internasional Indonesia (kanan)²⁰³



Ketiadaan infrastruktur fisik dan digital yang berkualitas dalam jumlah masif kemungkinan besar akan membatasi Indonesia meraih peluang transfer teknologi, pengurangan biaya perdagangan, serta menarik investasi swasta. Berbagai peluang ini tampak membutuhkan infrastruktur sebagai prasyarat utama agar dapat terrealisasikan secara optimal. Secara spesifik, Indonesia butuh berinvestasi lebih banyak di bidang infrastruktur ketika hendak mengambil manfaat lebih besar dari inisiatif NPFQIP, IPEF, dan GDI. Tanpa berinvestasi dalam infrastruktur berkualitas pula, Indonesia akan menjadi rentan terhadap risiko ekonomi yang melekat pada inisiatif konektivitas dengan konsentrasi pengembangan infrastruktur.

²⁰³ Ibid.

Refleksi

Setelah menjabarkan bagaimana kondisi Indonesia dihadapkan pada peluang dan risiko yang ditawarkan oleh inisiatif konektivitas oleh negara mitra di bagian-bagian sebelumnya dan/atau bagaimana Indonesia perlu meningkatkan partisipasinya dalam GVC, ada beberapa catatan reflektif atas posisi Indonesia saat ini.

Pertama, temuan-temuan dalam monograf ini menguatkan argumen bahwa salah satu penentu konfigurasi GVC adalah adanya transfer teknologi. Dari semua inisiatif konektivitas yang dibahas dalam tulisan ini, tidak ada satu pun yang menyebutkan akan memberikan alih teknologi kepada negara penerima manfaat. Transfer teknologi adalah suatu elemen paling strategis dalam pengembangan industri strategis dan oleh sebab itu menjadi aspek yang paling sensitif. Sebagai contoh, negara-negara persemakmuran secara relatif memiliki nilai ekspor dalam produk-produk teknologi mutakhir lebih tinggi dari negara lain karena mereka memiliki privilese untuk mendapatkan alih teknologi dari negara-negara persemakmuran lain dan dimanfaatkan untuk mengembangkan industri teknologi mereka secara lebih maju. Hal ini mengandung pengertian bahwa alih teknologi sangat erat kaitannya dengan kedekatan geopolitik. Tanpa adanya faktor kedekatan geopolitik tersebut, akan sulit bagi suatu negara untuk memberikan teknologinya kepada negara lain.

Kedua, publikasi ini mencoba meletakkan lima inisiatif konektivitas yang dibahas sebagai suatu konsep yang bergerak dan bisa saja mengalami perubahan. Sejauh ini Uni Eropa, Jepang, dan Tiongkok memiliki daftar proyek yang dikerjasamakan dengan mitranya, sedangkan Amerika Serikat dan Korea Selatan belum mendefinisikan secara lebih operasional proyek-proyek yang diimplementasikan dalam inisiatif konektivitas mereka. Demikian pula dengan inisiatif konektivitas di level ASEAN yang saat ini masih belum operasional dan menempatkan dirinya sebagai penerima manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan bahwa konsep dan operasionalisasi inisiatif konektivitas tersebut akan berubah sesuai dengan kepentingan nasional dari negara penggagas dan/atau perubahan yang terjadi secara global, bahkan bagi negara yang sudah memiliki daftar proyeknya sekalipun.

Ketiga, tim penulis memosisikan faktor pengungkit dan faktor penghambat sebagai elemen yang tidak absolut. Artinya, dalam konteks kondisi Indonesia, dan atau kondisi negara lain secara umum, faktor pengungkit bisa saja akan menjadi faktor penghambat jika tidak dikelola dengan baik. Pun demikian dengan faktor penghambat - yang bisa berubah menjadi faktor pengungkit dan bisa mendorong posisi Indonesia untuk bisa meningkatkan posisinya dalam GVC dan/atau meraup manfaat sebesar-besarnya dari kompetisi inisiatif konektivitas yang ditawarkan oleh negara-negara besar. Misal, terkait demografi, di satu sisi banyaknya angkatan kerja bisa berkontribusi sebagai faktor pengungkit. Akan tetapi, jika bonus demografi tidak diimbangi dengan peningkatan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, peluang tersebut bisa menjadi penghambat dalam perekonomian.

Keempat, monograf ini membedakan bagaimana melihat tujuan dari penggunaan faktor pengungkit: pertama, faktor pengungkit untuk meningkatkan partisipasi GVC suatu negara, dan kedua, faktor pengungkit untuk mendapatkan manfaat dari inisiatif konektivitas. Pilihan pertama menitikberatkan pada motif ekonomi agar kontribusi suatu negara dalam GVC meningkat, sementara pilihan kedua menitikberatkan pada aspek geopolitik di mana suatu negara perlu mengambil langkah tertentu agar bisa mendapatkan perhatian dari negara yang memiliki inisiatif konektivitas agar mau bekerja sama, tidak hanya terkait dengan upaya meningkatkan posisi pada GVC. Secara khusus, stabilitas politik merupakan modalitas bagi Indonesia untuk menawarkan "jaminan" keamanan bagi keberlangsungan kerja sama dengan mitra negara lain. Di

²⁰⁴ Aulia Mutiara Hatia Putri, "Umur Batu Bara RI Ternyata Lebih Panjang Dari Gas Bumi," *CNBC*, dirilis pada 23 Desember 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20221223071136-128-399440/umur-batu-bara-ri-ternyata-lebih-panjang-dari-gas-bumi>.

satu sisi, modalitas tersebut dapat digunakan untuk menawarkan investor agar mau berinvestasi di Indonesia untuk meningkatkan kualitas partisipasi Indonesia dalam GVC. Di sisi lain, stabilitas politik juga bisa digunakan bagi Indonesia untuk meyakinkan pada negara mitra agar mau bekerja sama dengan Indonesia dalam cakupan yang lebih luas.

Kelima, tim penulis menilai bahwa ada elemen relativitas dalam melihat faktor pengungkit: relatif terhadap negara mana yang sejalan dengan kesesuaian dengan faktor pengungkit yang dimiliki oleh suatu negara; dan relatif bahwa ada dimensi waktu bahwa pada suatu saat faktor pengungkit bisa saja tidak akan menjadi pengungkit lagi dan justru menjadi penghambat. Artinya, misal, kebijakan luar negeri bebas dan aktif Indonesia saat ini memang dianggap masih relevan karena sifat netralnya. Akan tetapi, kemunculan atau penguatan tensi konflik di antara berbagai negara di dunia, pada satu titik berpotensi memaksa Indonesia untuk memilih bekerja sama dengan suatu kelompok dibanding kelompok lainnya. Situasi tersebut tentunya menjadi tantangan bagi kebijakan bebas aktif yang selama ini masih dipegang Indonesia. Selain itu, terdapat batasan waktu tertentu bagi suatu faktor pengungkit yang bisa saja pada waktu tertentu akan berubah menjadi faktor penghambat. Misalnya, sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki oleh Indonesia saat ini pada suatu saat akan habis, khususnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai contoh, persediaan batu bara di Indonesia diprediksi akan habis dalam 62 tahun lagi.²⁰⁴ Dengan demikian, tanpa adanya upaya mitigasi atau diversifikasi untuk pemanfaatan yang berkelanjutan, sumber daya alam akan berubah menjadi kelangkaan dan menjadi faktor penghambat.

Keenam, kami juga menilai bahwa salah satu peningkatan partisipasi GVC dalam jangka panjang harus diarahkan juga untuk meningkatkan ketahanan di sektor-sektor strategis suatu negara. Sebagai contoh, pandemi Covid-19 merupakan salah satu pembuktian bahwa terdapat masalah besar dalam rantai pasok sektor kesehatan baik secara global maupun nasional. Dalam konteks pandemi Covid-19, penguatan ketahanan dalam penyediaan vaksin, obat-obatan, alat pelindung diri, dll., menjadi aspek yang fundamental agar ketersediaannya mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri. Di dalam kondisi seperti itu, negara akan memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sebelum bisa mendistribusikan kepada negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu, faktor pengungkit dan penghambat bisa saja tidak akan berdampak.

Ketujuh, publikasi ini mengidentifikasi peluang dan risiko yang ada dari setiap lima inisiatif konektivitas yang didasarkan pada dokumen resmi terkait inisiatif konektivitas dari masing-masing penggagas. Meskipun tulisan ini mengklasifikasikan risiko yang ada (tinggi, moderat, rendah), tulisan ini perlu diperlakukan sebagai alat untuk menggali lebih dalam perbandingan antara kelima inisiatif konektivitas dan tidak dimaksudkan untuk mengarahkan Pemerintah Indonesia untuk memilih pada inisiatif tertentu. Alih-alih mengusulkan untuk memilih suatu inisiatif, tulisan ini menjabarkan secara objektif potensi peluang dan tantangan yang perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan bekerja sama dengan negara penggagas konektivitas.

Kedelapan, tim penulis mengusulkan Indonesia untuk lebih memanfaatkan posisinya dalam konteks kerja sama di ASEAN. Sebagai pencetus inisiatif ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), Indonesia harus mampu membuat inisiatif tersebut lebih relevan dalam menjawab tantangan-tantangan global terkini di kawasan. Seperti yang diketahui, AOIP dibuat sebelum adanya pandemi, ancaman krisis ekonomi global serta meningkatnya tensi geopolitik. Salah satu kerja sama yang dapat ditawarkan adalah terkait dengan inisiatif dalam meningkatkan resiliensi rantai pasok khususnya di sektor-sektor strategis seperti teknologi, industri hijau dan kendaraan listrik. Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023 ini harus dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai upaya untuk mendefinisikan ulang kepentingan nasional Indonesia di level regional dalam platform kerja sama AOIP.

Kesembilan, monograf ini mengidentifikasi salah satu tren terkait pelepasan (*decoupling*) yang mulai dilaksanakan oleh negara-negara besar yang ditujukan untuk meningkatkan ketahanan domestik untuk sektor-sektor strategisnya. Di satu sisi, tren ini menunjukkan adanya intensi suatu negara untuk mengurangi ketergantungan dari negara lain yang disebabkan adanya tensi politik atau alasan strategis lainnya. Di sisi lain, tren ini memberikan tantangan bagi pendekatan liberalisme dalam ilmu hubungan internasional yang selama ini mempromosikan kerja sama untuk menghindari konflik. Bagi Indonesia, setidaknya terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, terkait GVC, Indonesia perlu segera menyesuaikan kebijakan perdagangan, industri, dan investasinya di tengah tren pelepasan serta sekuritisasi ekonomi. Kedua, terkait peran geopolitiknya, Indonesia perlu lebih aktif dan konsisten dalam mempromosikan kerja sama regional melalui ASEAN dan multilateral melalui forum-forum internasional seperti G20 dan APEC.

Terakhir, publikasi ini menekankan bahwa posisi Indonesia dalam kontribusi GVC saat ini masih lemah dan belum bisa menjadi *hub* atau *spoke* dalam GVC tersebut. *Forward participation* (FP) dalam GVC Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan *backward participation* (BP) yang mana mengindikasikan bahwa belum banyak produk impor yang diubah dan ditingkatkan nilai tambahnya dan diekspor ke negara lain. Jika dikaitkan dengan proyeksi Indonesia menuju 2045, secara risiko geopolitik, Indonesia berada di posisi yang aman karena berpegang pada prinsip bebas dan aktif – tidak memihak pada suatu kelompok tertentu. Akan tetapi, di satu sisi, jika berbicara mengenai penguatan kapasitas untuk menjadi negara besar dan harapan untuk masuk ke dalam jajaran 5 ekonomi terbesar di dunia, pekerjaan rumah yang dimiliki masih banyak, khususnya untuk memperbaiki beberapa hambatan yang disebutkan dalam bagian sebelumnya dalam tulisan ini.

Rekomendasi Kebijakan

Berangkat dari butir-butir refleksi di atas, bagian ini akan membahas rekomendasi kebijakan untuk menjawab empat faktor penghambat bagi Indonesia yang telah monograf ini identifikasi. Faktor penghambat yang dibahas dalam tulisan ini perlu diupayakan perbaikannya baik secara mandiri, maupun dengan memanfaatkan peluang kerja sama internasional dari negara mitra. Usulan rekomendasi dalam bagian ini dibagi sesuai dengan faktor penghambat dengan ke dalam tiga jangka waktu: pendek, menengah, dan panjang.

Modal Manusia

Jangka Pendek

- **Peningkatan kuantitas dan kesejahteraan tenaga pendidik (guru/dosen).** Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mencatat Indonesia menghadapi situasi kekurangan guru sebanyak 1,1 juta orang pada tahun 2022 meningkat menjadi 1,2 juta orang pada tahun 2023 dan diproyeksi kembali meningkat menjadi 1,3 juta orang pada tahun 2024.²⁰⁵ Rendahnya insentif kesejahteraan bagi profesi pengajar menjadi salah satu penyebab minimnya minat untuk menjadi pengajar. Pemerintah perlu melakukan upaya peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik sehingga menjadi profesi yang lebih kompetitif terhadap profesi lainnya, utamanya untuk tenaga pendidik di bidang *Science, Technology, Engineering and Mathematics* (STEM) dan Bahasa Asing tertentu – yang merupakan sektor strategis dalam mendukung iklim inovasi dan daya saing. Peningkatan kesejahteraan dapat ditempuh antara lain dengan memfasilitasi transfer guru honorer menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau guru Pegawai Negeri Sipil (PNS). Melalui keberadaan tenaga pendidik yang kompeten dapat meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia sehingga bersaing di tingkat global.
- **Peningkatan Kemitraan Kampus Merdeka dengan Industri Strategis.** Selain dapat mengembangkan kemampuan praktis mahasiswa, Kampus Merdeka menawarkan fasilitas *link and match* antara mahasiswa yang akan segera menjadi angkatan kerja terhadap kebutuhan dunia industri. Keabsenan sinkronisasi antara permintaan dan penawaran lapangan pekerjaan berpotensi menciptakan pengangguran. Saat ini, Kampus Merdeka telah menjalin kerja sama dengan beragam mitra mulai dari K/L hingga perusahaan swasta. Akan menjadi lebih baik, apabila dilakukan penguatan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang hendak dijadikan sebagai industri unggulan Indonesia untuk mencapai posisi strategis dalam GVC.
- **Evaluasi dan reorientasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan/atau Kartu Prakerja untuk penguatan kompetensi di bidang strategis, utamanya untuk membentuk SDM dengan keterampilan dalam bidang digitalisasi teknologi.** Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan dua hal. Pertama, tenaga pendidik yang mumpuni, sehingga dapat membangun keterampilan Angkatan Kerja yang menjadi peserta program. Kedua, penguatan program BLK/Kartu Prakerja dengan fasilitas *link and match* antara lulusan program terhadap kebutuhan lapangan pekerjaan baik di tingkat nasional maupun global. Saat ini, terdapat 180 lembaga pelatihan yang telah diakses oleh 11,4 juta penerima manfaat Kartu Prakerja, termasuk purna pekerja migran. Pemerintah perlu lebih gencar dalam memfasilitasi pelatihan yang secara spesifik mendukung peningkatan keterampilan dalam aspek digitalisasi teknologi dan informasi.

²⁰⁵ Novia Aisyah, "Data Kemendikbudristek: Indonesia Kekurangan 1.312.759 Guru Pada 2024," *detikedu*, dirilis pada Mei 2023, <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6739311/data-kemendikbudristek-indonesia-kekurangan-1312759-guru-pada-2024>.

- **Identifikasi dan penetapan peta jalan kebutuhan SDM strategis.** Hal ini ditujukan sebagai panduan bagi calon angkatan kerja dalam memilih fokus atau konsentrasi kemampuan dan keterampilan yang hendak dikembangkan secara lebih lanjut. Selain itu, peta jalan dapat menjadi langkah untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja yang akan menopang keterlibatan Indonesia dalam GVC.

Jangka Menengah

- **Mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada keterlibatan Indonesia dalam GVC dan adaptif terhadap keilmuan.** Melalui kurikulum tersebut, peserta didik sejak dini dapat dikenalkan dan difokuskan kepada keterampilan yang dibutuhkan dalam industri GVC seperti STEM dan penggunaan bahasa asing. Secara lebih lanjut, mengingat bahwa GVC rentan terhadap guncangan sistemik yang disebabkan perkembangan teknologi baru, dibutuhkan SDM yang adaptif dalam memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan yang diperlukan dalam GVC.
- **Penguatan BRIN sebagai pusat riset, pengembangan dan penerapan iptek secara inovatif yang mendukung keterlibatan Indonesia dalam GVC.** Dengan adanya kapasitas riset dan pengembangan yang mumpuni, Indonesia diharapkan dapat memfasilitasi SDM untuk dapat menghasilkan produk inovatif yang berdaya saing dalam GVC. Selain itu, melalui penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman SDM terhadap teknologi dimaksud. Melalui penerapan dan pengenalan terhadap teknologi dimaksud, SDM berpotensi untuk meningkatkan kompetensi dasar atas teknologi hingga mengembangkannya secara lebih lanjut.

Jangka Panjang

- **Membangun dan mengakses jaringan diaspora Indonesia untuk meningkatkan partisipasi Indonesia dalam GVC.** Diaspora Indonesia saat ini tersebar luas di berbagai belahan dunia terutama negara-negara kuat seperti AS, Tiongkok, Jepang, Uni Eropa, dan berbagai negara lainnya. Meskipun demikian, ketersebaran diaspora tersebut cenderung hanya mendukung produksi domestik negara asing dimaksud namun belum mampu mendorong keterlibatan Indonesia dalam GVC. Oleh karena itu, perlu dibangun sistem dalam jangka panjang yang mampu memfasilitasi diaspora Indonesia untuk mendukung keterlibatan nasional dalam GVC, khususnya untuk industri strategis. Fasilitas yang dibutuhkan antara lain 1) program repatriasi untuk menarik kembali diaspora dengan keterampilan tinggi untuk mengimplementasikan ilmu dan keterampilannya di Indonesia, 2) program jaringan inkubator *link and match* keterhubungan GVC antara perusahaan asing yang dipengaruhi diaspora Indonesia dengan perusahaan Indonesia. Pembangunan jaringan inkubator dimaksud dapat turut serta melibatkan peran Kementerian Luar Negeri dan K/L terkait lainnya.

Kualitas Institusional

Jangka Pendek

- **Penyederhanaan prosedur pendaftaran HAKI untuk produk/jasa konvensional maupun digital.** Kementerian Hukum dan HAM perlu menyederhanakan prosedur pendaftaran HAKI dan memberikan insentif jaminan yang pasti bagi pendaftar HAKI. Hal ini diharapkan dapat memotivasi pendaftaran produk atau jasa baik berbentuk digital maupun konvensional. Selain itu, sosialisasi perlu digencarkan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, agar dapat mendaftarkan merek dagangnya. Langkah ini bertujuan meningkatkan akses pasar internasional untuk UMKM Indonesia.

- **Perbaikan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) untuk penindakan tindak korupsi.** Digitalisasi menjadi suatu keniscayaan untuk membangun basis data yang tersimpan secara digital dan minim intervensi manusia. Selain itu, proses integrasi sistem teknologi di keempat instansi, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM, yang menangani tindak pidana korupsi diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan domestik maupun asing yang terlibat dalam GVC.
- **Penyederhanaan proses peradilan.** Prosedur penyelesaian sengketa via peradilan harus disederhanakan baik dari sisi waktu, biaya, dan proses yang harus ditempuh. Meskipun Mahkamah Agung telah memperkenalkan mekanisme gugatan sederhana untuk gugatan dengan nilai di bawah 500 juta rupiah bagi pelaku usaha, sosialisasi kepada publik masih harus digencarkan. Penyederhanaan proses ini merupakan salah satu jalan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha atau investor di Indonesia.

Jangka Menengah

- **Pembangunan infrastruktur perizinan OSS digital yang terintegrasi pusat dan daerah.** Infrastruktur fisik termasuk perangkat keras dan sarana pendukungnya harus dikembangkan hingga ke tingkat kabupaten/kota dengan baik untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, khususnya perizinan usaha. Hal ini tentunya didukung dengan fondasi peraturan pusat-daerah yang harmonis dan rapi serta kapasitas SDM di pusat dan daerah yang mumpuni.
- **Penguatan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)** melalui peningkatan kapasitas dan integritas baik dari tingkat pusat dan daerah untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak korupsi. Selain itu, dokumentasi dan penyimpanan basis data harus dilakukan secara digital dan menyeluruh untuk mengurangi risiko intervensi atau penyalahgunaan data.
- **Penggunaan peradilan elektronik (e-court) untuk semua jenis perkara.** Penggunaan peradilan elektronik saat ini masih terbatas pada kasus besar dan belum mencakup mekanisme gugatan sederhana. Ke depan, seluruh penyelesaian perkara baik nilai gugatan kecil maupun besar harus bisa difasilitasi secara lebih efisien melalui *e-court*. Dengan kehadiran *e-court* diharapkan dapat meningkatkan persepsi transparansi dan kepastian hukum di Indonesia bagi pelaku usaha domestik atau asing yang terlibat dalam GVC.

Jangka Panjang

- **Menciptakan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik dan otomatisasi pelayanan publik dalam mendorong iklim usaha yang efisien dan berkelanjutan.** Digitalisasi dalam pemerintahan berbasis elektronik merupakan langkah jangka panjang yang harus diupayakan melalui serangkaian aksi pendukung yang harus dilaksanakan sebelumnya, seperti penyalarsan peraturan perundangan, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN).
- **Mendorong terwujudnya peradilan berbasis elektronik dan mengembangkan pangkalan data perkara secara digital sebagai rujukan penyelesaian sengketa.** Dalam jangka panjang, perlindungan dan kepastian hukum akan lebih terjamin ketika seluruh dokumentasi basis data perkara dan pelaksanaan penyelesaian sengketa tersimpan secara digital. Pada tingkatan tertentu, basis data digital ini akan menjadi dasar untuk dikembangkannya analisis kasus melalui kecerdasan buatan yang akan mempermudah proses peradilan.

Kebijakan Perdagangan Investasi

Jangka Pendek

- **Reviu kebijakan perdagangan dan hambatan perdagangan.** Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan fasilitasi impor dan pengurangan hambatan perdagangan yang selama ini masih belum memberikan nilai lebih bagi kontribusi Indonesia dalam GVC, diantaranya peningkatan kualitas jasa logistik dan infrastruktur. Evaluasi kebijakan perlu diarahkan pada potensi dampak kebijakan hambatan perdagangan tarif dan non-tarif, seperti evaluasi kebijakan TKDN.
- **Evaluasi dan penyelesaian masalah tentang peraturan tumpang tindih terkait perizinan.** Meskipun UU Cipta Kerja dirancang untuk meningkatkan efisiensi waktu perizinan dan transparansi dalam melakukan usaha, pada pelaksanaannya masih terdapat peraturan yang saling bertentangan atau tumpang tindih baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk itu, evaluasi dan harmonisasi peraturan secara komprehensif terkait peraturan dari tingkat pusat hingga daerah perlu segera dilakukan. Pada gilirannya, sejalan dengan tercapainya tujuan dari UU Cipta Kerja dapat menghadirkan iklim usaha yang lebih kondusif bagi para investor. Terakhir, tren-tren investasi terkini seperti potensi investasi dalam ekonomi hijau dan meningkatnya minat investor dalam sektor jasa perlu ditindaklanjuti.

Jangka Menengah

- **Memperdalam perdagangan dan investasi Intra-ASEAN.** Indonesia harus lebih aktif memperdalam kerja sama ekonomi baik dalam perdagangan maupun investasi sebagai bantalan dalam menavigasi tensi geopolitik dan geoekonomi yang diproyeksikan semakin meningkat di masa depan. Dengan perekonomian dan perdagangan ASEAN yang semakin signifikan, hal ini akan meningkatkan daya tawar ASEAN sebagai kekuatan ekonomi dunia.
- **Mendorong perbaikan sistem perdagangan multilateral di WTO.** Indonesia harus menegaskan komitmen terhadap reformasi WTO sebagai tonggak pada sistem perdagangan multilateral, baik dalam forum-forum ekonomi internasional seperti G20, APEC dan ASEAN maupun bersama dengan negara-negara yang berpandangan sama. Reformasi WTO dimaksud untuk menegakkan peraturan WTO khususnya terkait dengan penyelesaian sengketa. Di saat yang bersamaan, reformasi bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan dunia terhadap WTO yang saat ini tengah menurun akibat perselisihan dagang yang memuncak. Reformasi WTO harus dilakukan demi terjaganya sistem perdagangan yang transparan, berbasis peraturan serta bebas dari diskriminasi.

Jangka Panjang

- **Memperkuat kapasitas kelembagaan pusat dan daerah dalam merespons inisiatif global.** Pemerintah perlu membangun kapasitas dalam penguatan fungsi pengawasan proses perdagangan dan sistem peringatan dini dalam menghadapi kemungkinan disrupsi GVC serta untuk mendapatkan akses dan pengelolaan sumber keuangan internasional diperlukan sistem yang dapat secara responsif memonitor perkembangan terkini dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat.
- **Meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan setempat lebih jauh** dari proses perencanaan hingga evaluasi akan meningkatkan transparansi dan meningkatkan kesadaran publik seputar manfaat dan risiko yang akan timbul dari proyek-proyek investasi melalui optimalisasi forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional dari tingkat terbawah hingga pusat.

Infrastruktur

Jangka Pendek

- **Evaluasi infrastruktur Indonesia.** Hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah secepatnya adalah melakukan evaluasi multi-pemangku kepentingan terhadap kondisi infrastruktur fisik dan digital di Indonesia. Evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu merujuk pada indeks efisiensi infrastruktur internasional yang berlaku dan mengumpulkan input dari pengguna infrastruktur terutama kelompok bisnis ekspor-impor.
- **Kemitraan internasional pengembangan & pengelolaan infrastruktur.** Model kemitraan strategis yang saat ini sudah dijalankan oleh PT. Angkasa Pura I dan II dalam rangka pengembangan dan pengelolaan bandara perlu diperluas untuk sektor transportasi lain, khususnya pelabuhan, darat, dan juga digital. Pemilihan mitra strategis tentu perlu mempertimbangkan elemen geopolitik, di samping peningkatan kualitas dan konektivitas kemitraan yang ditawarkan.
- **Sinergi dan standardisasi sumber daya manusia bidang infrastruktur.** Seluruh sekolah kedinasan terutama yang diampu oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu lebih menyesuaikan pengampu, kurikulum, standar agar sesuai dengan industri terkait. Insentif fiskal dan non-fiskal dapat diberikan kepada sektor swasta yang berpartisipasi dalam upaya ini.
- **Pemenuhan infrastruktur digital mendasar.** Negara dalam waktu singkat perlu mengakselerasi pengembangan infrastruktur layanan jaringan 4G melalui pembangunan dan peningkatan *Base Transceiver Station* (BTS) khususnya di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal. Transisi menuju jaringan 5G perlu dipercepat khususnya di kawasan industri, sentra bisnis, *technopark*, perkantoran di kota-kota besar. Pemerintah perlu turut mempertimbangkan risiko geopolitik dalam pemilihan mitra pengembangan 5G di bidang infrastruktur strategis. Kecepatan internet di atas rata-rata global juga merupakan bagian penting dari infrastruktur digital mendasar.

Jangka Menengah

- **Pemenuhan standar hijau, rendah emisi, dan berketahanan bencana.** Mengingat seluruh infrastruktur fisik di Indonesia perlu segera beradaptasi dengan standar perubahan iklim dan bencana yang berlaku di tingkat internasional, pemerintah perlu memperkuat kuantitas dan kualitas perangkat pengawasan regulasi terkait hingga ke tingkat daerah. Sanksi bagi ketidakpatuhan perlu diperberat, sementara prasyarat pembangunan infrastruktur termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perlu disesuaikan dengan standar internasional.
- **Reformasi tata kelola digital.** Tata kelola yang ada dapat mulai diperbaiki dengan meninjau kembali tugas pokok dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara. Reformasi tersebut harus mendorong pencapaian daya saing ekonomi, teknologi, serta keamanan siber Indonesia relatif dengan negara lain. Pemerintah perlu memiliki tim koordinasi nasional peninjauan produk hukum terkait tata kelola digital secara berkala dalam rangka memenuhi kecepatan perkembangan teknologi.
- **Reformasi tata kelola konektivitas.** Pembangunan infrastruktur fisik tidak secara otomatis berarti pengembangan konektivitas. Reformasi tata kelola konektivitas harus dimulai dengan peninjauan kembali tugas pokok dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, dan BUMN infrastruktur, transportasi, dan logistik. Reformasi yang ada perlu diarahkan agar infrastruktur fisik di Indonesia terkoneksi mulai dari multi-moda logistik serta terkoneksi dengan infrastruktur digital.

- **Pembangunan sarana pendukung kendaraan pintar tanpa kemudi atau *autonomous* dan/atau listrik.** Seiring dengan cepatnya perkembangan teknologi, Indonesia dalam jangka menengah perlu mempertimbangkan pembangunan sarana pendukung untuk transportasi logistik dengan berbagai jenis energi terbarukan. Pemerintah bahkan perlu mengkaji lebih lanjut infrastruktur yang melibatkan transportasi otomatis. Bukan hanya dari stasiun pengisian kendaraan listrik dan/atau *autonomous*, tetapi juga baterai untuk kapal kargo, truk, kereta, ataupun pesawat.

Jangka Panjang

- **Menciptakan ekosistem penelitian dan pengembangan (*litbang*) infrastruktur.** Perlu lebih banyak penelitian terkait dengan tren infrastruktur fisik dan digital. Baik itu dari segi tren kebijakan maupun teknologi yang ada. Negara perlu berinvestasi pada ekosistem ini dengan memberikan bantuan permodalan awal dan hibah kepada pusat penelitian, laboratorium, dan usaha rintisan (*start-up*) nasional yang berfokus pada teknologi terkini, termasuk *machine learning*, *cloud computing*, kecerdasan buatan, robotik, *blockchain*, dan *Internet of Things* (IoT). Negara perlu memberikan dukungan penuh terhadap upaya pengembangan teknologi infrastruktur dan digital dari mulai tahapan riset, mendapatkan paten, produksi massal, hingga ekspor.
- **Mendorong daerah pintar (*smart regions*).** Indonesia dapat mengembangkan proyek provinsi percontohan (*pilot*) untuk dilengkapi dengan seluruh infrastruktur fisik dan digital terutama *machine learning*, *cloud computing*, keamanan siber, dan IOT. Prioritas daerah percontohan tersebut dapat didasarkan pada nilai ekspor-impor yang dihasilkan, daerah kaya akan sumber daya, pusat *e-commerce*, ataupun daerah dengan proyek strategis nasional.

Secara singkat, rekomendasi kebijakan yang diusulkan dalam tulisan ini bisa disarikan ke dalam tabel berikut:

Tabel 8. Ikhtisar Rekomendasi Kebijakan

Faktor Penghambat	Rekomendasi		
	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kuantitas dan kesejahteraan tenaga pendidik (guru/dosen); • Peningkatan Kemitraan Kampus Merdeka dengan Industri Strategis; • Evaluasi dan reorientasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan/atau Kartu Prakerja untuk penguatan kompetensi di bidang strategis; • Identifikasi dan penetapan peta jalan kebutuhan SDM strategis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada keterlibatan Indonesia GVC dan adaptif terhadap keilmuan; • Penguatan BRIN sebagai pusat riset, pengembangan dan penerapan iptek secara inovatif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun dan mengakses jaringan diaspora Indonesia untuk meningkatkan partisipasi Indonesia dalam GVC.

Faktor Penghambat	Rekomendasi		
	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
Tata Kelola Pemerintahan dan Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Penyederhanaan prosedur pendaftaran HAKI untuk produk/jasa konvensional maupun digital; Perbaikan sistem penanganan perkara tindak pidana berbasis teknologi informasi (SPPT-TI) untuk penindakan tindak korupsi; Penyederhanaan proses peradilan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan infrastruktur perizinan <i>online single submission</i> (OSS) digital yang terintegrasi pusat dan daerah; Penguatan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP); Penggunaan peradilan elektronik (<i>e-court</i>) untuk semua jenis perkara. 	<ul style="list-style-type: none"> Menciptakan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik dan otomatisasi pelayanan publik dalam mendorong iklim usaha yang efisien dan berkelanjutan; Mendorong terwujudnya peradilan berbasis elektronik dan mengembangkan pangkalan data perkara secara digital sebagai rujukan penyelesaian sengketa.
Kebijakan Perdagangan dan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> Reviu kebijakan perdagangan dan hambatan perdagangan; Evaluasi dan penyelesaian masalah tentang tumpang tindih peraturan terkait perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> Memperdalam perdagangan dan investasi Intra-ASEAN; Mendorong perbaikan sistem perdagangan multilateral di WTO 	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat kapasitas kelembagaan pusat dan daerah dalam merespons inisiatif global; Meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan setempat lebih jauh.
Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi infrastruktur Indonesia Kemitraan internasional pengembangan dan pengelolaan infrastruktur Sinergi dan standardisasi sumber daya manusia bidang infrastruktur Pemenuhan infrastruktur digital mendasar 	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan standar hijau, rendah emisi, dan berketahanan bencana Reformasi tata kelola digital Reformasi tata kelola konektivitas Pembangunan sarana pendukung transportasi <i>autonomous</i> dan/atau listrik 	<ul style="list-style-type: none"> Menciptakan ekosistem penelitian dan pengembangan (litbang) infrastruktur Mendorong daerah pintar (<i>smart regions</i>)

Penutup

Monograf ini tidak dimaksudkan untuk mengarahkan Indonesia dalam memilih inisiatif konektivitas tertentu. Adapun lima inisiatif konektivitas yang diulas dalam cakupan monograf, yakni A New Plan for Free and Open Indo-Pacific (NPFVIP); Free, Peaceful, and Prosperous Indo-Pacific (FPIP); Global Development Initiative (GDI); Global Gateway; dan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), memberikan sekilas gambaran arena permainan kekuatan global yang terjadi saat ini. Melalui gambaran tersebut, monograf ini dapat menjadi titik awal diskusi strategi Indonesia dalam menghadapi inisiatif konektivitas global.

Secara lebih luas, monograf ini juga menghadirkan kerangka awal untuk menganalisis inisiatif konektivitas global melalui pengukuran terhadap faktor pendorong yang ditawarkan dan risiko yang ditimbulkan. Dengan adanya kerangka ini negara non-penggagas dapat menentukan langkah strategi dalam menghadapi berbagai inisiatif konektivitas global. Satu poin yang perlu dicatat terkait kerangka ini adalah terdapat suatu relativitas kesamaan antarnegara dan waktu. Kondisi dimaksud menjadikan variabel-variabel dalam faktor pendorong tidak bersifat konstan melainkan dinamis sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

Meskipun demikian, monograf ini menyadari berbagai keterbatasan dalam proses penulisannya. Pertama, monograf ini berasumsi bahwa kepentingan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan partisipasi secara umum dalam GVC. Asumsi tersebut didukung oleh beberapa bukti empiris bahwa partisipasi dalam GVC dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Akan tetapi, monograf ini juga tidak menutup mata bahwa partisipasi yang tinggi dalam GVC juga meningkatkan risiko bagi negara dimaksud terhadap guncangan perekonomian global. Oleh sebab itu, monograf ini berpandangan akan lebih ideal jika Indonesia dapat menempatkan dirinya secara strategis dalam partisipasinya di GVC.

Kedua, sehubungan dengan posisi strategis tersebut, monograf ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data perekonomian dan perdagangan secara agregat. Hal tersebut menyebabkan sektor-sektor potensial yang bersifat strategis tidak secara jelas teridentifikasi. Sektor-sektor inilah yang perlu diidentifikasi dan diperdalam pada diskusi dan penelitian selanjutnya agar Indonesia dapat mengambil langkah strategis dalam arena GVC.

Ketiga, monograf ini belum menghadirkan bahasan secara detail tentang tujuan khusus dari masing-masing inisiatif. Padahal, perbedaan tujuan akan menghasilkan desain dan dampak yang berbeda pada perkembangan GVC. Oleh karena itu, monograf menyadari adanya kebutuhan untuk secara khusus membahas tujuan khusus dari masing-masing inisiatif, termasuk mengenai kemungkinan pertentangan antar satu inisiatif dengan lainnya.

Selain keterbatasan di atas, kerangka yang dikembangkan dalam monograf ini bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Kondisi tersebut tentunya memengaruhi rekomendasi yang diberikan dalam monograf ini karena rekomendasi tersebut hanya akan bertahan selama tidak terjadi perubahan signifikan. Oleh karena itu, monograf ini berharap kerangka yang telah disusun dapat direplikasi dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan rekomendasi. Di saat bersamaan, replikasi secara seri waktu dapat menyempurnakan kerangka analisis inisiatif konektivitas yang ditawarkan, khususnya dengan mempertimbangkan bahwa masing-masing inisiatif yang hingga saat ini masih dalam proses pembahasan atau pengembangan. Dengan segala keterbatasan yang ada, monograf ini cukup yakin tetap dapat menjadi fondasi yang kuat untuk mengembangkan badan literatur terkait inisiatif konektivitas global.

LAB 45 adalah lembaga kajian yang ingin menyelaraskan antara ilmu pengetahuan dan praktik empiris di bidang peramalan strategis. LAB 45 berkonsentrasi pada perkembangan global yang berdampak strategis dan bersifat disruptif terhadap kemajuan dan stabilitas Indonesia. LAB 45 bekerja membantu para pemangku kebijakan dalam mendorong proses transformasi Indonesia menuju negara maju pada tahun 2045. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.lab45.id atau pindai kode QR.





Jalan Mabas Hankam No. T65,
Bambu Apus, Cilangkap,
DKI Jakarta 13890



+62811452045



lab45@lab45.id



www.lab45.id

ISBN 978-623-88526-5-9 (PDF)

